KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr.Wb

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Rembang Tahun 2012.

LAKIP Kabupaten Rembang disusun dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2012, dan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2012.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Rembang untuk menginformasikan kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan maupun melaksanakan pembangunan selama tahun 2012. Laporan ini sekaligus sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menciptakan transparansi informasi guna terciptanya tata pemerintahan yang baik sebagai upaya mewujudkan visi **"Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera".** .

Kami menyadari bahwa hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2012 yang masuk dalam kategori berhasil/sesuai target tidak terlepas dari kerjasama semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah mulai dari perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasinya dalam proses pembangunan selama tahun 2012 serta dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Rembang Tahun 2012.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Rembang, Maret 2013

BUPATI REMBANG

H. MOCH SALIM,M.Hum

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ..... *i*
Daftar Isi ..... *ii*
Ikhtisar Eksekutif ..... *iii*

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Kondisi Umum Kabupaten Rembang..... 1
B. Aspek Strategis Organisasi 7
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang 9

BAB II RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA..... 24

A. Perencanaan Strategis..... 24
I. Visi..... 24
II. Misi..... 25
III. Tujuan..... 26
IV. Sasaran..... 27
B. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012..... 31
C. Penetapan Kinerja Tahun 2012..... 51

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……..……..…... 63

A. Pengukuran Kinerja 63
B. Capaian Kinerja Sasaran..... 65
C. Akuntabilitas Keuangan…..... 144

BAB IV PENUTUP 153
A. Kesimpulan …… 153
B. Saran …….. 158

LAMPIRAN
1. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2012
2. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2012
3. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010. Penyusunan RPJM memerlukan landasan pembangunan yang memiliki cakupan luas sehingga dapat ditetapkan sebagai dasar bagi daerah untuk menentukan visi, misi dan arah pembangunan di Kabupaten Rembang untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun. Penetapan RPJM merupakan acuan dalam penyusunan rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah :

"Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera"

Dalam rangka mencapai visi seperti tersebut diatas, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Memacu pertumbuhan investasi dalam rangka menghidupkan dan meningkatkan perkembangan sektor riil dan peningkatan kesempatan kerja.
2. Meningkatkan akses UMKM terhadap sumber permodalan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas.
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sumber-sumber pendapatan non konvensional dan tidak membebani masyarakat.
5. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi pendidikan sejak dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang menengah dan pendidikan tinggi yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan, baik pada tingkatan pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan aparatur yang profesional, berbudi pekerti luhur dan agamis.

8. Meningkatan mutu dan pemerataan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya Rembang Sea-Front City.
9. Mengimplementasikan pembangunan yang selalu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global.

Dalam rangka mewujudkan misi-misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Rembang.
2. Meningkatkan penyaluran modal bagi pelaku UMKM
3. Meningkatkan Iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikulura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka pengembangan wilayah pesisir.
5. Mengoptimalkan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
6. Mengoptimalkan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, perbaikan sarana dan prasarana, penyediaan sarana penunjang pembelajaran, penyediaan beasiswa dan kerjasama dengan pengguna pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.
7. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dan lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan.
8. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang kompeten, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrasturktur pedesaan dan wilayah cepat tumbuh
10. Mengembangkan tata kelola wilayah pesisir yang mampu menjadi pemicu pergerakan ekonomi daerah

11. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan serta proaktif dalam mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi yang memadai

Sesuai dengan penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2012 yang telah ditetapkan, capaian kinerja sasaran yang terdiri - dari 46 (empat puluh enam) sasaran adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
1	Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi.	100
2	Promosi peluang investasi.	139
3	Terjaminnya keamanan berusaha.	100,7
4	Tersedianya infrastruktur yang memadai.	373
5	Tersedianya dukungan SDM yang memadai.	86,37
6	Penyebaran sarana pelayanan bank dan lembaga keuangan non bank ke pelosok daerah.	101,85
7	Ketersediaan skim kredit sesuai dengan perilaku jenis usaha.	100
8	Adanya kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik.	140,33
9	Dimilikinya legalitas asset pelaku usaha sebagai jaminan kredit.	232
10	Jaminan keamanan oleh Pemda.	106,2
11	Mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.	110,9
12	Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha.	91,15
13	Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha	88,65

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
14	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian.	120,42
15	Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.	114,85
16	Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah.	216,03
17	Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat	108,05
18	Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.	76,87
19	Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi.	99,44
20	Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan.	113,69
21	Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan.	101,82
22	Tersedianya beasiswa bagi penduduk miskin.	104,36
23	Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan.	95,03
24	Tersedianya tenaga medis yang memadai.	32,38
25	Tersedianya obat-obatan yang memadai.	98
26	Tersedianya peralatan medis yang memadai.	94,44
27	Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.	105,02
28	Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan.	218,42
29	Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	100
30	Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.	100

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
31	Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama.	152,67
32	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai.	62,75
33	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat.	99,85
34	Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan.	64,35
35	Meningkatnya kualitas saluran irigasi.	84,81
36	Meningkatnya kualitas saluran drainase.	107,72
37	Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya *sea front city.*	106,23
38	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.	100
39	Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan.	85,95
40	Terwujudnya kawasan wisata bahari	205,09
41	Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance*.	75
42	Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien.	98,61
43	Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.	100
44	Responsif terhadap perkembangan situasi.	100
45	Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.	100
46	Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis	100
	Rata-rata	107,37

Prosentase capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2012 secara keseluruhan 107,37 (kategori sangat baik). Dari 46 (empat puluh enam) sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD capaian kinerja sasaran dengan kategori sangat baik ada 30 sasaran, kategori baik 11 (sebelas) sasaran, kategori cukup 4 (empat) sasaran dan kategori kurang 1(satu) sasaran.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2012, antara lain :

a. Permasalahan administrasi perencanaan
   1) Kurang akuratnya data awal perencanaan yang dapat menyebabkan pemasangan target yang terlalu tinggi, sehingga sulit tercapai;
   2) Adanya beberapa indikator kinerja pengukurannya dilakukan oleh pihak lain yang dapat menyebabkan kinerja SKPD yang bersangkutan tidak terukur tepat waktu, sehingga kinerja dimaksud seakan-akan tidak tercapai, padahal hanya belum terukur;
   3) Adanya SKPD yang tidak mengalokasikan anggaran untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.
b. Permasalahan teknis pelaksanaan
   1) Adanya faktor ekternal musim, hama, dan bencana, yang dapat mempengaruhi kinerja Pemerintah Kabupaten antara lain produktivitas dan pola tanam pada tanaman, pelaksanaan kegiatan konstruksi, kunjungan wisata, dan lain-lain;
   2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang kurang tepat dan waktu penyelesaian program/ kegiatan yang terlalu pendek sehingga hasil kegiatan tidak bisa mencapai target kinerja;
   3) Kurangnya sumber daya (manusia dan dana) untuk mencapai target yang telah ditetapkan;

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan pun bersifat administrasi dan teknis, sebagai berikut :

a. Pemecahan administrasi perencanaan

1) Menyesuaikan target kinerja dengan kondisi nyata dan kemampuan sumber daya yang dimiliki;
2) Mendorong pencapaian target kinerja dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi meskipun tidak ada anggaran yang secara khusus untuk memenuhi pencapaian tersebut;
3) Mendorong adanya sinkronisasi indikator kinerja dokumen RPJMD dan dokumen kinerja dengan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA);
4) Mendorong SKPD untuk melakukan pengukuran kinerja secara langsung;

b. Pemecahan teknis pelaksanaan
1) Mendorong petani menggunakan benih unggul dan tahan hama guna meminimalisir dampak dari musim;
2) Mengupayakan proses pelelangan pada awal tahun anggaran, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan cukup;
3) Meningkatkan fungsi monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan sehingga permasalahan pencapaian target kinerja dapat diketahui sejak awal dan dapat segera diupayakan penyelesaiannya;
4) Mengupayakan perubahan APBD guna memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan capaian dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang secara keseluruhan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan keselarasan dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja secara bertahap sesuai dengan siklus perencanaan, yaitu mengupayakan semua (100%) indikator kinerja utama dapat menjadi indikator kinerja tiap tahun;
2. Melakukan pengukuran secara periodik terhadap hasil capaian kinerja sebagai bahan pengendali pencapaian kinerja pada akhir tahun

anggaran dan tahun perencanaan agar upaya pencapaian target kinerja dapat optimal;

3. Menajamkan kembali program/kegiatan yang mengarah pada pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten dan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta menyediakan pendanaan yang cukup untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka memenuhi target capaian sasaran, terutama untuk target yang belum dipenuhi tahun sebelumnya;
4. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan rencana dan laporan kinerja.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum Kabupaten Rembang

1. Letak Wilayah Geografis

Kabupaten Rembang terletak di sebelah utara bagian timur Provinsi Jawa Tengah dengan posisi lintang berada pada 111°00' - 111°30' BT dan 6°30' - 7°6' LS. Dengan topografi yang sangat lengkap yaitu daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan, dengan jenis tanah terdiri atas kandungan mediterial, grumosal, aluvial, andosal dan regasal. Memiliki wilayah dengan luas 1.014,08 km², dan diapit oleh Laut Jawa di sebelah utara dan Pegunungan Kedeng Utara di sebelah selatan. Batas-batas administratif Kabupaten Rembang adalah:

Sebelah Utara	:	Laut Jawa
Sebelah Timur	:	Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Blora
Sebelah Barat	:	Kabupaten Pati

Gambar 1.1

Peta Wilayah Kabupaten Rembang

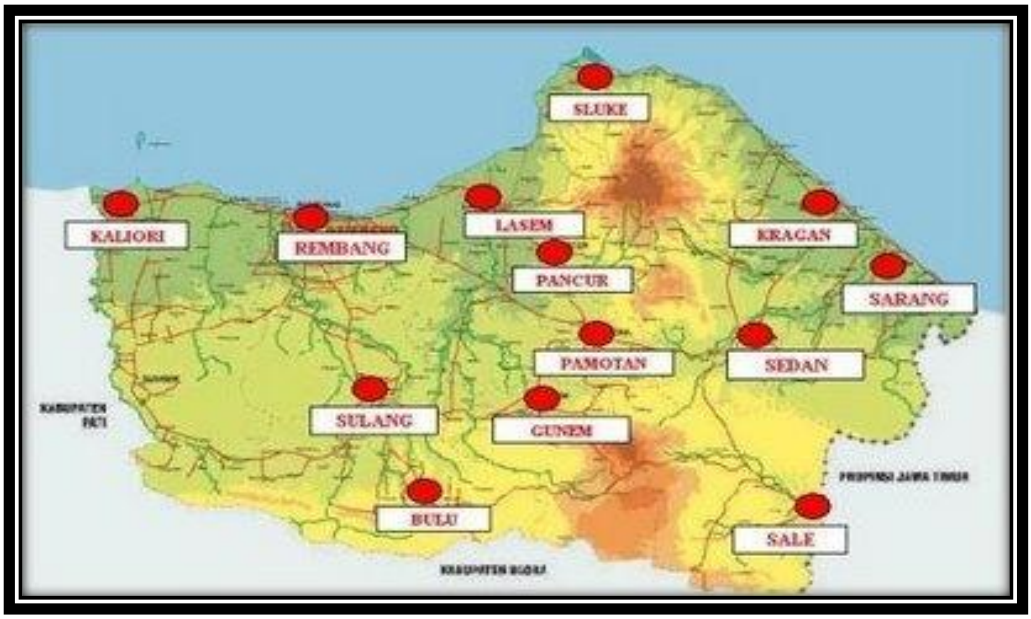

2. Luas Wilayah

Kabupaten Rembang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.714 ha) disusul Kecamatan Bulu (10.240 ha). Data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang tersaji pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1. Data Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2012

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (ha)
1	Sumber	7.673
2	Bulu	10.240
3	Gunem	8.020
4	Sale	10.714
5	Sarang	9.133
6	Sedan	7.964
7	Pamotan	8.156
8	Sulang	8.454
9	Kaliori	6.150
10	Rembang	5.881
11	Pancur	4.594
12	Kragan	6.166
13	Sluke	3.759
14	Lasem	4.504
	Jumlah	**101.408**

Sumber : Rembang Dalam Angka Tahun 2012

3. Topografi

Luas wilayah Kabupaten Rembang 101.408 Ha merupakan wilayah Kabupaten yang cukup luas dibandingkan dengan Kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar (46.39%) wilayah

Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah. yang terletak di bagian utara Kabupaten Rembang, sedangkan di bagian selatan relatif lebih tinggi. Wilayah di bagian selatan ini mempunyai ketinggian antara 100-500 meter dpl (30.42% dari total wilayah Kabupaten Rembang) dan sisanya berada pada ketinggian 0-25 m dan 500-1000 m.

Wilayah Kabupaten Rembang seluas 45.205 ha (46.58%) mempunyai kelerengan sebesar 0 - 2%. sedangkan 33.233 ha lainnya (43.18%) mempunyai kelerengan sebesar 2 - 15%. Wilayah perbukitan dan pegunungan dengan kelerengan sebesar 15 - 40% dan > 40% masing-masing seluas 14.38% dan 4.86% dari total wilayah Kabupaten Rembang.

4. **Klimatologi**

Wilayah Kabupaten Rembang memiliki jenis iklim tropis dengan suhu maksimum tahunan sebesar 33°C dan suhu rata-rata 23°C. dengan bulan basah selama 4 sampai 5 bulan. sedangkan selebihnya termasuk kategori bulan sedang sampai kering. Curah hujan di Kabupaten Rembang termasuk sedang, yaitu rata-rata 502.36 mm/tahun.

5. **Jenis Tanah**

Jenis tanah di Kabupaten Rembang diantaranya adalah Mediterial, Grumoso, Aluvial, Andosol dan Regosol. Jenis tanah Mediterial merupakan jenis tanah yang mendominasi di Kabupaten Rembang. yaitu meliputi 45%. sedangkan jenis Grumosol hanya 32%, Alluvial 10%, Andosol 8% dan Regosol 5%.

6. **Hidrologi**

Kabupaten Rembang memiliki sumber air permukaan berupa sungai dan dam. Sungai yang melewati wilayah Kabupaten Rembang antara lain Sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyan. Di Kabupaten Rembang terdapat 121 dam dan 25 daerah irigasi. Dari jumlah tersebut tidak semuanya dialiri air sepanjang tahun.

7. **Kependudukan**

Jumlah penduduk di Kabupaten Rembang dapat dibaca pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang Tahun 2007-2012

Tahun	Jenis Kelamin		Total	Pertum buhan
	Laki - Laki	Perempuan		
2007	291,106	292,128	583,234	
2008	292,844	293,743	586,587	0.57%
2009	294,380	295,439	589,819	0.55%
2010	296,253	297,107	593,360	0.60%
2011	298,244	299,018	597,262	0.66%
2012	299,728	300,549	600,277	0.50%

Diolah dari Rembang Dalam Angka Tahun 2012

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang rata – rata sekitar 589 jiwa / Km^2. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rembang dan terendah di Kecamatan Bulu.

8. **Aparat Pemerintah**

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak terlepas dari dukungan personil aparat pemerintahan. Untuk itu, Kabupaten Rembang memiliki 8.587 Pegawai Negeri Sipil yang siap mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Adapun kualifikasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Rembang per Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3. Data Kepegawaian Pemerintah

Kabupaten Rembang Tahun 2012

No.	Data Pegawai Negeri Sipil	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	8.587
2.	Kualifikasi Pendidikan	
	- SD	236
	- SLTP	425
	- SLTA	1.853
	- Diploma	2.489
	- S1	3.475
	- S2	109
3.	Pangkat dan Golongan	
	- Golongan I	365
	- Golongan II	2.193
	- Golongan III	2.936
	- Golongan IV	3.093
4.	Jumlah Pejabat	
	- Pejabat Struktural	656
	- Pejabat Fungsional	4.956

9. Agregatif Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari indikator agregat makro pembangunan diantaranya :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Total PDRB Kabupaten Rembang pada tahun 2012 berdasarkan harga konstan tahun 2000 sebesar Rp 2.491.364,48 juta, meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp 2.384.459,23 juta. Demikian juga dengan laju pertumbuhan PDRB yang meningkat dari Tiga sektor dengan nilai produksi terbesar adalah, (1) pertanian; (2) perdagangan, hotel dan restoran; serta (3) sektor Jasa-jasa. Nilai produksi sektor pertanian pada tahun 2012 sebesar

Rp 1.099.058,48 juta. Pada tahun yang sama, produksi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 415.594,20 juta, sedangkan sektor Jasa-jasa sebesar Rp 395.157,87 juta.

b. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang sejak Tahun 2002 – 2011 bergerak fluktuatif namun cenderung menurun. Berdasarkan data PPLS 2011 oleh BPS, jumlah penduduk miskin Kabupaten Rembang per September 2011 mencapai 23,71% atau 140.377 jiwa. Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung mengalami penurunan dari 5.92% pada tahun 2011 menjadi 5.80% pada tahun 2012.

c. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang menjadi salah satu ukuran kinerja daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ukuran IPM dibentuk oleh 3 (tiga) parameter yaitu angka usia harapan hidup, pencapaian pendidikan dengan komponen rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf, serta pengeluaran riil per kapita. IPM Kabupaten Rembang tahun 2012 belum dapat disajikan, namun berdasarkan IPM tahun 2011 termasuk dalam kategori baik, yaitu sebesar 72,45 naik dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 72,07.

d. Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, Nilai Tukar Petani dan Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami pertumbuhan yang melambat, namun pada tahun 2012 diprediksikan mengalami trend positif menjadi 4.48 sehingga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,42% dan pada tahun 2011 sebesar 4,40 %.

Untuk laju inflasi cenderung fluktuatif, pada tahun 2009 sebesar 3,09 % naik menjadi 6,81% pada tahun 2010 dan pada tahun

2011 menurun menjadi 2,73 %. Inflasi tahun 2012 di prediksikan sebesar 4.28%.

Sedangkan perkembangan nilai tukar petani (NTP) yang merupakan pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2009-2011 mengalami pertumbuhan yang relatif stagnan. Tahun 2010 NTP Kabupaten Rembang sebesar 98,00%, dan tahun 2011 sebesar 98,59% sedangkan untuk tahun 2012 NTP sebesar 99.18%.

Kemudian untuk distribusi pendapatan di Kabupaten Rembang tergolong merata. Hal ini terlihat dari nilai Gini Rasio sebesar 0.223 yang berarti tingkat ketimpangan rendah.

B. Aspek Strategis Organisasi

Penataan struktur kelembagaan yang handal, rasional, ramping dan proposional yang berorientasi pada semboyan “Miskin Struktur Kaya Fungsi“ memiliki aspek strategis yang cukup dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga eksistensinya dapat menjawab tantangan dan menjembatani kepentingan daerah dan masyarakat secara luas.

Bersandar pada prinsip – prinsip otonomi daerah yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mendukung tugas – tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas – tugas pembantuan lainnya maka sebagai implementasinya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 serta dilengkapi pula dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

Komposisi struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Rembang sesuai dengan peraturan di atas terdiri dari : Bupati ; Wakil Bupati ; Staf Ahli; dan Perangkat Daerah. Guna mengoptimalkan nilai – nilai strategis organisasi dengan program dan kegiatan maka Pemerintah Kabupaten Rembang senantiasa mengaktualisasikan seluruh kegiatan dengan pola pendekatan partisipastif (*Partisipatory Approach*) yang diharapkan tetap berkembang dinamis selaras dengan aspirasi masyarakat. Berpijak pada pola pendekatan di atas diharapkan akan tumbuh *feed back* (timbal balik) keselarasan antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat secara berkesinambungan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati selaku kepala daerah dalam melaksanakan roda pemerintahannya dibantu dengan :

1. Seorang Wakil Bupati;
2. Staf Ahli yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
3. Perangkat Daerah yang terdiri :
   - Sekretariat Daerah.
   - Sekretariat DPRD.
   - Dinas Daerah
   - Lembaga Teknis Daerah
   - Unit Pelaksana Teknis
   - Kecamatan
   - Satuan Polisi Pamong Praja
   - Kelurahan
   - Kelompok Jabatan Fungsional

C. Tugas Pokok, Fungsi Dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang, maka Bupati selaku Kepala Daerah memiliki tugas pokok dan wewenang yaitu :

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang diterapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas ini, Bupati dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang bertugas :

- Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
- mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah di daerah
- melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

Sedangkan Perangkat daerah sebagai unsur staf bertugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam wadah lembaga Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah dibidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik serta lembaga dinas daerah dibidang pelaksanaan urusan daerah.

Tugas pokok dan fungsi sebagai Lembaga Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 serta dilengkapi pula dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, terdiri dari :

1. **Sekretariat Daerah**

   Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, SATPOL PP, Lembaga Lain,

Kecamatan, dan Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas pokok di atas Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, SATPOL PP, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dibantu 3 Assisten, 9 Bagian, 27 Sub Bagian dan dibantu oleh kelompok – kelompok jabatan fungsional lainnya dengan komposisi sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah
b. Asisten Pemerintahan, yang membawahi :
    1. Bagian Tata Pemerintahan, yang membawahi :
        a) Subbagian Pemerintahan Umum dan Pertanahan;
        b) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;
        c) Subbagian Pemerintahan Desa.
    2. Bagian Hukum, yang membawahi :
        a) Subbagian Perundang-undangan;
        b) Subbagian Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
        c) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia.
    3. Bagian Hubungan Masyarakat, yang membawahi :
        a) Subbagian Pengkajian Informasi;
        b) Subbagian Pemberitaan dan Analisis Media;
        c) Subbagian Protokol dan Dokumentasi.
c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :
    1. Bagian Administrasi Perekonomian, yang membawahi :

a) Subbagian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
b) Subbagian Pengembangan Sumberdaya Ekonomi;
c) Subbagian Administrasi Sumber Daya Alam.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :
   a) Subbagian Pendidikan Mental Spiritual;
   b) Subbagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   c) Subbagian Pemberdayaan, Pemuda dan Olah Raga dan Seni Budaya.
3. Bagian Administrasi Pembangunan, yang membawahi :
   a) Subbagian Fasilitasi Pembangunan;
   b) Subbagian Pengendalian Pembangunan;
   c) Subbagian Evaluasi dan Analisa Pembangunan.

d. Asisten Administrasi, yang membawahi :
   1. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, yang membawahi :
      a) Subbagian Kelembagaan dan Tatalaksana;
      b) Subbagian Pendayagunaan Aparatur Pemerintahan Daerah;
      c) Subbagian Kepegawaian.
   2. Bagian Administrasi Keuangan, yang membawahi :
      a) Subbagian Perencanaan Program;
      b) Subbagian Perbendaharaan;
      c) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan.
   3. Bagian Umum, yang membawahi :
      a) Subbagian Rumah Tangga dan Sandi dan Telekomunikasi;
      b) Subbagian Tata Usaha, Arsip dan Perpustakaan;
      c) Subbagian Perlengkapan.

e. Kelompok jabatan fungsional

2. Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi :

a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
b. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
c. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
d. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Organisasi Sekretariat DPRD terdiri 1 orang Sekretaris, 3 Bagian, 9 Sub Bagian dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang masing – masing terdiri :

a. Sekretaris DPRD.
b. Bagian Persidangan terdiri dari 3 Sub Bagian;
c. Bagian Keuangan terdiri dari 3 Sub Bagian;
d. Bagian Umum terdiri dari 3 Sub Bagian;
e. Kelompok jabatan Fungsional

3. Dinas Daerah.

Dinas Daerah yang terdiri 12 dinas memiliki tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidangnya dan memiliki fungsi :

1. Dinas Pendidikan terdiri 1 orang Sekretaris, 4 Bidang, 3 Sub Bagian, 10 seksi, UPTD dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas di bidangnya dan memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
   a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
   b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan ; dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang pendidikan.

2. Dinas Kesehatan terdiri 1 orang Sekretaris, 4 Bidang, 3 Sub Bagian, 12 Seksi, UPTD dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas di bidangnya dan memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
   a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
   b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan ; dan
   c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang kesehatan.
3. Dinas Pekerjaan Umum terdiri 1 orang sekretaris, 5 Bidang, 3 Sub Bagian, 10 Seksi, UPTD dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas di bidangnya memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang;
   a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang;
   b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang; dan
   c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri 1 orang Sekretaris, 4 Bidang, 3 Sub Bagian, 10 Seksi, UPTD dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas di bidangnya memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
   b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri 1 orang Sekretaris, 3 Bidang, 3 Sub Bagian, 6 Seksi, UPTD dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas di bidangnya memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
   b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri 1 orang Sekretaris, 4 Bidang, 3 Sub Bagian, 8 Seksi, UPTD dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas di bidangnya memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
   b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi.
7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri 1 orang Sekretaris, 3 Bidang, 3 Sub Bagian, 6 Seksi, UPTD dan

dibantu kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas dibidangnya memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga ; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.

8. Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri 1 orang Sekretaris, 4 Bidang, 3 Sub Bagian, 12 Seksi, UPTD dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas di bidangnya memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan Kehutanan;

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan kehutanan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan kehutanan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan kehutanan; dan

   pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang pertanian dan kehutanan.

9. Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri 1 orang Sekretaris, 4 Bidang, 3 Sub Bagian, 8 Seksi, UPTD dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas di bidangnya memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang kelautan dan perikanan.

10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri 1 orang Sekretaris, 4 Bidang, 3 Sub Bagian, 8 Seksi, UPTD dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas di bidangnya memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
    a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah danpelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri 1 orang Sekretaris, 3 Bidang, 3 Sub Bagian, 6 Seksi, UPTD dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas di bidangnya memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
    a. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang energi dan sumber daya mineral;
    d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang energi dan sumber daya mineral.

12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri 1 orang Sekretaris, 4 Bidang, 3 Sub Bagian, 12 Seksi, UPTD dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas di bidangnya memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah ; dan
    d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 14 memiliki tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidangnya dan memiliki fungsi :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri 1 orang Sekretaris, 4 Bidang, 3 Sub Bagian, 8 Sub Bidang, UPTB, dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

    a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan;
    b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
    c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan statistik, penelitian dan pengembangan;
    d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan statistik, penelitian dan pengembangan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang perencanaan pembangunan statistik, penelitian dan pengembangan.

2. Inspektorat terdiri 1 orang Sekretaris, 4 Inspektur, 3 Sub Bagian, 12 Seksi dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a. perencanaan program pengawasan;
   b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;
   c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
   d. evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;
   e. pelaksanaan kesekretariatan inspektorat;
   f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Badan Kepegawaian Daerah terdiri 1 orang Sekretaris, 3 Bidang, 3 Sub Bagian, 6 Seksi, UPTB, dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
   b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri 1 orang Sekretaris, 4 Bidang, 3 Sub Bagian, 8 Sub Bidang, UPTB, dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri 1 orang sekretaris, 3 Bidang, 3 Sub Bagian, 6 Sub Bidang, UPTB, dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
   b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

6. Badan Lingkungan Hidup, terdiri 1 orang Sekretaris, 3 Bidang, 3 Sub Bagian, 6 Sub Bidang, UPTB, dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang lingkungan hidup.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Untuk unsur pelaksana terdiri dari 1 orang Sekretaris unsur Pelaksana, 3 Bidang, 3 Sub Bagian, 6 Sub Bidang, dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan;
   b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat terdiri 1 orang Sub Bagian Tata Usaha, 3 Seksi, dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
   b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

9. Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri 1 orang Sub. Bagian Tata Usaha, 3 Seksi, dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
   b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang perpustakaan dan kearsipan.
10. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno terdiri 1 orang Sekretaris, 3 Bidang, 3 Sub Bagian, 6 Seksi dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
   b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang pelayanan kesehatan.
11. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri 1 orang Sub. Bagian Tata Usaha, 3 Seksi, Tim Teknis dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan program kantor;
   b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan dan penanaman modal;
   c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan penanaman modal;
   d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan penanaman modal;

e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal.

12. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri 1 orang Sub. Bagian Tata Usaha, 3 Seksi, dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
    b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
    c. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
    d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil dan atau aparatur lainnya;
    e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan bupati.
13. Kecamatan terdiri 1 orang Camat, 2 Sub Bagian, 4 Seksi dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
    c. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
    d. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

e. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
f. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

14. Kelurahan terdiri 1 orang Sekretaris Kelurahan, 3 Seksi dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan kemasyarakatan, pelayanan, ketentraman dan ketertiban.
    b. Pembinaan ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

BAB II

RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010. Penyusunan RPJM memerlukan landasan pembangunan yang memiliki cakupan luas sehingga dapat ditetapkan sebagai dasar bagi daerah untuk menentukan visi, misi dan arah pembangunan di Kabupaten Rembang untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun.

Penetapan RPJM merupakan acuan dalam penyusunan rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut :

I. Visi

Visi merupakan suatu kondisi ideal atau keadaan masa depan yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam bentuk cita-cita. Pemerintah Kabupaten Rembang pada RPJM Tahun 2010 – 2015 menetapkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”

Penjelasan unsur-unsur visi diatas adalah sebagai berikut:

1. **Rembang yang Maju,** Kabupaten Rembang memiliki sarana prasarana yang memadai dengan tingkat pelayanan publik yang memuaskan, didukung oleh sistem pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan demokratis, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi.

2. **Rembang yang Mandiri,** adalah Kabupaten Rembang memiliki proporsi PAD yang semakin besar dalam pendapatan daerah dan surplus bahan pangan khususnya palawija dan produk peternakan dengan tetap mempertahankan swasembada padi dan jagung serta produk perikanan yang telah dicapai. Dari sektor industri ditunjukkan oleh pemakaian bahan baku lokal yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan baku impor dalam proses produksinya.
3. **Rembang yang Dinamis,** adalah Kabupaten Rembang mampu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.
4. **Rembang yang Sejahtera,** adalah kondisi Kabupaten Rembang dengan masyarakat yang bahagia baik lahir maupun batin. Kebahagian lahir ditunjukkan oleh tingginya derajat kesehatan, tingginya tingkat pendapatan per kapita, kecukupan sandang, pangan dan papan (perumahan). Sedangkan kebahagiaan batin yang dimaksudkan adalah tingginya religiusitas atau penghayatan terhadap agama dan kerpecayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ketenteraman dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.

Visi Kabupaten Rembang dituangkan dalam bentuk misi yang selanjutnya menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Rembang untuk melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

II. Misi

Dalam rangka mencapai visi seperti tersebut diatas, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Memacu pertumbuhan investasi dalam rangka menghidupkan dan meningkatkan perkembangan sektor riil dan peningkatan kesempatan kerja.

2. Meningkatkan akses UMKM terhadap sumber permodalan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas.
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sumber-sumber pendapatan non konvensional dan tidak membebani masyarakat.
5. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi pendidikan sejak dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang menengah dan pendidikan tinggi yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan, baik pada tingkatan pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan aparatur yang profesional, berbudi pekerti luhur dan agamis.
8. Meningkatan mutu dan pemerataan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya Rembang Sea-Front City.
9. Mengimplementasikan pembangunan yang selalu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global.

III. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan misi-misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Rembang.
2. Meningkatkan penyaluran modal bagi pelaku UMKM
3. Meningkatkan Iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikulura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka pengembangan wilayah pesisir.
5. Mengoptimalkan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

6. Mengoptimalkan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, perbaikan sarana dan prasarana, penyediaan sarana penunjang pembelajaran, penyediaan beasiswa dan kerjasama dengan pengguna pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.
7. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dan lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan.
8. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang kompeten, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrasturktur pedesaan dan wilayah cepat tumbuh
10. Mengembangkan tata kelola wilayah pesisir yang mampu menjadi pemicu pergerakan ekonomi daerah
11. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan serta proaktif dalam mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi yang memadai

IV. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun. Sasaran pembangunan di Kabupaten Rembang dapat dirumuskan berdasarkan tujuan-tujuan yang ada sebagai berikut :

Tujuan-1: Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Rembang. Sasarannya adalah :

1. Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi.
2. Promosi peluang investasi.
3. Terjaminnya keamanan berusaha.
4. Tersedianya infrastruktur yang memadai.
5. Tersedianya dukungan SDM yang memadai.

Tujuan-2: Meningkatkan penyaluran modal bagi pelaku UMKM. Sasarannya adalah :

1. Penyediaan informasi ketersediaan dana pada perbankan dan pelayanan non bank serta persyaratan pengajuan pinjaman.
2. Penyebaran sarana pelayanan bank dan lembaga keuangan non bank ke pelosok daerah.
3. Ketersediaan skim kredit sesuai dengan perilaku jenis usaha.
4. Adanya kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik.
5. Dimilikinya legalitas aset pelaku usaha sebagai jaminan kredit.

Tujuan-3: Meningkatkan Iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM. Sasarannya adalah :

1. Jaminan kemanan oleh Pemda.
2. Ketersediaan infrastruktur yang memadai.
3. Penyebaran sarana perbankan.

Tujuan-4: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikulura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sasarannya adalah:

1. Mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
2. Meningkatnya kemapuan petenai dalam pengelolaan usaha.
3. Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian.

Tujuan-5: Mengoptimalkan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
2. Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah.
3. Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membani masyarakat

Tujuan-6: Mengoptimalkan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, perbaikan sarana dan prasarana,

penyediaan sarana penunjang pembelajaran, penyediaan beasiswa dan kerjasama dengan pengguna pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal. Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.
2. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi.
3. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan.
4. Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan.
5. Tersedianya beasiswa bagi penduduk miskin.
6. Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan.

Tujuan-7: Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dan lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan. Sasarannya adalah :

1. Tersedianya tenaga medis yang memadai.
2. Tersedianya obat-obatan yang memadai.
3. Tersedianya peralatan medis yang memadai.
4. Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.
5. Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan.
6. Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Tujuan-8: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang kompeten, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.
2. Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama.
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai.
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ ketrampilan bagi masyarakat.

Tujuan-9: Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrasturktur pedesaan dan wilayah cepat tumbuh. Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan.
2. Meningkatnya kualitas saluran irigasi.
3. Meningkatnya kualitas saluran drainase.
4. Terbangunnya jalan poros desa dan kecamatan.

Tujuan-10: Mengembangkan tata kelola wilayah pesisir yang mampu menjadi pemicu pergerakan ekonomi daerah. Sasarannya adalah :

1. Terbangunya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya *sea front city.*
2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.
3. Terbangunya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan.
4. Terwujudnya kawasan wisata bahari.

Tujuan-11: Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan dan proaktif dalam mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi yang memadai. Sasarannya adalah :

1. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance*.
2. Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien.
3. Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.
4. Responsif terhadap perkembangan situasi.
5. Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.
6. Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis.

B. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012

Program dan kegiatan pembangunan tahun 2012 diarahkan guna pencapaian visi Kabupaten Rembang dalam RPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015, dimana pada tahun 2012 telah memasuki Tahapan II dengan fokus pada **Akselerasi Pertumbuhan Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Akses Modal UMKM, Pertumbuhan investasi dan PAD.**

Berdasarkan hal tersebut serta dengan analisis isu-isu strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, maka ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Rembang yang terangkum di dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.
2. Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama.
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai.
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat.
5. Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan.
6. Meningkatnya kualitas saluran irigasi.
7. Meningkatnya kualitas saluran drainase.
8. Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya sea front city.
9. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.
10. Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan.
11. Terwujudnya kawasan wisata bahari
12. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta good and clean governance.

13. Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien.
14. Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.
15. Responsif terhadap perkembangan situasi.
16. Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.
17. Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis

Adapun Sasaran untuk tiap–tiap Urusan, baik wajib maupun pilihan adalah sebagai berikut :

A. Urusan Wajib

1. Pendidikan

a. Peningkatan akses pelayanan pemerataan pendidikan dasar melalui sekolah gratis yang bermutu pada jenjang Pendidikan Dasar (9 tahun).
b. Penyelenggaraan pendidikan gratis yang bermutu pada jenjang pendidikan dasar (9 tahun) melalui peningkatan daya tampung siswa di SD, MI, SMP, dan MTs.
c. Peningkatan akses pelayanan pemerataan pendidikan menengah melalui peningkatan akses dan layanan pendidikan menengah.
d. Peningkatan pemerataan, mutu, relevansi, daya saing dan transparansi pendidikan pada semua jejang pendidikan formal dan pendidikan non formal melalui :
   1) Peningkatan mutu pendidikan di SD, SLTP, dan SLTA
   2) Peningkatan akses pendidikan anak usia dini baik formal maupun non formal
   3) Peningkatan akses dan mutu lembaga pendidikan masyarakat
   4) Pemberantasan Buta Aksara penduduk usia di atas 15 tahun

e. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
f. Meningkatnya pembinaan manajemen organisasi sekolah, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui program pembinaan manajemen organisasi sekolah berbasis sekolah.

2. Kesehatan

a. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rembang melalui Jaminan Kesehatan Rembang Sehat.
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
c. Peningkatan perilaku hidup sehat melalui :
   1) Peningkatan kampanye kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui Pusat Pencegahan Penyakit dan Promosi Kesehatan.
   2) Pengembangan lingkungan sehat.
   3) Perbaikan gizi kesehatan masyarakat.
   4) Pembinaan dan pengembangan SBH (Saka Bakti Husada) dalam peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
d. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui
   1) Pencegahan dan pemberantasan penyakit
   2) Peningkatan pelayanan kesehatan perorangan.
   3) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
   4) Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan.
   5) Pengawasan keamanan, makanan dan Bahan Berbahaya.
   6) Penanggulangan HIV ADIS

3. Pekerjaan Umum

a. Peningkatkan dan memelihara kapasitas jaringan irigasi melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa-rawa dan jaringan pengairan lainnya.
b. Peningkatkan kualitas lingkungan pemukiman/kota melalui pengembangan saluran drainase, pengelolaan air limbah dan sampah.
c. Peningkatkan fungsi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya melalui pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya.
d. Peningkatkan penyediaan air baku bagi masyarakat melalui penyediaan dan pengelolaan air baku.
e. Peningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap banjir melaui pembangunan bangunan pengendali banjir.
f. Peningkatkan kualitas lingkungan pedesaan melalui program pembangunan infrastruktur pedesaan.
g. Peningkatkan kualitas dan kuantitas kebina margaan melalui :
   1) Pembangunan jalan dan jembatan.
   2) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
   3) Tanggap darurat jalan dan jembatan.
   4) Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan.
   5) Inspeksi kondisi jalan dan jembatan.
   6) Pembangunan system informasi/database jalan dan jembatan.
   7) Rehabilitasi dan pemeliharaan talud/bronjong.

4. Lingkungan Hidup

a. Pencegahan kerusakan sumber daya alam melalui :
   1) Kampanye publik pelestarian LH.
   2) Perijinan pemanfaatan SDA.
   3) Penanganan limbah
b. Perwujudan gerakan menghijaukan bumi melalui konservasi SDA untuk pencegahan dan pemulihan lingkungan melalui :

1) Perlindungan dan Konservasi SDA.
2) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA.
3) Pemantaun kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut.
4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi.

c. Pengembalian ekosistem dan habitat untuk pembangunan berkelanjutan melalui :
   1) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
   2) Koordinasi penilaian kota sehat adipura.
   3) Koordinasi pengelolaan Prokasih / Superkasih.
   4) Koordinasi penertiban kegiatan penambangan.
   5) Reklamasi bekas area pertambangan.

d. Peningkatan penyediaan pengelolaan ruang terbuka hijau melalui :
   1) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   2) Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau
   3) Pembangunan Hutan Kota

5. Penataan Ruang

a. Perencanaan tata ruang melalui pengembangan pengaturan tata ruang.
b. Pemanfaatan ruang melalui Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
c. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui monitoring evaluasi, perijinan, sanksi dalam pemanfaatan tata ruang agar tidak terjadi penyimpangan.

6. Perencanaan Pembangunan

a. Membangun basis data perencanaan yang lengkap, faktual, dan terintegrasi melaui pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan.
b. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan.
c. Menyusun rencana pembangunan daerah dan kawasan secara serasi dan terpadu melaui :
   1) Perencanaan pembangunan ekonomi
   2) Perencanaan pembangunan sosial budaya

3) Kerjasama pembangunan
4) Pengembangan wilayah perbatasan
5) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
6) Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

d. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM perencana dan kualitas sarana/prasarana perencanaan melaui peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

e. Melaksanakan evaluasi kinerja secara transparan, kemprehensif, analitis dan berkesinambungan melaui Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan

7. Perumahan

a. Peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah secara swadaya melalui :
   1) Peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah secara swadaya.

b. Peningkatan peran swasta (pengembang) dalam penyediaan rumah formal terutama rumah tipe kecil menengah melalui:
   1) Fasilitasi peningkatan peran pengembang dalam penyediaan rumah-rumah formal tipe kecil menengah.
   2) Pengembangan perumahan

c. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pemugaran, pemeliharaan, perbaikan rumah melalui :
   1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan rumah.
   2) Hibah pemugaran perumahan tidak layak huni.

d. Peningkatan kualitas perumahan permukiman melalui :
   1) Perbaikan kualitas lingkungan perumahan dengan derajad kekumuhan yang tinggi.
   2) Penanganan perumahan perdesaan.
   3) Penyediaan dan Peningkatan fasum dan fasos

8. Kepemudaan dan olah raga

a. Peningkatan kapasitas dan kualitas generasi muda melalui :
   1) Peningkatan peran serta pemuda dalam berbagai kegiatan pembangunan.
   2) Peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
b. Peningkatan keserasian kebijakan di bidang kepemudaan melalui pengembangan dan peningkatan keserasian kebijakan pemuda.
c. Peningkatan dan pengembangan kemampuan dan ketrampilan generasi muda dalam kegiatan ekonomi produktif melalui peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup
d. Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di kalangan masyarakat melalui pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
e. Peningkatan dan pengembangan kualitas manajemen bidang keolahragaan melalui pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga.
f. Peningkatan dan mengembangkan sarana dan prasarana olah raga melalui peningkatan sarana dan prasarana olah raga.

9. Penanaman Modal

a. Pengembangan investasi yang memberikan jaminan kepastian usaha melalui:
   1) Peningkatan Sistem informasi Investasi Daerah.
   2) Penciptaan iklim usaha yang kondusif.
   3) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
b. Peningkatan kinerja BUMD sebagai pendukung peningkatan PAD melalui reorientasi peran dan fungsi BUMD.

10. Koperasi dan UKM

a. Peningkatan kemampuan manajerial usaha koperasi dan UMKM melalui :
   1) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

2) Pengembangan klaster UMKM

b. Peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM yang mampu menciptakan lapangan kerja baru melalui :

1) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan UMKM.

2) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM.

11. Kependudukan dan catatan sipil

a. Peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil

b. Penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan

c. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

12. Ketenagakerjaan

a. Mendorong terwujudnya produktivitas tenaga kerja yang memasuki pasar kerja yang kompetitif melalui peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja.

b. Mendorong terwujudnya sistem informasi bursa tenaga kerja yang mudah diakses pada pencari kerja maupun pemberi kerja melalui peningkatan kesempatan kerja.

13. Ketahanan Pangan

a. Peningkatan ketersediaan pangan di tingkat wilayah kabupaten, kecamatan, desa dan tingkat rumah tangga yang cukup, terjangkau, aman melalui :

1) Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan

2) Pengelolaan cadangan pangan.

3) Perbaikan distrubusi pangan.

4) Pengembangan sistem kelembagaan pangan

b. Peningkatan keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat melalui diversifikasi produk pangan.
c. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan melalui peningkatan akses pangan masyarakat

14. Pemberdayaan Perempuan

a. Mewujudkan kesadaran, dan kesetaraan, gender pada penentu kebijakan dan seluruh masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan melalui Pengembangan pengarusutamaan gender.
b. Mendorong tercapainya kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak dengan lebih baik melalui Peningkatan dan perlindungan kualitas hidup perempuan.
c. Mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pengintegrasian kegiatan yang mampu mendorong semua pihak berpartisipasi dalam perlindungan anak melalui Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
d. Menguatkan lembaga-lembaga dalam masyarakat dan dunia usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perempuan melalui :
   1) Pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha.
   2) Penguatan keberdayaan ekonomi rumah tangga.
e. Mendorong terbukanya akses informasi gender dan anak sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan yang responsif gender melalui Pengembangan sistem informasi gender dan anak.
f. Mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan melalui Perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui :

1) Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
2) Penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.
3) Pelayanan KB, KR.
4) Advokasi dan KIE KBKR

b. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja melalui :
1) Peningkatan kesehatan reproduksi remaja.
2) Peningkatan KRR lintas sektor terkait

c. Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan masyarakat melalui :
1) Peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
2) Peningkatan keluarga Berkualitas.
3) Peningkatan kualitas lingkungan keluarga terpadu

d. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas melalui :
1) Penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.
2) Penyusunan SIDUGA.
3) Penyusunan data pilah.

e. Meningkatnya pelayanan KB dan KR melalui :
1) Peningkatan pelayanan KB&KR.
2) Peningkatan KRR sesuai sasaran

16. Perhubungan

Peningkatan pelayanan perhubungan melalui :

a. Pembangunan sarana prasarana perhubungan darat dan laut.
b. Peningkatan pelayanan angkutan darat.
c. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
d. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

e. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
f. Peningkatan ketertiban, keamanan dan keselamatan lalau lintas.
g. Peningkatan keamanan dan keselamatan laut

17. Komunikasi dan informasi

a. Mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa melalui Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa.
b. Peningkatan kerjasama bidang informasi dan komunikasi melalui kerjasama informasi dengan media massa.
c. Peningkatan kualitas bidang informasi dan komunikasi melalui :
   1) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
   2) Peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan.

18. Pertanahan

a. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan pertanahan
b. Peningkatan cakupan serta kualitas tertib administrasi pertanahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam rangka mengendalikan pemanfaatan .

19. Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui :
   1) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
   2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.
   3) Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
   4) Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).
   5) Peningkatan stabilitas daerah yang kondusif.
b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang Kesatuan Bangsa melalui :

1) Pengembangan wawasan kebangsaan.
2) Peningkatan persatuan dan kesatuan, jiwa dan semangat kebangsaan.

c. Peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui Peningkatan partisipasi politik masyarakat.

d. Peningkatan pengamanan dan perlindungan masyarakat pada saat pra, tanggap darurat dan pasca bencana melalui :
1) Peningkatan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat pada saat pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
2) Peningkatan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat pada saat pra, tanggap darurat dan pasca bencana.

20. Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. **Otonomi Daerah**
1) Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan pelaksanaan otonomi daerah.
2) Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.

b. **Pemerintahan Umum**
1) Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/Wakil Kepala Daerah.
2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan kebijakan KDH melalui peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
3) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, transparan dan akuntabel melalui Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum.

4) Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam mentaati dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku melalui penataan peraturan perundang-undangan.
5) Peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :
   a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan TRANTIBUM.
   b) Pengamanan dan perlindungan masyarakat.
   c) Penegakan hukum
6) Peningkatan kerjasama pembangunan melalui :
   a) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah.
   b) Pengembangan daerah-daerah perbatasan.
   c) Pengembangan wilayah.

c. **Keuangan Daerah**

1) Peningkatan intensifikasi sumber pendapatan asli daerah melalui intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
2) Pengembangan sumber pendapatan asli daerah baru melalui ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
3) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah.
4) Peningkatan pendayagunaan aset daerah secara prooduktif melalui pendayagunaan aset daerah secara produktif.

d. **Aparatur Daerah**

1) Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan.
2) Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah melalui :
   a) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan
   b) Peningkatan kualitas SDM aparatur

e. **Kepegawaian**

1) Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah melalui :
   a) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
   b) Pendidikan Kedinasan
2) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Daerah.

f. **Persandian**

Pengembangan dan peningkatan pengadaan sistem sandi dan penyelenggaraan protap sistem sandi melalui pengembangan dan pengadaan Sistem Sandi (Sissan) serta penyelenggaraan Protap Sissan.

g. **Pengawasan**

Menciptakan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan melalui :

1) Peningkatan pengawasan.
2) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

21. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

a. Peningkatan fungsi dan memperkuat lembaga pemerintah dan kemasyarakatan desa melalui peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.
b. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan peningkatan kemampuan produksi masyarakat melalui pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.
c. Pengembangan sarana dan prasarana desa melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
d. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi desa melalui pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
e. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di Pedesaan melalui program peningkatan fungsi pemerintahan desa.

22. Sosial

a. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan sosial kepada masyarakat miskin dan PMKS lainnya melalui pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
b. Penguatan fungsi dan kinerja kelembagaan keluarga dan UEP KUBE fakir miskin melalui pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial.
c. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan anak melalui pembinaan anak terlantar.
d. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang cacat dan eks trauma melalui pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma.
e. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS melalui pembinaan panti sosial/panti asuhan/panti jompo.
f. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat dan eks trauma melalui Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, penyalahguna dan korban narkoba dan penyakit sosial lainnya).
g. Menguatkan fungsi dan kinerja kelembagaan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial eks penyadang penyakit sosial.
h. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

23. Kebudayaan

a. Pembinaan dan pelestarian nilai-nilai seni dan budaya daerah melalui pengembangan nilai budaya.

b. Peningkatan dan pengembangan potensi seni dan budaya daerah melalui pengelolaan kekayaan budaya.
c. Peningkatan dan pengembangan keragaman seni dan budaya daerah melalui pengelolaan keragaman budaya.
d. Peningkatan dan pengembangan serta pelestarian tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman melalui pengembangan dan pembinaan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman.

24. Statistik

a. Peningkatan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik daerah melalui peningkatan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dalam mengembangkan statistik daerah.
b. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi/data statistik daerah melalui peningkatan dan pengembangan sistem informasi/data statistik daerah.
c. Meningkatkan pelayanan kebutuhan data statistik yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan melalui peningkatan pelayanan kebutuhan data statistik yang mudah dan cepat diakses.

25. Kearsipan

a. Peningkatan tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang melalui :
   1) Peningkatan pengelolaan korespondensi untuk menunjang kinerja Instansi.
   2) Pengembangan dan Pengawasan Sistem Kearsipan Pemerintah Daerah
b. Penyelamatan Arsip Bernilai Guna sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan bukti kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan melalui :

1) Penyelamatan arsip bernilai guna tinggi yang ada di instansi pemerintah.
2) Pembangunan Pusat Arsip yang representatif

c. Peningkatan SDM Pengelola Arsip melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola arsip.

26. Perpustakaan

a. Perluasan cakupan dan pemerataan layanan perpustakaan melalui peningkatan cakupan dan pemerataan pelayanan perpustakaan.
b. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perpustakaan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perpustakaan.
c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan perpustakaan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan perpustakaan.
d. Peningkatan dan pengembangan promosi perpustakaan dan minat baca masyarakat melalui peningkatan dan pengembangan promosi perpustakaan dan minat baca masyarakat.
e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang bidang perpustakaan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang bidang perpustakaan.
f. Peningkatan kualitas dan optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan melalui peningkatan kualitas dan optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan.

B. Urusan Pilihan

27. Kelautan dan Perikanan

a. Pengembangan kawasan pertumbuhan perikanan dan kelautan melalui:
   1) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan

2) Pengembangan kawasan sentra perikanan.

b. Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan dan kelautan melalui :
   1) Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
   2) Peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan.

c. Pengembangan sentra-sentra produksi perikanan dan kelautan yang berdaya saing dan berorientasi pasar melalui :
   1) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
   2) Pengembangan Perikanan Tangkap

d. Pengembangan profesionalisme sumberdaya manusia, kelembagaan perikanan dan kelautan melalui :
   1) Peningkatan SDM, kelembagaan petani, nelayan dan pengembangan perikanan
   2) Peningkatan pelayanan perijinan usaha Perikanan dan Kelautan
   3) Pengembangan informasi dan statistik perikanan dan kelautan

e. Pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan melalui :
   1) Pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan
   2) Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

28. Pertanian dan Peternakan

a. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pertanian, baik pada tingkat budidaya maupun pasca panen melalui :
   1) Pengembangan Sarana dan prasarana pertanian
   2) Pengembangan komoditas pertanian

b. Pengembangan kawasan agribisnis pertanian melalui Pengembangan sentra Agribisnis

c. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian melalui :
   1) Peningkatan produksi pertanian
   2) Peningkatan penerapan teknologi pertanian

3) Peningkatan penerapan teknologi peternakan
4) Pencegahan dan penanggulangan Hama dan penyakit (tanaman dan ternak)
5) Peningkatan produksi peternakan

d. Peningkatan kualitas SDM pertanian melalui :
1) Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan petani.
2) Penguatan kelembagaan pertanian

e. Peningkatan mekanisme distribusi dan jejaring pemasaran komoditas pertanian melalui :
1) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
2) Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

29. Kehutanan

a. Revitalisasi sumberdaya kehutanan melalui Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan
b. Pengembangan hutan rakyat melalui :
1) Pemanfaatan kawasan hutan produksi
2) Pembinaan dan penertiban industri primer hasil hutan

c. Peningkatan produksi hasil hutan baik berupa kayu maupun non kayu melalui Rehabilitasi hutan dan lahan
d. Menjaga kelestarian sumberdaya hutan dengan melibatkan potensi masyarakat di sekitar hutan melalui :
1) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
2) Pemberdayaan Kelembagaan Kehutanan

30. Energi Sumberdaya Mineral

a. Optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral melalui pembinaan , pendayagunaan, pengawasan usaha pertambangan dan ABT melalui :
1) Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya mineral
2) Peningkatan pelayanan usaha bidang pertambangan dan ABT

3) peningkatan penyediaan sarana prasarana bidang pertambangan dan ABT
4) peningkatan pengawasan dan pengendalian usaha bidang pertambangan dan ABT

b. Pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri melalui peningkatan pembinaan, pengembangan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan.
c. Peningkatan investasi pertambangan melalui kerjasama dengan daerah lain melalui perintisan dan pengembangan kerjasama investasi pertambangan dengan daerah sekitar.

31. Pariwisata

a. Peningkatan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata daerah melalui :
   1) Pengembangan Destinasi Pariwisata.
   2) Pengembangan event dan paket wisata.
   3) Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
   4) Pengingkatan sarana dan prasarana wisata
b. Peningkatan dan pengembangan SDM dan peran serta masyarakat. serta dunia usaha pariwisata melalui :
   1) Pengembangan Kemitraan.
   2) Gerakan sadar wisata

32. Perindustrian

a. Peningkatan penggunaan bahan baku lokal dalam proses produksi melalui pengembangan industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berbasis pada sumberdaya lokal.
b. Peningkatan sinergi program pengembangan dan perkuatan struktur industri melalui pengembangan SDM, kelembagaan dan teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing industri melalui :
   1) Penataan struktur industri
   2) Pengembangan Sentra-sentra/klaster industri potensial.

c. Peningkatan daya saing IKM melalui peningkatan kualitas dan keragaman produk, efisiensi proses produksi dan akses pasar produk IKM melalui :
   1) Peningkatan kemampuan teknologi industri.
   2) Pelatihan dan bantuan peralatan industri

33. Perdagangan

a. Pengembangan perdagangan dan pertumbuhan ekspor non migas serta peningkatan efisiensi/efektifitas sistem distribusi dan tertib perdagangan melalui :
   1) Peningkatan kemetrologian dan perlindungan konsumen.
   2) Pengembangan sistem distribusi dan perdagangan.
   3) Peningkatan dan pengembangan ekspor.
   4) peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
b. Penataan lembaga pendukung UMKM terkait distribusi melalui perluasan dan penguatan lembaga pendukung usaha perdagangan kecil dan menengah.
c. Peningkatan kesadaran hukum, tertib niaga, kepastian berusaha, perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar melalui :
   1) Penguatan institusi pendukung pasar.
   2) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

34. Transmigrasi

Peningkatan program transmigrasi bagi upaya penciptaan lapangan kerja dan pengentasan pengangguran melalui Transmigrasi regional.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Penetapan Kinerja pada hakekatnya adalah komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Tujuan penetapan kinerja

adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan di Kabupaten Rembang.

Penetapan Kinerja juga sebagai wahana yang bisa dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, menilai keberhasilan organisasi dan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan Penetapan kinerja diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi menjadi lebih baik, sehingga kegiatan menjadi terarah.

Adapun Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2012

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	**Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi.**	Tingkat Penyelesaian perijinan terhadap waktu yang ditentukan	100%
		Jumlah pengaduan masyarakat terhadap penerbitan perijinan dan non perijinan	12 kasus
2	**Promosi peluang investasi.**	Jumlah promosi investasi .	3 kali
		Jumlah kepeminatan	3 investor
		Nilai Realisasi Investasi	299.909.737.518
3	**Terjaminnya keamanan berusaha.**	Jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di sektor perdagangan	200 buah
		Jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di sektor perindustrian	54 buah
		Jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di luar sektor perdagangan dan perindustrian	179 buah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
4	**Tersedianya infrastruktur yang memadai.**	Jumlah industri skala besar	6 buah
		Jumlah klaster industry	8 buah
		Rekomendasi BKPRD terhadap perizinan pemanfaatan ruang	5
5	**Tersedianya dukungan SDM yang memadai.**	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70
		Pencari kerja yang ditempatkan (5%th)	5%
		Jumlah Pengangguran terbuka (menurun 3%/tahun)	-3%
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,5
		Penempatan tenaga kerja (orang)	
		a. AKL	265
		b. AKAD	282
		c. AKAN	146
6	**Penyebaran sarana pelayanan bank dan lembaga keuangan non bank ke pelosok daerah.**	Jumlah BUMDes yang terbentuk	5 BUMDes
		Jumlah lembaga perbankan	27
7	**Ketersediaan skim kredit sesuai dengan perilaku jenis usaha.**	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah	11 kelompok
		Jumlah kelompok UEP yang yang dikelola oleh perempuan	2 klp
		Jumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilatih pengelolaan administrasi kelompok	13 kelompok
8	**Adanya kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik.**	Jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mengikuti pembinaan atau pelatihan usaha	95 UMKM
		Jumlah koperasi	529 buah
		Prosentase pertumbuhan jumlah koperasi	0.94%
		Prosentase pertumbuhan jumlah anggota koperasi	18.7 %
		Prosentase jumlah koperasi aktif dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi	76 %
		Prosentase jumlah koperasi sehat dibandingkan dengan jumlah	78 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		seluruh koperasi	
		Jumlah usaha mikro kecil dan menengah	20.843 UMKM
		Prosentase peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah	9.76%
		Prosentase usaha mikro kecil dan menengah dibandingkan seluruh unit usaha	32.56%
		Prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor usaha mikro kecil dan menengah dibanding jumlah penduduk	7,40%
		Jumlah omzet usaha mikro kecil dan menengah	Rp 11.831.650.000.000
		Jumlah ekspor Kabupaten Rembang	16.163.000 USD
9	**Dimilikinya legalitas asset pelaku usaha sebagai jaminan kredit.**	Pembinaan dan penguatan manajemen	43 UMKM
10	**Jaminan keamanan oleh Pemda.**	Jumlah Perda yang disusun	10
		Jumlah Perbub yang disusun	60
		Jumlah Keputusan Bupati yang disusun	600
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja dibanding jumlah penduduk	1 per 10.000 pddk
		Jumlah Anggota Linmas terlatih	75 org
		Tingkat penyelesaian pelanggaran trantibum di Kab. Rembang	100%
11	**Mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.**	% peningkatan ketersediaan alsintan dan pemanfaatannya untuk kegiatan budidaya, panen, dan pengolahan hasil pertanian/ perkebunan	5
		Produksi tanaman pangan (Ton) :	
		a. Padi	243,063
		b. Jagung	161,939
		Produksi hortikultura (Ton)	
		a. Cabe	57.733
		b. Mangga	6.594

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	
		a. Tebu (cane)	32.745
		b. Kelapa (Kopra)	4.319
		Produksi Peternakan (Kg)	
		a. Daging Sapi	901,667
		b. Daging Kambing	105,296
		c. Daging Ayam	733.400
		d. Telur Ayam	564.992
		e. Telur Itik	671,925
		Produksi hasil tangkapan ikan (Ton)	50.264.17
12	**Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha.**	Peningkatan Pelaku Usaha sektor tanaman pangan dan hortikultura	5 %
		Peningkatan pelaku usaha sektor perkebunan	5 %
		Peningkatan pelaku usaha sektor peternakan	5 %
		Peningkatan kelompok usaha sektor kehutanan	5 %
13	**Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha**	Peningkatan Stimulan untuk kelompok tani pangan dan hortikultura	5 %
		Peningkatan Stimulan untuk kelompok tani perkebuanan	5 %
		Peningkatan Stimulan untuk kelompok peternakan	5 %
		Peningkatan Stimulan untuk kelompok tani kehutanan	5 %
14	**Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian.**	Bertambahnya luas lahan pertanian dan perkebunan yang teraliri jaringan irigasi (ha)	800
		Pembangunan embung	15
15	**Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.**	Jumlah PAD	Rp 89.947.696.000
16	**Meningkatnya efisiensi dalam**	Berkurangnya piutang pajak/retibusi	40%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	penarikan pendapatan asli daerah.		
17	**Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat**	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 3.071.211.000
18	**Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.**	Angka Kelulusan SD/MI	99,15 %
		Angka kelulusan Ujian nasional SMP/MTs	93,77%
		Kelulusan UN SMA/MA/SMK	88,75%
		TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah	54%
		TK/RA/SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	99,78%
		SMP/MTs/SMA/SMK/MA melaksanakan Program MBS dengan Baik.	100%
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000.	38,5%
19	**Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi.**	Guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	37,54%
		Guru SD yang sertifikasi	51,54%
		Guru SD/MI layak mengajar	52,18%
		Guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	86,49%
		Guru SMP/MTs yang sertifikasi	61,38%
		Guru SMA/SMK/MA yang sertifikasi	46,46%
		Guru SMA/SMK/MA layak mengajar	93,33%
		Meningkatnya tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yag dipersyaratkan	81,25%
20	**Terwujudnya penyediaan sarana**	TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	36%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan.	Ruang kelas SD/MI sesuai standar	69,84%
		SD/MI memilki perpustakaan sesuai standar	42,13%
		SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan Komputer	10,51%
		SMP/MTs memilki perpustakaan sesuai standar	81,93%
		SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan Komputer	60,84%
		Lembaga kursus/pelatihan /kelompok belajar usaha/ magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan	61,08%
21	**Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan.**	Meningkatnya jumlah lembaga PAUD dan TK	460
		APK PAUD	84.50%
		APK SD/MI	101,92%
		APK SMP/MTs	71.34%
		APK SMA/SMK/MA	60,40%
		APM SMP/MTs	71,34%
		APM SMA/SMK/MA	45,11%
		penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C	95,65%
		Angka melek huruf	99,70%
		Angka Melanjutkan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan	78%
22	**Tersedianya beasiswa bagi penduduk miskin.**	Angka Putus sekolah SD	0,04%
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,22%
		Angka putus sekolah SMA/MA/SMK	0,31%
		Penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan /kelompok belajarusaha/magang (%)	31,33%
23	**Meningkatnya kompetensi lulusan**	lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya	40%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	pada jenjang pendidikan.	lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja	32,13%
		Lulusan program paket C dapat memasuki dunia kerja	35,82%
24	**Tersedianya tenaga medis yang memadai.**	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	6 per 100 rb pendk
		Rasio Dokter per 100.000 penduduk	40 per 100 rb pendk
		Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk	11 per 100 rb pendk
25	**Tersedianya obat-obatan yang memadai.**	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100%
26	**Tersedianya peralatan medis yang memadai.**	Ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	90%
27	**Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.**	Angka Kematian Bayi (AKB)	145 kasus
		Angka Kematian Ibu (AKI)	8 kasus
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	85%
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100%
		Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	87%
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	65%
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85%
		Cakupan pelayanan nifas	85%
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	65%
		Cakupan peserta KB aktif	80%
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%
28	**Meningkatnya pemerataan**	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	pelayanan kesehatan.	diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	
		Cakupan rawat jalan	15%
		Cakupan rawat inap	1,5%
		Perluasan Puskesmas	6 unit
		Cakupan Desa Siaga Aktif	69.39%
29	**Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin**	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	100%
		Cakupan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan rentan	100%
30	**Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.**	Jumlah Produk TTG Lokal unggulan yang dipamerkan pada event tingkat nasional	1 paket
31	**Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama.**	Jumlah sarana peribadatan dan pendidikan agama yang dibantu	262 Unit
32	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai.**	Jumlah peserta diklat struktural	47 org
		Jumlah peserta diklat fungsional	150 org
33	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat.**	Jumlah dokumen parahita yang tersusun	1 paket
		Jumlah posyandu unggulan yang terbentuk	6 kelompok
		Jumlah kader posyandu yang terlatih	112 kader
		Jumlah data posyandu yang tersusun	1 buku
		Jumlah sarana posyandu yang tersedia	30 unit
		Jumlah rapat kordinasi pokjanal posyandu tingkat kecamatan	14 kecamatan
		Jumlah orang tua yang mendapatkan pelatihan tentang metode pengajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus	100 orang

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat (per tahun)	1
		Pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar (per tahun/orang)	1 keg/75 o
		Pelatihan ketrampilan bagi eks penyakit sosial (per tahun)	1 keg
		Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	50
		Pelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi keluarga fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi (kegiatan/tahun)	1
		Lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi	50,30
		lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah	92,50%
34	**Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan.**	persentase panjang jalan dalam kondisi baik	85%
36	**Meningkatnya kualitas saluran drainase.**	% wilayah yang memiliki drainase	50%
		% Drainase dalam kondisi baik	60%
		Penilaian adipura	Piala
		Prosentase RTH Kawasan Perkotaan	10%
37	**Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya *sea front city.***	Jumlah investor bidang kelautan	4
		Jumlah raman TPI	60.316.999 ton
38	**Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.**	Jumlah kelompok Pokwasmas	5
39	**Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan.**	omset produksi hasil olahan perikanan	478.800 ton
		Jumlah bibit ikan unggul	5 juta

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
40	**Terwujudnya kawasan wisata bahari**	Terpeliharanya RM Sea Food di Kawasan BBS	1 paket
		Jumlah wisatawan bahari	380.656 orang
		Rata-rata Kunjungan wisatawan	1 hari
41	**Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance*.**	Persentase penurunan jumlah temuan pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal	30%
		Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	40%
		Opini penilaian BPK	WTP
42	**Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien.**	Nilai IKM	82
		Jumlah sertifikasi ISO	10 unit
		Cakupan penerbitan KTP/KK	100%
		Cakupan penerbitan Akta Catatan Sipil	100%
43	**Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.**	Jumlah media massa baik cetak & elektronik yg mempublikasikan keg pemerintahan dan pembangunan daerah	5000 exp
		Tingkat penyebaran informasi publik dan fasilitasi pers	70%
		Jumlah website milik Pemda yang dapat diakses oleh masyarakat	17 domain
44	**Responsif terhadap perkembangan situasi.**	Jumlah kejadian bencana yang tertangani	14 Kec
		Menurunnya angka kriminalitas di seluruh wilayah.	50 kasus
		Tersusunnya RKPD	1 dokumen
		Jml dokumen rekomendasi kebijakan perencanaan	8 dokumen
		Jumlah Desa yang menyusun Rencana Kerja Pembangunan	240 desa/kel
45	**Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.**	Jumlah penyelenggaraan Dialog / Audensi	14 kec
46	**Proaktif dalam**	Jml dokumen RDTRK	5 dokumen

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis	Jm dokumen kajian penilitian dan pengembangan	2 dokumen
		Jumlah warnet	60
		Jumlah radio	8
		Jumlah BTS	125

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat akuntabilitas kinerja menunjukkan derajat keterukuran kinerja pemerintah sekaligus dapat pula menunjukkan tingkat kinerja pemerintah. Bagian awal dari akuntabilitas kinerja adalah pengukuran kinerja yang merupakan dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan yang berisi pertanggung jawaban kinerja dalam mencapai tujuan / sasaran strategis. Dalam rangka untuk mengetahui capaian sasaran strategis tersebut perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2012 mencakup penilaian pencapaian target sasaran yang tersebut didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2015. Capaian kinerja sasaran diukur dan didekati dari capaian beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2012.

Pengukuran kinerja sasaran yang termuat didalam penetapan kinerja adalah capaian kinerja yang merupakan cerminan efektifitas proses penganggaran program kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun

Anggaran 2012. Program dan kegiatan pada tiap - tiap SKPD merupakan aksi nyata didalam mewujudkan tujuan dan sasaran tahap pertama pembangunan di Kabupaten Rembang. Sehingga keberhasilan capaian kinerja pada setiap program maupun kegiatan akan berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada capaian kinerja tiap- tiap sasaran pembangunan Kabupaten Rembang.

Namun perlu dipahami, logika pengukuran kinerja disini adalah bahwa suatu sasaran tidak lagi merupakan sasaran spesifik yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab suatu unit kerja, suatu sasaran capaiannya dapat berupa resultante kinerja kegiatan berbagai unit kerja. Dengan pengukuran capaian kinerja yang absolut dan terfokus pada satu atribut maka pengukuran ini dianggap akan lebih terbebas dari distorsi aritmatis pembobotan. Asumsi ini mendasari asumsi berikutnya bahwa capaian kinerja dapat melebihi 100 %. Akan tetapi ketentuan ini harus disesuaikan dengan sasaran yang ada, dan tidak berlaku terhadap penanganan kasus misalnya yang kinerja tertinggi harus 100 %.

Pengukuran kinerja ini menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja ke dalam empat kategori sebagaimana pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Kategorisasi Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori capaian
I	>100 %	Sangat berhasil
II	>80 % - 100 %	Berhasil
III	>50 % - 79 %	Cukup berhasil
IV	< 49 %	Kurang berhasil

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Indikator}}{\text{Rencana Kinerja Indikator}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2012 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Setiap akhir periode (tahun) instansi pemerintah melakukan pengukuran pencapaian target, yaitu mengukur hasil kinerja, selanjutnya membandingkan dengan rencana kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani pada awal periode (tahun). Pengukuran kinerja tahun 2012 adalah mengukur/menghitung capaian kinerja program/kegiatan tahun 2012 serta membandingkan dengan rencana target dalam dokumen Penetapan Kinerja 2012.

Sasaran 1. Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta menyongsong era globalisasi Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya meningkatkan kemampuan bersaing dengan menciptakan iklim usaha dan investasi yang sehat. Kondisi sumber daya alam dan potensi yang dimiliki daerah Kabupaten Rembang cukup potensial untuk dikembangkan seperti pertambangan, perikanan, pertanian dan peternakan, dan beberapa potensi lain yang juga berpeluang adalah investasi di bidang pariwisata, industri, kerajinan dan jasa. Pengelolaan kondisi alam dan kondisi daerah tersebut, perlu ditumbuhkembangkan secara profesional dan berkelanjutan, sehingga secara ekonomi menyentuh dan meningkatkan perkonomian rakyat / masyarakat Rembang dan memberi peningkatan income perkapita

masyarakat, dan secara makro memberi kontribusi yang besar untuk PAD di Kabupaten Rembang.

Penumbuhan minat investasi dilakukan dengan prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah pelayanan perizinan yang memadai melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang hendak mewujudkan visi yaitu '**Unggul dalam Kualitas Layanan dan Professional**' dalam rangka melaksanakan tugas pokok KPPT Kabupaten Rembang yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal di daerah.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel pengukuran pencapaian sasaran berikut dibawah ini :

Tabel III.2

Capaian penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat penyelesaian perijinan terhadap waktu yang ditentukan	%	100	100	100
2.	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap penerbitan perijinan dan non perijinan	Kasus	12	12	100
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata					**100**

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian indikator tingkat penyelesaian perijinan terhadap waktu yang ditentukan 100% sejumlah 429 pemohon dan jumlah pengaduan masyarakat terhadap

penerbitan perijinan dan non perijinan yang terselesaikan 100% dengan jumlah aduan yang masuk sebanyak 12 kasus.

Pada tahun 2012 ini terdapat permohonan yang masuk ke KPPT Kabupaten Rembang sebanyak 429 pemohon untuk mendapatkan izin usaha kesemuanya sudah diproses dan dikeluarkan izin usaha, dalam kurun 5 tahun terakhir digambarkan dalam grafik permohonan izin uzaha sebagai berikut :

Grafik .III.1

Pemohonan Izin Usaha berdasarkan permohonan yang masuk di KPPT Kabupaten Rembang

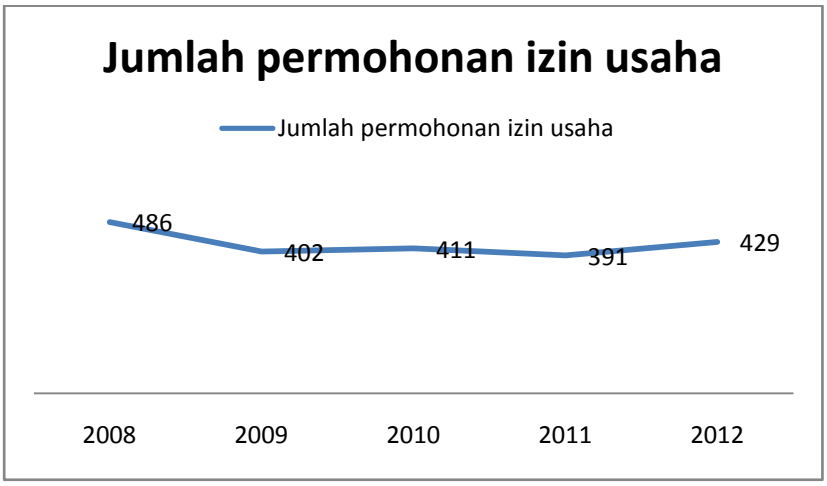

Sasaran 2. Promosi peluang investasi

Investasi daerah merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah, secara normatif, investasi daerah dipahami sebagai salah kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah, karena itu untuk mendorong investasi, daerah dituntut untuk aktif menggali potensi daerahnya dan menginformasikannya kepada publik melalui berbagai media. Keberadaan informasi yang cepat akses, akurat dan mutakhir akan membantu pihak investor dalam menganalisis potensi daerah dan melakukan investasi.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel pengukuran pencapaian sasaran berikut dibawah ini :

Tabel III.3

Capaian Kinerja Promosi peluang investasi

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah promosi investasi	3 kl	3 kl	100
2.	Jumlah kepeminatan	3 investor	2 investor	67
3.	Nilai realisasi investasi	Rp 299.909.737.518	Rp 516.371.924.708	250
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata				**139**

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian indikator jumlah promosi investasi 100% dengan keikutsertaan promosi investasi di Invesda 2012 di Yogyakarta, Invesda 2012 di Surabaya dan Central Java Investmen Business Forum (CJIBF) 2012 di Jakarta, sedangkan capaian indikator jumlah kepeminatan 100% dengan jumlah 3 investor yang mempunyai kepeminatan di Kabupaten Rembang yaitu : PT. Itacha Resources yang bergerak dibidang pertambangan dan energi, perkebunan tebu dan industri gula dengan nilai investasi Rp. 5 Trilyun dan PT. Manggala Purnama Sakti yang bergerak dibidang agrobisnis, pengolahan sampah, semen dan air minum dengan nilai investasi Rp. 500 Milyar. Capaian yang lain, yaitu capaian indikator nilai realisasi investasi 250% dengan besar realisasi investasi Rp. 516.371.924.708,- kenaikan nilai realisasi investasi ini cukup signifikan dikarenakan mulai dibangunnya **PT. OMYA INDONESIA** dan **PT. SEMEN INDONESIA (persero) tbk** di Kecamatan Sale. Melihat dari capaian yang sudah disebutkan, maka didapat capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 139%

Dibawah ini realisasi investasi investasi 5 tahun terakhir berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masing-masing perusahaan

yang ada di Kabupaten Rembang khususnya investasi swasta (PMA/PMDN) :

Tabel III.4

Perkembangan Realisasi Investasi PMA/PMDN Kabupaten Rembang

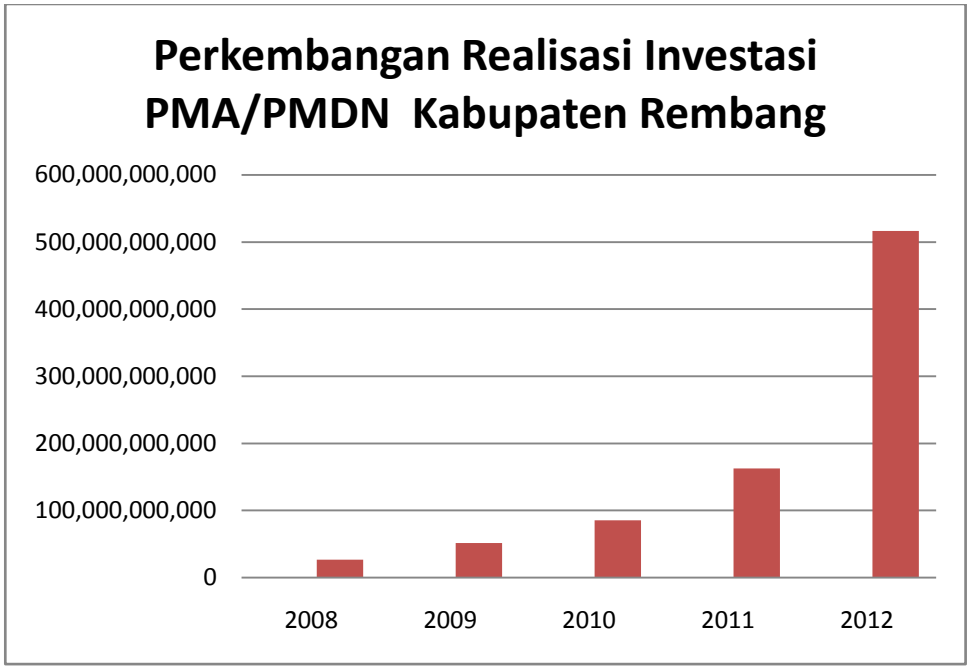

Sasaran 3. Terjaminnya keamanan berusaha

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta menyongsong era globalisasi Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya meningkatkan kemampuan bersaing dengan menciptakan iklim usaha dan investasi yang sehat. Dalam kaitan itu, Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2008 melalui perda No. 12 Tahun 2008 membentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Rembang sebagai SKPD yang menangani pelayanan perizinan usaha/investasi.

Dalam menjamin keamanan berusaha di Kabupaten Rembang, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui KPPT Kabupaten Rembang selaku SKPD yang melayani perizinan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait, serta telah membentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Rembang, dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha dalam berinvestasi di Kabupaten Rembang.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel pengukuran pencapaian sasaran berikut dibawah ini :

Tabel III.5

Capaian Indikator kinerja terjaminnya keamanan berusaha

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di sektor perdagangan	200	177	89
2.	Jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di sektor industri	54	55	102
3.	Jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di luar sektor perdagangan dan industri	179	199	111
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata				**100,7**

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian indikator jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di sektor perdagangan 89% dengan jumlah 177 perusahaan, jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di sektor industri 102 % dengan jumlah 55 perusahaan dan jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak diluar sektor perdagangan dan industri 111 % dengan jumlah sebanyak 199 perusahaan, sehingga didapatkan capaian kinerja sasaran rata-rata mencapai 100,7%

Dibawah ini digambarkan penyebaran perusahaan baru berdasarkan sektor usaha yang di Kabupaten Rembang tahun 2012 adalah :

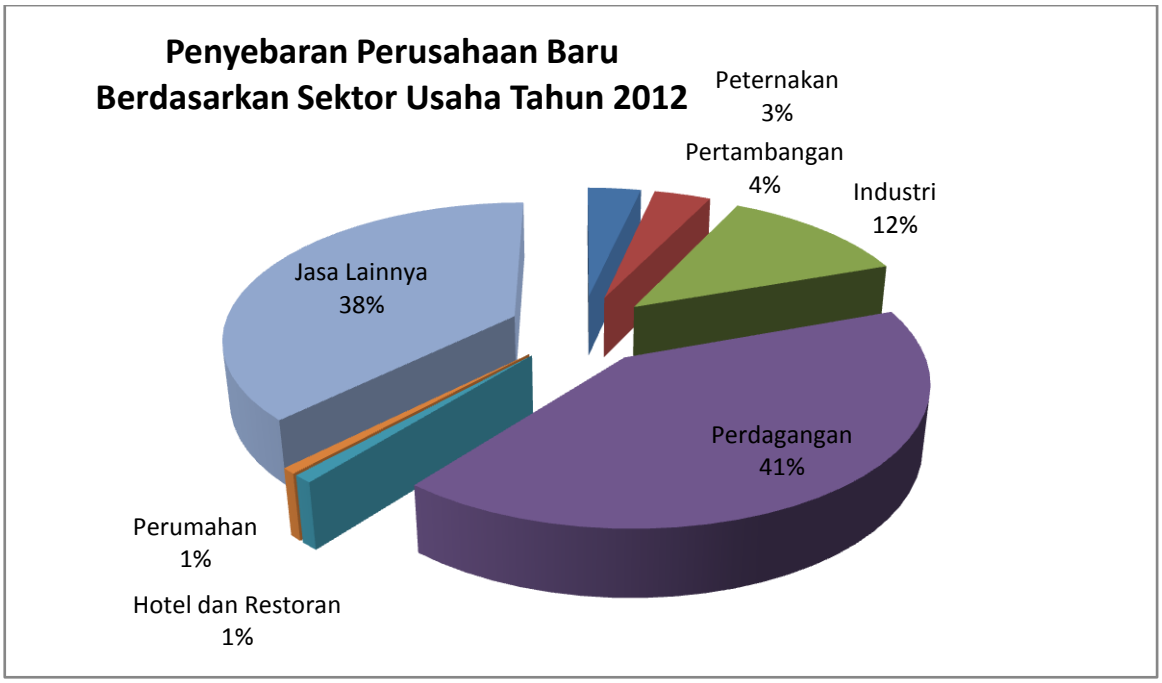

Sasaran 4. Tersedianya infrastruktur investasi yang memadai

Untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan infrastuktur yang memadai. Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat kegiatan ekonomi di Kabupaten Rembang, Pemerintah Kabupaten Rembang selalu berupaya memperbaiki dan meningkatkan bahkan menciptakan infrastruktur khususnya yang berkaitan dengan penciptaan investasi di Kabupaten Rembang, semisal terbangunnya PLTU yang berkekuatan 2 X 315 MW di Kecamatan Sluke, dibangunnya Pelabuhan Umum di Kecamatan Sluke, peningkatan kualitas tempat pelelangan ikan di Kecamatan Rembang, perbaikan dan peningkatan akses jalan pendukung kegiatan investasi, bahkan Pemerintah Kabupaten Rembang juga sudah mempunya Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 sebagai panduan/landasan akan dibawa kemana pendirian perushaan oleh calon investor selain itu juga di Kabupaten Rembang sudah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam rangka untuk memudahkan koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang termasuk dalam menentukan calon investor menentukan lokasi perusahaan.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.5

Capaian kinerja tersedianya infrastruktur yang memadai

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah industri skala besar	6	6	100
2.	Jumlah klaster	8	8	100
3.	Rekomendasi BKPRD terhadap perizinan pemanfaatan ruang	5	46	920
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata				**373**

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian indikator jumlah industri skala besar 100% dengan jumlah 6 perusahaan, jumlah klaster 100% dengan jumlah 8 klaster dan Rekomendasi BKPRD terhadap perizinan pemanfaatan ruang 950% dengan jumlah rekomendasi yang telah dikeluarkan BKPRD sebanyak 46 rekomendasi. Melihat capaian kinerja masing-masing indikator, maka capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 373%.

Tabel III.6
Inventarisasi Surat Rekomendasi BKPRD Perihal Kesesuaian RTRW Kabupaten Rembang Terhadap Permohonan Perizinan Pemanfaatan Ruang Tahun 2012

No.	Uraian	Pemohon	Luasan (Ha) / (M2)	Lokasi	Surat Rekom Sekda (Ketua BKPRD)
1	Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Rencana Penggilingan Batu	PT. Asli Indoraya	± 8.812 m^2	Ds Bogorejo Kec. Sedan	050 / 0389 / 2012 20 Feb 2012
2	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pabrik Pengolahan Kalsium Karbonat.	PT. Nusantara Industri Mineral	± 6.196 m2	Ds. Wonokerto Kec. Sale	050 / 0388 / 2012 20 Feb 2012
3	Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah	PO Mitra	1.352 m^2	Ds. Kabongan Lor Kec.	050 / 0387 / 2012 20 Feb 2012

No.	Uraian	Pemohon	Luasan (Ha) / (M2)	Lokasi	Surat Rekom Sekda (Ketua BKPRD)
	Terhadap Pembangunan Hotel dan Toko.			Rembang	
4	Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Rencana Pabrik Es	PT. Putra Udang Sari	440 m^2	Ds. Kemadu Kec. Sulang	050 / 0390 / 2012 20 Feb 2012
5	Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Perumahan Daffa Utama Regency	PT.Daffa Jaya Utama	15.968 m^2	Ds. Tireman Kec. Rembang	050 / 0391 / 2012 20 Feb 2012
6	Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Perumahan dan Ruko	PT.Tri Biconts Pratama	7.816 m^2	Ds. Kabongan Kidul Kec. Rembang	050 /0139/2012 27 Feb 2012
7	Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Rencana Pendirian Pabrik Pengolahan Surimi	PT.Bintang Karya Laut	21.885 m^2	Ds Sendangmuly o Kec. Sluke.	050 / 0524 /2012 6 Maret 2012
8	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Permohonan Pembangunan Perumahan 'The Palm View Estate'	PT.Detail Properti Indonesia	19.400 m2	Ds Kabongan Kidul Kec. Rembang	050 / 0928 / 2012 11 April 2012
9	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Permohonan Pendirian Pabrik Makanan Ringan	PO.Supreme Food	10.446 m2	Ds Tritunggal Kec. Rembang	050 / 0927 / 2012 11 April 2012
10	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Permohonan Pembangunan Show Room dan Bengkel Mobil	PT.Sun Star Motor	2.439 m2	Ds Turusgede Kec. Rembang	050 / 0929 / 2012 11 April 2012
11	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Kavling Tanah Untuk Pembangunan Rumah Tinggal	Megah Trisnawati	1.310 m2	Ds Mondoteko Kec. Rembang	050 / 0926 / 2012 11 April 2012
12	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Perluasan Pembangunan Tahap II	PT.DIFALINDRA CIPTA	+ 7.108 m2	Ds Mondoteko Kec. Rembang	050 / 2095 / 2012 13 Juli 2012

No.	Uraian	Pemohon	Luasan (Ha) / (M2)	Lokasi	Surat Rekom Sekda (Ketua BKPRD)
	Perumahan Puri Mondoteko Di Desa Mondoteko Kecamatan Rembang				
13	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pembangunan Industri Batu Kapur Di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem	PT. Nusantara Industri Mineral	+ 72.000 m2	Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem	050 / 2094 / 2012 13 Juli 2012
14	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pembangunan Toko Serba Ada 'Pantes' di Desa Soditan Kecamatan Lasem	Purwanto/PO .Pantes	+ 1.000 m2	Desa Soditan Kecamatan Lasem	050 / 2091 / 2012 13 Juli 2012
15	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pembangunan Garasi Truk Di Desa Wonokerto Kecamatan Sale	PT. Transindo Permai	+ 4.597 m2	Desa Wonokerto Kecamatan Sale	050 / 2096 / 2012 13 Juli 2012
16	Rekomendasi Kesesuaian Alih Fungi Lahan di Desa Pasarbanggi Kec. Rembang	Budi Setiawan	± 12.350 m2	Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang	050 / 2088 / 2012 13 Juli 2012
17	Rekomendasi Kesesuaian Alih Fungi Lahan di Desa Sumbergirang Kecamatan Lasem	Sutrimo	+ 5.755 m2	Desa Sumbergirang Kecamatan Lasem	050 / 2098 / 2012 13 Juli 2012
18	Rekomendasi Kesesuaian Alih Fungi Lahan di Kelurahan Sidowayah Kecamatan Rembang	Soeparno	+ 4.920 m2	Kelurahan Sidowayah Kecamatan Rembang	050 / 2093 / 2012 13 Juli 2012
19	Rekomendasi Kesesuaian Alih Fungi Lahan di Desa Mondoteko Kecamatan Rembang	Sukarman	+ 1.644 m2	Desa Mondoteko Kecamatan Rembang	050 / 2092 / 2012 13 Juli 2012
20	Rekomendasi Kesesuaian Alih Fungi Lahan di Desa Sumurpule Kecamatan Kragan	Supriyanto	+ 6.430 m2	Desa Sumurpule Kecamatan Kragan	050 / 2987 / 2012 13 Juli 2012
21	Rekomendasi Kesesuaian Alih Fungi Lahan di Desa Pandangan Wetan	Zulfah	+ 4.112 m2	Desa Pandangan Wetan Kecamatan	050 / 2097 / 2012 13 Juli 2012

No.	Uraian	Pemohon	Luasan (Ha) / (M2)	Lokasi	Surat Rekom Sekda (Ketua BKPRD)
	Kecamatan Kragan			Kragan	
22	Rekomendasi Kesesuaian Alih Fungi Lahan di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang	Harun Siananto	+ 30.000 m2	Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang	050 / 2086 / 2012 13 Juli 2012
23	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pembangunan Peternakan Ayam di Desa Karangasem dan Kedungringin Kecamatan Sedan	PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	+ 21,6 Ha	Desa Karangasem dan Kedungringin Kecamatan Sedan	050 / 2212 / 2012 25 Juli 2012
24	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pembangunan Gudang dan Kantor di Desa Tireman Kecamatan Rembang	PT.DIAN LESTARI PERDANA	+ 18.410 m2	Desa Tireman Kecamatan Rembang	050 / 2213 / 2012 25 Juli 2012
25	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pengolahan dan Pemurnian Pasir Silika di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan	PT.AMIR HAJAR KISLI	+ 5.000 m2	Desa Pamotan Kecamatan Pamotan	050 / 2579 / 2012 24 Agustus 2012
26	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pendirian SPPBE di Desa Punjulharjo Kec. Rembang	PT. GASINDO PERKASA SEJAHTERA	+ 8.164 m2	Desa Punjulharjo Kec. Pasarbanggi	050 / 2580 / 2012 24 Agustus 2012
27	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pendirian Rumah Makan Pringsewu di Desa Tritunggal Kecamatan Rembang	CV. REMBANG SEJAHTERA	+ 5.017 m2	Desa Tritunggal Kecamatan Rembang	050 / 2582 / 2012 24 Agustus 2012
28	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pengolahan dan Pemurnian Pasir Silika di Desa Kragan Kecamatan Kragan	PT. VARIA USAHA	+ 13.550 m2	Desa Kragan Kecamatan Kragan	050 / 2581 / 2012 24 Agustus 2012
29	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pendirian SPBU dan	PT. ANUGERAH INDOGAS MULIA	+ 21.847 m2	Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang	050 / 2584 / 2012 24 Agustus 2012

No.	Uraian	Pemohon	Luasan (Ha) / (M2)	Lokasi	Surat Rekom Sekda (Ketua BKPRD)
	Sarpras Pendukungnya di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang				
30	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pendirian Hotel Grand Antika di Desa Kabongan Lor Kecamatan Rembang	Bambang Kristianto	+ 9.242 m2	Desa Kabongan Lor Kecamatan Rembang	050 / 2585 / 2012 24 Agustus 2012
31	Rekomendasi Kesesuaian Alih Fungsi Lahan di Desa Langkir Kecamatan Pancur	Rusmiyati	+ 2.215 m2	Desa Langkir Kecamatan Pancur	050 / 2578 / 2012 24 Agustus 2012
32	Rekomendasi Kesesuaian Alih Fungsi Lahan di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang	Janadi	+ 8.630 m2	Desa Sumberjo Kecamatan Rembang	050 / 2577 / 2012 24 Agustus 2012
33	Rekomendasi Kesesuaian Alih Fungsi Lahan di Desa Tireman Kecamatan Rembang	Akhmad Dahlan	+ 4.130 m2	Desa Tireman Kecamatan Rembang	050 / 2576 / 2012 24 Agustus 2012
34	Rekomendasi Kesesuaian Alih Fungsi Lahan di Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang	Sulistyowati	+ 3.682 m2	Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang	050 / 2575 / 2012 24 Agustus 2012
35	Rekomendasi Kesesuaian Alih Fungsi Lahan di Desa Ketanggi Kecamatan Rembang	Kusno	+ 1.615 m2	Desa Ketanggi Kecamatan Rembang	050 / 2574 / 2012 24 Agustus 2012
36	Rekomendasi Kesesuaian Alih Fungsi Lahan di Desa Ngotet Kecamatan Rembang	Kayati	+ 5.318 m2	Desa Ngotet Kecamatan Rembang	050 / 2573 / 2012 24 Agustus 2012
37	Rekomendasi Kesesuaian Alih Fungsi Lahan di Desa Sumbergirang Kecamatan Lasem	Siti Nurofiin	+ 2.473 m2	Desa Sumbergirang Kecamatan Lasem	050 / 2572 / 2012 24 Agustus 2012
38	Rekomendasi Kesesuaian Alih Fungsi Lahan di Desa Mondoteko Kecamatan Rembang	Djoko Suroso CS	+ 1.955 m2	Desa Mondoteko Kecamatan	050 / 2571 / 2012 24 Agustus 2012
39	Rekomendasi Kesesuaian Alih Fungsi Lahan di Desa Mondoteko Kec. Rembang	Sudarmin	+ 2.270 m2	Desa Mondoteko Kec. Rembang	050 / 2570 / 2012 24 Agustus 2012
40	Rekomendasi Kesesuaian RTRW	PT. SEMEN BOSOWA	+ 838 Ha	Kecamatan Sale dan	050 / 2903 / 2012

No.	Uraian	Pemohon	Luasan (Ha) / (M2)	Lokasi	Surat Rekom Sekda (Ketua BKPRD)
	Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen, Penambangan Bahan Baku dan Prasarana Sarana Pendukung Lainnya di Kabupaten Rembang	REMBANG		Kecamatan Gunem	26 September 2012
41	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen, Penambangan Bahan Baku dan Prasarana Sarana Pendukung Lainnya di Kabupaten Rembang	PT. GUNUNG MAS MINERAL	+ 455 Ha	Kecamatan Gunem dan Kecamatan Bulu	050 / 2902 / 2012 1 Oktober 2012
42	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Penggilingan Batu Andesit di Desa Pacing Kecamatan Sedan	CV. Cinta Damai Indah	+ 1.000 m2	Desa Pacing Kecamatan Sedan	050 / 3397 / 2012 23 November 2012
43	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pendirian Bengkel Retester Repair dan Repaint Plant Tabung LPG 3 Kg di Desa Jatimudo Kecamatan Sulang	PT. Duta Samudra Indonesia	+ 2.156 m2	Desa Jatimudo Kecamatan Sulang	050 / 3497 / 2012 23 November 2012
44	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Perluasan Perumahan Graha Kartini Tahap II di Desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang	PT. Amir Hajar Kisli	+ 12.418 m2	Desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang	050 / 3268 / 2012 23 November 2012
45	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Penggilingan Batu Andesit di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan	PT. VARIA USAHA BETON	+ 11.040 m2	Desa Pamotan Kecamatan Pamotan	050 / 3270 / 2012 23 November 2012
46	Rekomendasi Kesesuaian Alih Fungsi Lahan di Desa Ngotet Kecamatan Rembang	Indarto Ratnawati	+ 4.268 m2	Desa Ngotet Kecamatan Rembang	050 / 3269 / 2012 23 November 2012

Sasaran 5. Tersedianya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai

Sasaran Tersedianya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, dimaksudkan untuk memecahkan isu strategis yaitu masih banyaknya penduduk dibawah garis kemiskinan, terbatasnya akses masyarakat khususnya di perdesaan terhadap sumber – sumber modal yang dipengaruhi oleh kualitas tenaga kerja yang berpendidikan, berketrampilan dan berdaya saing relatif rendah dan belum sepenuhnya didukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk mencapai Sasaran tersebut ditempuh melalui beberapa indikator sasaran antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja, pencari kerja yang ditempatkan, jumlah pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terbuka dan penempatan tenaga kerja.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70	68	97,14
2	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	5	5	100
3	Jumlah Pengangguran Terbuka	%	-3	-3	100
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5	4,5	100
5	Penempatan Tenaga Kerja				
	a. AKL	Orang	265	99	37,36
	b. AKAD	Orang	282	175	62,05
	c. AKAN	Orang	146	7	4,79
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata					**86,37**

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian indikator tingkat partisipasi angkatan kerja 97,14%, pencari kerja yang ditempatkan 100%, jumlah pengangguran terbuka 100% dan penempatan tenaga kerja rata-rata 34,73%. Melihat dari capaian masing-masing indikator, maka didapat capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 86,37%.

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja). Jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Rembang di targetkan turun sebesar 3 % dan ini telah sesuai dengan realisasi. Informasi jumlah pengangguran terbuka ini berguna sebagai acuan bagi pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru dan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :

a. Belum terpenuhinya sarana prasarana Informasi Pasar Kerja (IPK) / Bursa Kerja Online (BKO) secara maksimal.
b. Minimnya anggaran untuk penempatan dan kurangnya dukungan manajemen dibidang transmigrasi
c. Minimnya jatah penempatan transmigrasi dari Provinsi tidak seperti Kabupaten lain, lain provinsi
d. Belum terpenuhinya SDM baik kualitas maupun kuantitas yang memadai.
e. Belum optimalnya pendayagunaan PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial

Adapun Strategi Peningkatan Kinerja antara lain :

1. Perlu adanya dukungan sistem manajemen yang profesional dan sumber dana yang memadai serta fasilitas sarana prasarana sebagai penunjang peningkatan kinerja
2. Peningkatan kerjasama dan koordinasi baik internal maupun eksternal
3. Pendayagunaan potensi sumber Dinsosnakertrans baik internal maupun ekternal (peran *stakeholder*).

Langkah – langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kekurangan keberhasilan pencapaian sasaran yaitu :

a. Mengajukan anggaran yang lebih banyak baik untuk transmigrasi maupun penempatan tenaga kerja serta koordinasi dengan kab lain dalam hal penempatan tenaga kerja
b. Kerjasama dengan radio swasta di Kab. Rembang ditingkatkan dalam hal informasi tenaga kerja
c. Menambah petugas pengantar kerja.
d. Kerja sama dan koordinasi ke Dinas Provinsi di bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu ditingkatkan.

Sasaran 6. Penyebaran Sarana Pelayanan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank ke Pelosok Daerah

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Penyebaran Sarana Pelayanan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank ke Pelosok Daerah

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah BUMDes yang Terbentuk	Unit	5	5	100
2	Jumlah Lembaga Perbankan	Unit	27	28	103,70
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata					**101,85**

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian indikator jumlah BUMDes yang terbentuk 100 % dan jumlah lembaga perbankan 103,70%.

Perbankan adalah suatu badan usaha yang bertujuan memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk meminjam kredit dengan suatu jaminan maupun menabung. Jumlah Lembaga Perbankan yang tersedia di Kabupaten Rembang sebanyak 28 unit dari target sebanyak 27 unit. Lembaga perbankan yang terdapat di Kabupaten Rembang diantaranya adalah :

1. Milik Pemerintah : BRI, BNI, Mandiri
2. Swasta Nasional : BTPN, BCA, Danamon, Mega Syariah, Bank Muamalat
3. Swasta Asing : Rabobank
4. Milik Pemda : BPD, BPR BKK Lasem, BPR Bank Pasar

Sasaran 7. Ketersediaan Skim Kredit Sesuai Dengan Pelaku Jenis Usaha

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ketersediaan Skim Kredit Sesuai Dengan Pelaku Jenis Usaha

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah	kelompok	11	11	100
2	Jumlah Kelompok UEP yang dikelola oleh perempuan	kelompok	2	2	100
3	Jumlah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilatih pengelo laan administrasi kelompok	kelompok	13	13	100
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata					**100**

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Jumlah kelompok yang mendapat fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah 100% dengan jumlah 11 kelompok, Jumlah Kelompok UEP yang dikelola oleh perempuan 100% dengan jumlah 2 kelompok dan Jumlah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilatih pengelolaan administrasi kelompok 100% dengan jumlah 13 kelompok. Berdasarkan capaian indikator sasaran tersebut, capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 100%

Dalam pemberdayaan masyarakat dan desa apa bila ada permasalahan yang berpotensi muncul adalah belum terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa dan belum berkembangnya kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat desa, hal ini dapat diketahui masyarakat belum mampu untuk menggali potensi dan memecahkan masalah yang dihadapi.

Sasaran 8. Adanya Kemampuan UMKM untuk Menyusun Rencana Bisnis Yang Baik

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.10
Capaian Indikator Kinerja Adanya Kemampuan UMKM untuk Menyusun Rencana Bisnis Yang Baik

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mengikuti pembinaan atau pelatihan usaha	UMKM	95	95	100
2	Jumlah Koperasi	Kelompok	529	548	104
3	Prosentase pertumbuhan jumlah koperasi	%	0,94	3,59	382
4	Prosentase pertumbuhan jumlah anggota koperasi	%	18,70	41,50	222
5	Prosentase jumlah	%	76	79	104

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	koperasi aktif dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi				
6	Prosentase jumlah koperasi sehat dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi	%	78,00	78,00	100
7	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah	UMKM	20.843	26.167	125
8	Prosentase peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah	%	9,76	21,75	223
9	Prosentase usaha mikro kecil dan menengah dibandingkan seluruh unit usaha	%	32,56	99,78	306
10	Prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor usaha mikro kecil dan menengah dibanding jumlah penduduk	%	7,40	10,50	142
11	Jumlah omzet usaha mikro kecil dan menengah	Rp	11.831.650.jt	19.866.457.jt	168
12	Jumlah ekspor Kabupaten Rembang	USD	16,16 jt	25,8 jt	160
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata					**140,33**

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian indikator jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mengikuti pembinaan atau pelatihan usaha realisasinya 100%, indikator Jumlah koperasi sebesar 104%, indikator pertumbuhan jumlah koperasi sebesar 382%, indikator pertumbuhan jumlah anggota koperasi sebesar 222%, indikator jumlah koperasi aktif dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi sebesar 104% dan indikator jumlah koperasi sehat dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi sebesar 53%.

Selain itu hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian indikator jumlah usaha mikro kecil dan menengah realisasinya 128%, indikator peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah sebesar 101%, indikator usaha mikro kecil dan menengah dibandingkan seluruh unit usaha sebesar 306%, indikator penyerapan tenaga kerja di sektor usaha

mikro kecil dan menengah dibanding jumlah penduduk sebesar 142% dan indikator jumlah omzet usaha mikro kecil dan menengah sebesar 168% serta indikator jumlah ekspor Kabupaten Rembang sebesar 160%.

Tabel III.11

Data Ekspor Tahun 2012 di Kabupaten Rembang

No.	Nama Perusahaan	Jenis Barang	Negara Tujuan	Jumlah $
1.	CV. Karya Mina Putra Dk. Matalan Ds. Purworejo Kec. Kaliori	Ikan Beku	China, Jepang, Hongkong, Korea	3.223.606
2.	UD. Sasana Antik Ds. Krikilan Kec. Sumber	Meja, Lemari	Belanda, Perancis, Jerman	1.658.773,04
3.	CV. Natural Ds. Mondoteko Kec. Rembang	Meja, Lemari	Belanda	201.700,28
4.	CV. Sabha Ds. Kemadu Kec. SUlang	Meja, Lemari	Jerman, Perancis, Belanda, Korea, Malaysia	658.261,58
5.	PT. Holi Mina Jaya Jl. Raya Sluke - Rembang	Frozen, Surimi	China, Malaysia, Jepang, Singapura, Eropa, Taiwan, Kanada	19.776.760,88
6.	CV. Java Niaga Indonesia Jl. Demang Waru, Ds. Waru, Kec. Rembang	Wood Charcoal	Belanda, Hongkong, Felixtown	252.200

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran adanya kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik adalah, diantaranya :

1. Kesadaran masyarakat akan peranan koperasi masih kurang.
2. Masih banyaknya koperasi tidak aktif maupun koperasi tidak sehat.
3. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan dikalangan pelaku UKM.

4. Kurangnya akses permodalan penunjang kegiatan UMKM.
5. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan teknis kewirausahaan
6. Kurangnya promosi produk unggulan daerah melalui pameran di luar daerah.
7. Lemahnya daya saing produk.
8. Terbatasnya sarana pendukung promosi.

Sedangkan untuk meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM Aparatur Bidang koperasi.
2. Melakukan pembinaan dan pelatihan manajemen koperasi.
3. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan teknis kewirausahaan
4. Adanya bantuan modal untuk menunjang kegiatan UMKM
5. Meningkatkan kegiatan promosi keluar daerah.
6. Mengadalan pelatihan dan pembinaan IKM.
7. Menambah sarana dan fasilitas pendukung promosi.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan target capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Mendorong pengembangan koperasi melalui pembinaan, pelatihan dan penilaian koperasi.
2. Pemasyarakatan koperasi agar lebih dikenal masyarakat.
3. Mendorong upaya pengembangan investasi yang memberikan jaminan kepastian usaha
4. Mengembangkan ekonomi daerah dan memperluas kesempatan kerja melalui Koperasi dan pengembangan UMKM
5. Mengikuti kegiatan pameran baik di luar maupun di dalam daerah.
6. Peningkatan kualitas produk.

Sasaran 9. Dimilikinya Legalitas Asset Pelaku Usaha Sebagai Jaminan Kredit

Tabel .III.12
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dimilikinya Legalitas Asset Pelaku Usaha Sebagai Jaminan Kredit

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pembinaan dan Penguatan Manajemen	UMKM	43	100	232
Capaian Kinerja Sasaran Rata-rata					232

Realisasi pencapaian indikator sasaran Pembinaan dan Penguatan Manajemen mencapai 232 %. Pembinaan dan Penguatan Manajemen UMKM dilakukan oleh Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang dengan memfasilitasi UMKM yang belum memiliki sertifikat tanah agar dapat memilikinya, sehingga akan mempermudah UMKM untuk mendapatkan bantuan modal dengan agunan berupa sertifikat tanah yang mereka miliki. Kegiatan ini tidak berasal dari APBD Kabupaten melainkan dari APBD Provinsi dan bekerjasama dengan BPN, Koperasi dan Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang.

Sasaran 10 :

Jaminan Keamanan oleh Pemerintah Daerah

Jaminan keamaan oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III. 13
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Jaminan Keamanan oleh Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Perda yang disusun	10	7	70 %
2	Jumlah Perbub yang disusun	60	54	90 %
3	Jumlah Keputusan Bupati yang disusun	600	1.088	181,33 %
4	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja dibanding jumlah penduduk	1 per 10.000 pddk	1 per 10.000 pddk	100 %
5	Jumlah Anggota Linmas terlatih	75 org	70 0rg	95,89 %
6	Tingkat penyelesaian pelanggaran trantibum di Kab. Rembang	100%	100 %	100 %
	Capaian Kinerja Sasaran Rata-rata			**106,20 %**

Untuk melihat hasil capaian sasaran Jaminan Keamanan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, dapat dilihat dari 6 (enam indikator) dengan hasil pencapaian 106,20 % (sangat berhasil). Capaian terbesar adalah Indikator Jumlah Keputusan Bupati yang disusun dari target 600 keputusan telah berhasil disusun 1.088 keputusan sehingga capaiannya adalah 181,33 % . Dengan adanya Peraturan/ Perundangan yang telah ditetapkan sebagai Dasar Hukum pelaksanaan Pemerintahan diharapkan dapat memberikan jaminan hukum bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pemerintah kabupaten.

Sasaran 11. Mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Sasaran ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan masih rendahnya penerapan teknologi pertanian mulai dari teknik budidaya sampai teknik pengolahan hasil, yang berdampak pada semakin menurunnya kualitas dan kuantitas komoditas pertanian, perkebunan maupun peternakan. Sementara produksi perikanan tangkap juga masih terbatas yang

disebabkan oleh terjadinya overfishing pada wilayah penangkapan, serta belum memadainya sarana prasarana pendaratan dan pelelangan ikan.

Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran tersebut ditempuh melalui beberapa indikator sasaran antara lain peningkatan ketersediaan alat mesin pertanian serta peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Selengkapnya pencapaian indikator kinerja sasaran ini tersajikan pada tabel berikut :

Tabel .III.14
Capaian Indikator Kinerja mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan ketersediaan alat mesin pertanian	%	5	4,86	97,20
2.	Produksi tanaman pangan a. Padi b. Jagung	 ton ton	 243.063 161.939	 225.476 121.477	 92,76 75,01
3.	Produksi hortikultura a. Cabe b. Mangga	 ton ton	 57.733 6.594	 67.520 7.934	 116,95 120,32
4	Produksi tanaman perkebunan a. Tebu (cane) b. Kelapa (kopra)	 ton ton	 32.745 4.319	 37.621 4.290	 114,89 99,33
5.	Produksi Peternakan a. Daging sapi b. Daging kambing c. Daging ayam d. Telur ayam e. Telur itik	 kg kg kg kg kg	 901.667 105.296 733.400 564.992 671.925	 1.189.020 133.035 772.713 632.635 893.802	 131,87 126,34 105,36 111,97 133,02
6.	Produksi hasil tangkapan ikan	ton	50.264,17	58.621.30	116,63
				Capaian Kinerja Sasaran	**110,90**

Dari indikator kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator sasaran mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dapat dikategorikan berhasil, dengan capaian rata-rata **110,90**%. Pencapaian target ini karena telah didukung oleh pencapaian beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Menurut data Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan atas ketersediaan beberapa alat mesin pertanian perkebunan jika dibandingkan pada tahun 2011, diantaranya handtraktor dari 572 unit menjadi 787 unit, RMU (Rice Milling Unit) dari 278 menjadi 308 unit dan pompa air dari 1.913 unit menjadi 2.342 unit. Hal ini dikarenakan selain dari kemampuan swadaya masyarakat yang mulai meningkat juga adanya dukungan kegiatan penyediaan peralatan dan mesin pra panen, pasca panen dan pengolah hasil pertanian pada program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan melalui anggaran APBD Kabupaten maupun bantuan hibah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Sementara untuk peningkatan produksi pertanian, telah mendekati target yang ditetapkan, hal ini karena adanya dukungan perluasan jaringan irigasi mencapai 1.400 hektar melalui pembangunan JIDES seluas 450 Ha dan JITUT seluas 950 Ha serta pembangunan embung sebanyak 8 unit dan irigasi tanah dangkal sebanyak 17 unit. Selain itu juga adanya upaya peningkatan produktivitas melalui kegiatan SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Pertanian Terpadu) padi seluas 6.000 hektar, jagung 1050 hektar dan kedelai seluas 2.000 hektar.

Peningkatan produksi perkebunan juga memenuhi target yang ditetapkan berkat dukungan kegiatan Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui penyediaan bibit varietas unggul baru dari KBD seluas 4 Ha serta pengembangan kebun bibit tebu kultur jaringan seluas 30 Ha, dan kegiatan ekstensifikasi tebu dari dana dekonsentrasi seluas 400 Hektar dan pengembangan tanaman kelapa sebanyak 5.000 batang. Demikian juga

pada sektor peternakan juga telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, berkat adanya dukungan program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan melalui kegiatan Pembangunan sarana dan srasarana sembibitan ternak, Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat dan pengembangan pakan ternak.

Guna mencapai target peningkatan produksi perikanan di tahun 2012, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang telah melaksanakan kegiatan berupa batuan sarana dan prasarana untuk perikanan tangkap berupa bantuan alat tangkap dan modernisasi kapal penangkap ikan, sehingga dapat membantu pencapaian produksi sebesar 58.621,30 Ton. Sedangkan untuk perikanan budidaya dilakukan kegiatan berupa bantuan benih pakan dan bibit ikan serta penebaran benih diperairan umum sehingga untuk perikanan budidaya air payau mengalami kenaikan produksi dari 25,241 Ton di tahun 2011 menjadi 27,978 Ton di tahun 2012.

Adapun beberapa indikator yang belum mencapai target disebabkan antara lain karena pada tahun 2012 kondisi iklim kurang menguntungkan untuk kegiatan pertanian jika dibandingkan tahun 2011, yaitu menurunnya curah hujan dan hari hujan. Dari data curah hujan yang ada menunjukkan bahwa rata-rata curah hujan turun 116 mm yaitu dari 1.180 mm menjadi 1.064 mm dan jumlah hari hujan rata-rata turun 11 hh dari 76 hh menjadi 65 hh sehingga ini berpengaruh pada meningkatnya hama penyakit tanaman pertanian. Pada tahun 2012 terdapat 869 Ha sawah mengalami Puso akibat kekeringan, 714 Ha tanaman rusak akibat hama penggerek batang, serta 450 Ha terkena serangan belalang daun.

Untuk mengatasi hambatan di atas, telah dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- Meningkatkan produksi dengan memfasilitasi kepada para petani untuk menggunakan bibit varietas unggul/hibrida .
- Memfasilitasi penerapan teknologi budidaya untuk miningkatkan produktivitas melalui kegiatan SLPTT.
- Mengedepankan metode pengendalian secara PHT (Pengendalian Hama Terpadu), agar supaya tanaman bisa aman tetapi lingkungan juga aman

dari pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan pestisida yang kurang bijak.

Sasaran 12. Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha.

Sasaran meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha dimaksudkan untuk menjawab permasalahan masih lemahnya jaringan pemasaran produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan, yang ditandai dengan masih lemahnya daya tawar produk.

Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator antara lain; peningkatan pelaku usaha sektor tanaman pangan hortikultura, peningkatan pelaku usaha sektor perkebunan, peningkatan pelaku usaha sektor peternakan dan peningkatan kelompok usaha sektor kehutanan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel III.15
Capaian Indikator Kinerja meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan pelaku usaha sektor tanaman pangan dan hortikultura	%	5	4,98	99,60
2.	Peningkatan pelaku usaha sektor perkebunan	%	5	4,41	88,20
3.	Peningkatan Pelaku usaha sektor peternakan	%	5	4,73	94,60
4.	Peningkatan kelompok usaha sektor Kehutanan	%	5	4,11	82,20
Capaian Kinerja Sasaran Rata-rata					**91,15**

Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator belum mencapai 100% namun secara rata-rata sudah cukup baik yaitu 91,15%. Program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan dengan kegiatan diantaranya promosi atas hasil produksi unggulan daerah melalui event pameran dan promosi. Selain itu juga pembangunan jalan usaha tani, jalan produksi pertanian, jalan produksi perkebunan dan peternakan yang totalnya mencapai 17 Km dari dana DAK bidang pertanian maupun dana Tugas Pembantuan, dalam rangka memberikan kemudahan angkutan saprodi maupun hasil panen bagi usaha sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.

Keberhasilan dari target kinerja ini juga karena adanya peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat dengan melihat peluang dan potensi usaha pada sektor pertanian dan kehutanan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pelaku usaha baik tingkat kelompok, perorangan maupun badan usaha. Dari data pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang tercatat peningkatan pelaku usaha sektor tanaman pangan dan hortikultura dari 301 unit menjadi 316 unit, sektor peternakan dari 238 unit menjadi 249 unit, sektor perkebunan dari 179 unit menjadi 187 unit dan sektor kehutanan dari 271 unit menjadi 282 unit. Sementara menurut data dari kantor KPPT (Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu) tercatat yang melakukan ijin usaha baru di sektor pertanian dan kehutanan pada tahun 2011 sejumlah 59 ijin usaha baru dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 114 usaha baru di sektor pertanian dan kehutanan.

Selain itu juga adanya dukungan program agribisnis melalui kegiatan pengembangan agribisnis peternakan dan pengembangan agribisnis perkebunan serta program pengembangan pertanian unggulan melalui kegiatan pengembangan sentra produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura juga sangat membantu pengembangan kawasan unggulan.

Dari indikator capaian tersebut peningkatan pelaku usaha sektor kehutanan yang paling rendah (82,20 %). Hal ini dimungkinkan karena adanya penurunan permintaan akan pasar luar negeri, juga persediaan

bahan baku kayu rakyat yang mulai berkurang. Dari data potensi hutan rakyat yang ada, luas hutan rakyat yang mencapai 12.000 hektar hampir 70 % nya adalah kelas umur antara 1 – 10 tahun. Sehingga untuk meningkatkan usaha di sektor kehutanan perlu adanya terobosan peluang pasar, dan peningkatan kualitas produksi hasil hutan.

Sasaran 13. Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha

Sasaran tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha dimaksudkan untuk menjawab isue strategis rendahnya investasi dan jalinan kemitraan di daerah.

Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator antara lain; peningkatan stimulan untuk kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura, kelompok tani perkebunan, kelompok tani peternakan dan kelompok tani kehutanan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel .III.16
Capaian Indikator Kinerja tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani Pangan dan Hortikultura	%	5	5,01	100,20
2.	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani perkebunan	%	5	4,98	99,60
3.	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani peternakan	%	5	4,23	84,60
4.	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani Kehutanan	%	5	3,51	70,20
Capaian Kinerja Sasaran Rata-rata					**88,65**

Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa capaian kinerja sasaran tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha adalah 88,65%, dengan pencapaian indikator peningkatan stimulan untuk kelompok tani kehutanan yang paling rendah sebesar 70,20%.

Pada sektor tanaman pangan dan hortikultura, pencapaian sasaran ini didukung oleh peningkatan stimulan bantuan benih dari Kementerian Pertanian dalam kegiatan SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Pertanian Terpadu) maupun kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN), pada tahun 2012 stimulan yang diberikan berupa bantuan benih padi non hibrida 150 ton untuk lahan seluas 5.500 hektar, benih padi hibrida 15 ton untuk lahan seluas 500 hektar, benih padi gogo 25 ton untuk lahan seluas 850 hektar, benih jagung hibrida 16 ton untuk lahan seluas 1050 hektar dan benih kedelai 80 ton untuk lahan seluas 2.000 hektar.

Pada sektor perkebunan, pencapaian sasaran ini didukung oleh peningkatan stimulan bantuan peralatan dan demplot tanaman tembakau pada kegiatan agribisnis perkebunan, bantuan pupuk dan bibit tebu untuk KBD seluas 4 Ha pada kegiatan pengembangan benih/bibit unggul perkebunan, serta pengembangan kebun bibit tebu kultur jaringan seluas 30 Ha dan ekstensifikasi tebu dari dana dekonsentrasi seluas 400 Hektar.

Pencapaian sasaran sektor peternakan, didukung oleh peningkatan stimulan bantuan ternak pada kelompok ternak yaitu dari sumber dana APBD Kabupaten untuk kegiatan pemberdayaan Kelompok Ternak berupa bantuan 70 ekor kambing 25 ekor sapi, 500 ekor ayam kampung, serta bantuan hibah Rp. 1.131.500.000,- untuk penguatan modal kelompok peternak. Sedangkan dari dana APBN ada bantuan stimulan untuk penjaringan sapi betina produktif sebesar Rp. 500.000.000,- dan Penguatan Sapi Betina Produktif sebanyak 9 kelompok peternak dengan dana stimulan masing-masing kelompok sebesar Rp. 200.000.000,- serta stimulan untuk penguatan modal kelompok ternak sapi sebesar Rp. 140.000.000,- melalui kegiatan LM3.

Sedangkan stimulan untuk kelompok tani hutan diberikan pada kegiatan pembuatan kebun bibit rakyat, pada tahun 2012 mendapatkan

alokasi dana dari APBN sebesar 1.500.000.000,- untuk 30 kelompok, dan kegiatan lainnya berupa BLM pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi sebesar 550.000.000,- untuk 11 kelompok dalam rangka pemberdayaan kelompok untuk mengembangkan aneka usaha perhutanan.

Selain itu akses permodalan dari perbankan juga menunjukkan peningkatan yang cukup baik dalam rangka penyediaan kredit untuk pelaku usaha di sektor pertanian, yaitu melalui Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Dari data yang ada di Dinas Pertanian dan Kehutanan tercatat bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah mengucurkan kredit untuk kegiatan kelompok tani dan kelompok peternak sebesar Rp. 5.775.250.000 meningkat sebesar 10,11% dibandingkan tahun 2011 Rp. 5.244.900.000,- demikian juga dengan Bank Nasional Indonesia (BNI) juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 295% dari semula Rp. 200.000.000,- pada tahun 2011 menjadi Rp.790.000.000,- pada tahun 2012.

Sasaran 14. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian.

Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian dimaksudkan untuk menjawab isue strategis mengenai kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan publik yang belum memadai. Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaanya sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun.

Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator antara lain; bertambahnya luas lahan pertanian dan perkebunan yang teraliri jaringan irigasi serta terbangunnya embung atau waduk yang mampu menampung kelebihan air pada musim hujan guna memenuhi kebutuhan air baku. Adapun hasil pengukuran kinerja sasaran ini sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel III.17
Capaian Indikator Kinerja meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Bertambahnya luas lahan pertanian dan perkebunan yang teraliri jaringan irigasi	ha	800	1.500	187,50
2.	Pembangunan embung pertanian	bh	15	8	53,33
				Capaian Kinerja Sasaran Rata-rata	**120,42**

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan infrastruktur dasar pertanian khususnya pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai; pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan; pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah; pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah dan air hujan.

Namun demikian, dari hasil capaian kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian cukup baik yaitu 120,42% meskipun realisasi dari target pembangunan embung kurang memenuhi target yang telah ditetapkan (53,33%). Pencapaian target ini karena telah didukung oleh keberhasilan beberapa program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang.

Bertambahnya luas lahan pertanian dan perkebunan yang teraliri oleh jaringan irigasi ini didukung dengan adanya program pengembangan jaringan irigasi pertanian/perkebunan melalui pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) seluas 1.300 Ha dan pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) seluas 200 Ha dengan mendapatkan alokasi anggaran dari DAK bidang Pertanian dan dana Tugas Pembantuan dari Kementerian

Pertanian Republik Indonesia, selain itu juga telah dilaksanakan pembangunan irigasi air tanah dangkal sebanyak 17 unit serta fasilitasi bantuan pompa air sebanyak 22 unit untuk kelompok tani dengan harapan dapat memberi dukungan terhadap kebutuhan jaringan irigasi pada budidaya pertanian maupun perkebunan.

Sedangkan untuk pembangunan embung pertanian tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 15 unit dengan realisasi hanya 8 unit, disebabkan karena kesulitan akan lokasi lahan untuk pembangunan embung dimana tidak ada ganti rugi tanah terhadap lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan embung pertanian, sehingga untuk sementara diarahkan pada tanah bengkok dan bondo deso. Sehingga untuk langkah kedepan perlu ditingkatkan lagi sosialisasi dan pembinaan di tingkat kelompok tani untuk memberikan penjelasan akan arti pentingnya pembangunan embung pertanian pada lahan sawah tadah hujan.

Sasaran 15 : Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III.18
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	Meningkatnya intensifikasi sumber – sumber pendapatan asli daerah.	89.947.696.000	103.304.514.980,86	114,85%

Intensifikasi Pendapatan Daerah yang dilakukan dengan kegiatan penekanan pada peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan, serta tunggakan tahun yang lalu (piutang), atau

langsung dengan surat tagihan dimaksudkan agar target sebesar Rp.89.947.696.000,00 tercapai.

Upaya meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi mematuhi kewajibannya membayar pajak, dan pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari dinas teknis pengelola PAD saat melakukan pemungutan / penagihan pada wajib pajak sejumlah 888 orang dan wajib retribusi sejumlah 3.763 orang tergolong lumayan efektif sehingga capaian 114,85% terpenuhi sampai dengan tahun anggaran 2012.

Ini bisa dilihat dari capaian perolehan Pendapatan Asli Daerah TA 2012 sebesar Rp103.304.514.980,86 atau 108,69% dari anggaran sebesar Rp95.041.791.800. Terkecuali hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan pajak dan retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah mencapai target dari indikator kinerja yang ada sebagai berikut:

Akun	2012		%	2011
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4=3/2	5
Pajak Daerah	17.063.722.000,00	21.691.251.109,00	17,12	14.568.408.017,00
Retribusi Daerah	23.136.304.700,00	26.290.263.055,00	113,63	21.051.282.763,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.739.706.000,00	3.318.450.860,00	57,82	2.678.745.388,00
Lain-lain PAD yang Sah	49.102.059.100,00	52.004.549.956,86	105,91	35.633.509.762,62
Jumlah	**95.041.791.800,00**	**103.304.514.980,86**	**108,69**	**73.931.945.930,62**

Sasaran 16 : Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III.19
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah.

No	Indikator sasaran	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah.	40,00%	86,41%	216,03%

Pengukuran realisasi atas berkurangnya piutang pajak/retribusi adalah dengan meningkatnya capaian penerimaan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah sampai dengan tahun anggaran 2012. Kisaran tersebut dapat terpenuhi dengan adanya efisiensi Pendapatan Asli Daerah.

Bentuk dari efisiensi Pendapatan Asli Daerah adalah optimalisasi sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan. Disamping adanya faktor dukungan dari atau kepada aparatur dan pelaksananya baik pimpinan maupun masyarakat dalam hal ini kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Maka optimalisasi tingkat efisiensi tersebut lebih diarahkan pada dilaksanakannya ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah dengan cara mendata obyek dan wajib pajak dan wajib retribusi yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak dan wajib retribusi yang mengalami perubahan baik dari sisi obyek atau subyek pajak dan retribusinya. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan pula dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif

antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah.

Dilihat dari daftar pokok piutang pajak sampai dengan tahun 2012 dengan piutang yang bisa tertagih adalah sebagai berikut :

Tahun	Pokok Piutang	Piutang Bisa Tertagih	%
Piutang Pajak			
2005	3.101.900	733.500	23,65%
2006	18.035.750	8.777.000	48,66%
2007	23.500.100	14.245.000	60,62%
2008	20.460.200	11.927.000	58,29%
2009	67.870.200	31.683.800	46,68%
2010	144.618.906	65.562.550	45,33%
2011	138.559.721	119.231.750	86,05%
2012	1.953.802.565	1.951.960.865	99,91%
Jumlah s.d 2012	2.369.949.342	2.204.121.465	93,00%
Piutang Retribusi			
s.d 2012	421.902,250,00	336.783.250,00	79,82%
Jumlah s.d 2012	421.902,250,00	336.783.250,00	79,82%
Rata-Rata Piutang Yang Bisa Tertagih			**86,41%**

Nilai rata-rata atas piutang yang bisa tertagih piutang pajak sebesar 93,00% dan piutang retribusi sebesar 79,82% adalah 86,41% sehingga capaian yang bisa terpenuhi sebesar 216,03%

Sebab adanya piutang tidak tertagih dikarenakan obyeknya tidak dapat terlacak untuk obyek pajak tahun lama tahun 2005 s.d 2007 atau subyek pajaknya sudah berubah atau berpindah tangan. Atau adanya pengaruh pasar sehingga target pendapatan daerah yang telah ditetapkan tidak bisa terpenuhi.

Namun secara makro target efisiensi atas piutang pajak/retribusi sebesar 40% dapat tercapai.

Wujud realisasi dari hasil optimalisasi efisiensi ini atas jumlah piutang yang bisa tertagih dapat dilihat pada Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2012 yang tercapai sebesar Rp103.304.514.980,86 meningkat sebesar Rp.29.372.569.050,24 dibandingkan perolehan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp73.931.945.930,62 .atau tercapai 39,73%

Prosentase sebesar 39,73% tersebut dapat dijelaskan dari sampel capaian Pendapatan Asli Daerah dari Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.20
Target Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi		Peningkatan Realisasi	
		Rp.	%	Rp.	%
2010	78.227.428.000,00	65.699.258.994,62	83,98%	0,00	0,00%
2011	83.354.852.000,00	73.931.945.930,62	88,70%	8.232.686.936,00	12,53%
2012	*95.041.791.800,00	103.304.514.980,00	108,69%	29.372.569.049,38	39,73%

**)Sumber data LRA unaudit LKPD TA 2012*

Dari jumlah perolehan PAD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.103.304.514.980,00 penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah menyumbang perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar

Rp.47.981.514.164,00 meningkat Rp.12.361.823.348,00 atau 34,71% dibandingkan dengan perolehan Tahun Anggaran 2011.

Tabel III.21
Target Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi		Peningkatan Realisasi	
		Rp.	%	Rp.	%
2010	38.655.047.551,00	32.530.703.071,00	84,16%	0,00	0,00%
2011	39.283.899.000,00	35.619.690.780,00	90,67%	3.088.987.709,00	9,50%
2012	*40.200.026.700,00	47.981.514.164,00	119,36%	12.361.823.384,00	34,71%

**)Sumber data LRA unaudit LKPD TA 2012*

Peningkatan perolehan pendapatan atas pajak daerah dan retribusi daerah akibat dilaksanakannya efisiensi penarikan Pendapatn Asli Daerah dilihat dari grafik capaian perolehan dari tiga tahun terakhir sebagai berikut :

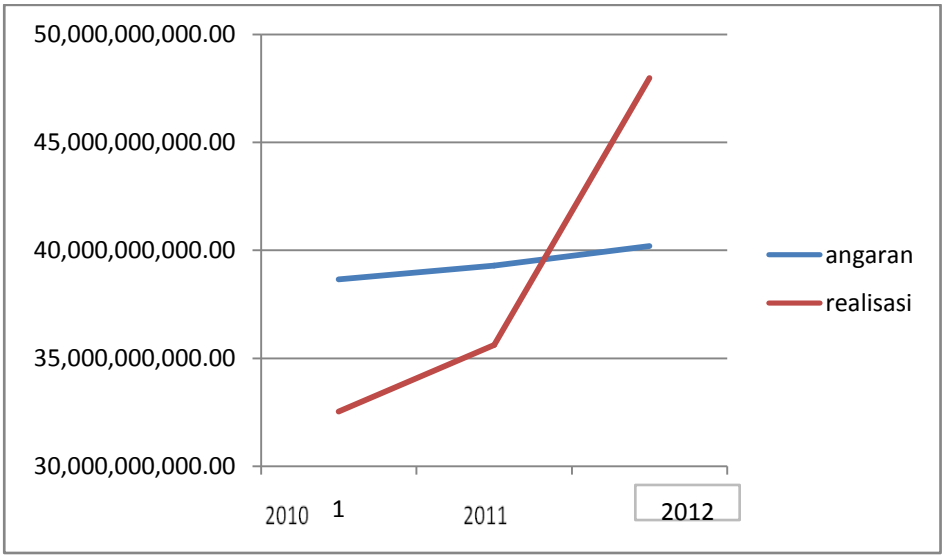

GRAFIK PENINGKATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TA. 2012

Sasaran 17 : Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III.22
Capaian Indikator sasaran Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat	3.071.211.000,00	3.318.450.860,00	108,05

Bentuk dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan mencoba menggali sumber-sumber baru pendapatan daerah yang tidak membebani masyarakat. Dan untuk saat ini bentuk optimalisasi dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah diluar penerimaan dari pajak dan retribusi adalah dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah yang ada di kabupaten Rembang ditambah dengan penanaman modal di Bank Jateng Cabang Rembang sebagai bentuk investasi permanen yang merupakan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan nilai capaian kinerja yang telah ditetapkan tercapai 108,05%.

Ini tercermin dari nilai perolehan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk TA 2012 capaian perolehannya sebesar Rp3.318.450.860,00 atau 57,82% dari anggaran sebesar Rp5.739.706.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp639.705.472,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar Rp2.678.745.388,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Rembang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal

pada PD BPR BKK, PD Apotek Daerah dan PT RBSJ serta pembagian deviden PT.Bank Jateng Tahun Buku 2011, dengan rincian sebagai berikut:

BUMD	2012		%	2011
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4=3/2	5
PT Bank BPD Jateng	4.411.298.000,00	1.726.213.763,00	39,13	1.764.682.119,00
PD BPR-BKK	1.290.408.000,00	1.290.408.797,00	100,00	875.913.269,00
PD Percetakan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PD Apotek Daerah	38.000.000,00	39.250.000,00	103,29	38.150.000,00
PT RBSJ	0,00	262.578.300,00		0,00
Jumlah	**5.739.706.000,00**	**3.318.450.860,00**	**57,82**	**2.678.745.388,00**

Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

Tabel III.23
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Angka kelulusan SD/MI	99,15%	99,99%	100,84
2	Angka kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs	93,77%	99,03%	105,60
3	Kelulusan UN SMA/MA/SMK	88,75%	99,97%	112,64
4	TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah	54%	56%	103,70
5	SD/MI Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	99,78%	100%	100,22
6	SMP/MTs/SMA/SMK/MA melaksanakan MBS dengan baik	100%	100%	100
7	Penerapan sistem Manajemen mutu (SMM) ISO 9001 -2000	38,5%	6,59%	17,12
RATA – RATA				76,87%

Rata-rata persentase pencapaian target untuk sasaran 18 adalah 76,87 %. Enam dari tujuh indikator yang terdapat pada sasaran 18 telah dicapai dan mencapai lebih dari 100%. Hanya ada satu indicator yang pencapaiannya masih jauh dari target, yaitu indikator ketujuh ‘ Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 – 2000 hanya tercapai 17,12 %.

Hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, manajemen yang berkaitan dengan indikator pencapaian ISO 9001 – 2000. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000 ini dilakukan pada jenjang pendidikan menengah yaitu pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sampai dengan Tahun 2012 pada satu sisi hanya ada empat SMK yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000. Sedangkan di sisi yang lain di Kabupaten Rembang terjadi peningkatan jumlah sekolah menengah kejuruan, yang dipicu oleh adanya kebijakan untuk meningkatkan rasio jumlah siswa pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan menjadi 30% : 70%.

Dari data yang ada terdapat 23 sekolah menengah kejuruan yang ada di Kabupaten Rembang.Sebagian besar SMK tersebut adalah sekolah-sekolah yang baru saja didirikan (sekitar 3 tahun).Dengan kondisi dimana dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia dan sistem manajemen pendidikan yang relatif baru mencapai batas syarat minimal, menyebabkan sekolah-sekolah tersebut belum bisa mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000

Kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran 1 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Ujian SD/SMP/SMA/SMK
2. Bantuan MBS SD/SMP
3. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS di Satuan dikdas
4. Pengembangan Materi Belajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan TIK

5. Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan TIK
6. Peningkatan mutu siswa SMA/SMK
7. Penelitian IPA, IPS siswa SMA
8. Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS siswa SMA
9. Bantuan Penjaminan Mutu SMP RSBI
10. Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS siswa SMA RSBI
11. Bantuan fasilitasi penyelenggaraan UN

Sasaran 19 : Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi

Capaian kinerja sasaran Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

Tabel III.24
Capaian kinerja sasaran Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	37,54%	45,58%	121,41
2	Guru SD yang sertifikasi	51,54%	46,07%	89,38
3	Guru SD yang layak mengajar	52,18%	71,60%	137,21
4	Guru SMP memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	86,49%	92,06%	106,44
5	Guru SMP yang sertifikasi	61,38%	48,15%	78,44
6	Guru SMA/SMK yang sertifikasi	46,46%	28,21%	60,71
7	Guru SMA/SMK layak mengajar	93,33%	94,32%	101,06
8	Meningkatnya tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/ kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan	81,25%	82,05	100,98
RATA – RATA				99,44%

Rata-rata pencapaian target pada sasaran 19 adalah 99,44 %. Dari sisi pencapaian kinerja dengan indikator jumlah atau % guru yang layak mengajar pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Rembang dapat dilihat telah mencapai angka di atas 100%. Hal ini berarti bahwa target untuk memenuhi guru pada semua jenjang pendidikan yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan telah dicapai.Keberhasilan ini banyak ditunjang oleh adanya keberhasilan program penyetaraan S1 melalui Universitas Terbuka dan adanya program pemberian subsidi kepada guru yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1.

Akan tetapi untuk pencapaian kinerja dengan indikator % guru pada semua jenjang pendidikan yang telah bersertifikasi masih berada di kisaran angka 60,61% sampai dengan 89,39%. Masih rendahnya tingkat pencapaian kinerja tersebut disebabkan oleh adanya kuota dari pemerintah pusat untuk pemberian sertifikat guru yang menyebabkan tambahan jumlah guru yang mendapatkan sertifikat menjadi terbatas.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kedua adalah:

1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
2. Pembinaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
3. Pendidikan Lanjutan Bagi pendidik untuk memenuhi standart kualifikasi
4. Pengembangn mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kepandidikan
5. Pengembangan system penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
6. Peningkatan manajerial kepala SD/SMP/SMA/SMK
7. Bantuan fasilitasi peningkatan Bahasa Inggris guru SMA RSBI
8. Bantuan fasilitasi peningkatan Bahasa Inggris guru SMK RSBI
9. Bantuan peningkatan kualifikasi ke S1 pendidik formal
10. Bantuan peningkatan kualifikasi ke S1 pendidik PAUD
11. Bantuan penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal

12. Bantuan pengembangan profesi pendidik formal
13. Bantuan pengembangan profesi pendidik formal
14. Bantuan pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik

Sasaran 20 : Terwujudnya penyedia sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan

Capaian kinerja sasaran terwujudnya penyedia sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

Tabel III.25
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya penyedia sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	36%	86,48%	240,22
2	Ruang kelas SD/MI sesuai standar	69,84%	80,06%	114,63
3	SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar	42,13%	54,32%	129,03
4	SD/MI memiliki Laboratorium IPA sesuai standar	10,51%	4,09%	38,91
5	SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar	81,93%	78,72%	96.08
6	SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan Komputer	60,84%	46,49%	76,41
7	Lembaga kursus/pelatihan/ kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan	61,08%	61,48	100,65
RATA – RATA				113,69%

Rata-rata pencapaian target pada sasaran 20 adalah 113,69 %. Keberhasilan pencapaian ini ditunjang oleh adanya komitmen penuh dari pemerintah dengan memberikan dukungan anggaran baik dari pemerintah pusat (melalui DAK bidang pendidikan), pemerintah provinsi (melalui bantuan keuangan provinsi) serta dari Pemerintah Kabupaten Rembang (melalui alokasi anggaran pada APBD) yang cukup untuk penyediaan sarana

prasarana bidang pendidikan.Selain itu dukungan sumber daya manusia yang mengelola kegiatan-kegiatan tersebut juga cukup baik sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi efektif dan efisien.

Secara rata-rata sebenarnya sudah melebihi target, tetapi kalau dilihat per indicator masih ada tiga indicator yang belum memenuhi target, bahkan ada satu indicator yang jauh dari target yang dicanangkan, yaitu indicator keempat, SD/ MI memiliki laboratorium IPA sesuai standar hanya mencapai 38,91 %. Hal ini disebabkan pembangunan laboratorium di SD/MI hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Adapun fokus pemerintah saat ini baru pada memperbaiki ruang kelas yang rusak. Semoga pada tahun-tahun mendatang perhatian pemerintah sudah mengarah kepada pembangunan sarana pendudkung pendidikan antara lain laboratorium IPA.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ketiga adalah:

1. Pembangunan sarana dan prasarana bermain
2. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
3. Pembangunan perpustakaan sekolah
4. Bantuan Pengembangan sarana prasarana PAUD Formal
5. Bantuan Pengadaan Alat Bermain di Luar
6. Bantuan Pengadaan alat Bermain di Dalam
7. Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB
8. Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB
9. Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB

Sasaran 21 : Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan dapat dilihat dari indikator-indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.26
Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya jumlah lembaga PAUD dan TK	460	432	93,91
2	APK PAUD	84,50%	77,07%	91,21
3	APK SD/MI	101,92%	99,50%	97,62
4	APK SMP/MTs	71,34%	96,98%	135,94
5	APK SMA/SMK/MA	60,40%	65,86%	109,03
6	APM SMP/MTs	71,34%	67,06%	94,05
7	APM SMA/SMK/MA	45,11%	44,44%	98,51
8	Penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C	95,65%	87,72%	91,71
9	Angka melek huruf	99,70%	99,72%	100
10	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/Kejuruan	78%	82,84%	106,20
RATA – RATA				101,82%

Rata-rata pencapaian target pada sasaran 21 adalah 101,82 %. Secara keseluruhan pencapaian sasaran 21 ini sudah di atas 90 %. Bahkan ada yang mencapai 135 %.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran keempat adalah :

1. Penyediaan dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLB Negeri SMP/SMPLB
2. Penyelenggaraan operasional Sekolah Gratis SMP/SMA/SMK Negeri
3. Penyelenggaraan operasional SKB Negeri
4. Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga PNF
5. Penyelenggaraan paket B Setara SMP
6. Penyelenggaraan paket C Setara SMA
7. Bantuan fasilitasi keaksaraan lanjutan

Sasaran 22 : Tersedianya beasiswa bagi penduduk

Capaian kinerja sasaran tersedianya beasiswa bagi penduduk dapat dilihat dari indikator rendahnya angka putus sekolah yang mencerminkan bahwa mereka yang putus sekolah diakibatkan oleh kekurangan biaya. Capaian indikator selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel III.27
Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya beasiswa bagi penduduk

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Angka Putus Sekolah SD	0,04%	0,03%	133
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,22%	0,16%	137,5
3	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,31%	0,38%	81,5
4	Penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/ pelatihan/kelompok belajar usaha/magang (%)	31,33%	20,5%	65,43
Rata-rata				104,36

Rata-rata pencapaian target pada sasaran 22 adalah 104,36 %. Ada dua indikator pada sasaran kelima yang sudah mencapai target yaitu indicator ke tercapainya target indikator tersebut adalah angka putus sekolah di SD dan angka putus sekolah di SMP/MTs. Untuk angka putus sekolah di SMA/SMK masih tinggi. Hal ini memang disebabkan berbagai factor, antara lain karena tuntutan ekonomi sehingga anak usia SMA/SMK lebih senang bekerja mencari nafkah daripada sekolah.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kelima adalah:

1. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
2. Bantuan beasiswa siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu

Sasaran 23 : Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dapat dilihat indkator-indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.28
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Lulusan SMK diterima didunia kerja sesuai dengan keahliannnya	40%	40%	100
2	Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja	32,13%	27,8%	85,5
3	Lulusan program paket C dapat memasuki dunia kerja	35,82%	35,66	99.6
Rata-rata				95,03

Rata-rata pencapaian target pada sasaran 23 adalah 95,03 %. Hanya satu indikator pada sasaran pertama yang sudah mencapai target.Indikator tersebut adalah lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya. Adapun indikator lainnya belum mencapai target karena minimnya lapangan kerja dari lulusan kursus dan paket C.

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kedua adalah:

1. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industry
2. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
3. Bantuan Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja SMK
4. Bantuan fasilitasi Carier Center SMK
5. Bantuan Fasilitasi Bussines Center SMK
6. Bantuan fasilitasi pemasaran tamatan SMK
7. Bantuan kursus kewirausahaan desa
8. Bantuan kelembagaan kursus dan pelatihan

Sasaran 24 : Tersedianya tenaga medis yang memadai

Capaian kinerja sasaran tersedianya tenaga medis yang memadai dapat dilihat dari indikator-indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.29
Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya tenaga medis yang memadai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Rasio dokter Spesialis per 100.000 penduduk	6 per 100 rb pendd	3,1 per 100 rb pendd	51,67
2	rasio dokter per 100.000 per penduduk	40 per 100 rb pendd	11,64 per 100 rb pendd	29,10
3	rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	11 per 100 rb pendd	1,8 per 100 rb pendd	16,36
Rata - rata				**32,38**

Untuk mengetahui pencapaian sasaran tersedianya tenaga medis yang memadai dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu rasio dokter spesialis, rasio dokter, rasio dokter gigi per 100.000 penduduk. Adapun capaian indikator tersebut rata – rata adalah 32,38 % (kurang berhasil) . Walaupun sasaran tersedianya tenaga medis sangat berkaitan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya tenaga medis, namun ada beberapa hambatan dan kendala dalam pemenuhannya yaitu adanya kebijakan moratorium Pemerintah Pusat tentang pengadaan Pegawai baru.

Sasaran 25 : Tersedianya obat-obatan yang memadai

Capaian kinerja sasaran tersedianya obat-obatan yang memadai dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.30
Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya obat-obatan yang memadai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100 %	98 %	98,00
Rata – rata				**98,00**

Untuk pencapaian sasaran ketersediaan obat – obatan yang memadai dapat dilihat dari indikator ketersediaan obat sesuai kebutuhan bagi fasilitas pelayanan kesehatan baik di Puskesmas Pembantu, Puskesmas, maupun Rumah Sakit, dimana capaian kinerjanya telah mencapai 98 %. (berhasil) . Selain indikator tersebut dalam melihat ketersediaan obat – obatan yang memadai juga dapat dilihat dari pengadaan obat esensial yang mencapai 98 %, pengadaan obat generik mencapai 98 % serta penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan yang telah mencapai 94,12 %.

Keberhasilan sasaran ketersediaan obat – obatan yang memadai ditunjang dengan adanya Program obat dan perbekalan kesehatan, dengan adanya kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan Rumah Sakit.

Sasaran 26 : Tersedianya peralatan medis yang memadai.

Capaian kinerja sasaran tersedianya peralatan medis yang memadai dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III.31
Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya peralatan medis yang memadai.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
	Ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	90 %	85 %	94,44
Rata - rata				**94,44**

Dalam pencapaian sasaran ketersediaan peralatan medis yang memadai dapat dilihat dari indikator ketersediaan alat kesehatan sesuai standart, dimana capaian kinerjanya adalah 94,44 % (berhasil). Keberhasilan indikator ini berkaitan dengan Program Pengadaan peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya, melalui kegiatan Pengadaan peralatan medis dan non medis untuk puskesmas dan Puskesmas pembantu.

Sasaran 27 : Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.32
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)
1	Kasus Kematian Bayi (AKB)	145	ks	150	ks	96,55
2	Kasus Kematian Ibu (AKI)	8	ks	13	ks	37,5
3	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	%	100	%	100,00
4	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	85	%	97,96	%	115,25
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :					
	a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk	2	per 100 rb pendd < 15 th	1,87	per 100 rb pendd < 15 th	93,50

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)
	b. Cakupan balita dengan Penemuan penderita Pneumonia yang ditangani	80	%	100	%	125,00
	c. Penemuan TB BTA positif (CDR)	70	%	50,14	%	71,63
	d. Angka Kesembuhan TB Paru	85	%	81,69	%	96,11
	d. Penderita DBD yang ditangani	100	%	100	%	100,00
6	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	87	%	86,98	%	99,98
7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	65	%	100	%	153,85
8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85	%	99,85	%	117,47
9	Cakupan pelayanan nifas	85	%	97,44	%	114,64
10	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	65	%	100	%	153,85
11	Cakupan peserta KB aktif	80	%	84,06	%	105,08
13	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100	%	100	%	100,00
Rata – rata						**105,02**

. Secara umum pengelolaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sudah sangat berhasil yang dapat dilihat dari 16 indikator yang pencapaian indikator kinerja sebesar 105,02 %. Namun apabila dilihat dari capaian per indikator masih ada beberapa indikator yang belum berhasil, diantaranya adalah : masih tingginya kasus kematian ibu dimana capaian kinerjanya

adalah 37,5 % (kurang berhasil), masih rendahnya cakupan penemuan TB BTA positif dimana capainnya baru 71, 63 (cukup berhasil).

Untuk meningkatkan Pengelolaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Rembang , Upaya yang ditempuh diantaranya adalah dengan :

1. Peningkatan Manajemen kesehatan yang dinamis, akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna untuk memantapkan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang bertanggung jawab.
2. Peningkatan Pemberdayaan masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat (TP PKK, PLAN, ormas lainnya). dengan menjalin kemitraan dalam pembangunan kesehatan baik lintas sektoral maupun lintas program.
3. Peningkatan beberapa kegiatan inovasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit dr. R. Soetrasno dengan kegiatan Akreditasi Puskesmas maupun Akreditasi Rumah Sakit dan mengkiuti ISO.

Sasaran 28 : Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.33
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)
1	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100	%	100	%	100,00
2	Cakupan kunjungan rawat jalan	15	%	63,29	%	421,93
3	Cakupan kunjungan rawat inap	1,5	%	2	%	133,33
4	Perluasan Puskesmas	6	unit	6	unit	100,00
5	Cakupan Desa Siaga Aktif	69,39	%	100	%	144,11
Rata – rata						**218,42**

Untuk melihat sejauh mana pencapaian sasaran meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan , dapat dilihat dari 5 indikator kinerja dimana capaiannya adalah 218,42 % (sangat berhasil), Keberhasilan ini dapat dilihat dari cakupan pemanfaatan Puskesmas oleh Masyarakat dimana 63,29 % masyarakat telah memanfaatkan Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan dari target yang ditetapkan 15 %. Sehingga pencapaian kinetjanya adalah 421,93 %. Yang merupakan sumbangan terbesar dalam penghitungan capaian kinerja.

Keberhasilan sasaran meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan ini tidak terlepas dari Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) yang merupakan salah satu Program Empat Pilar Pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau. Dalam rangka Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan juga telah dilaksanakan kegiatan Perluasan 6 Unit Puskesmas yaitu di Puskesmas Gunem, Puskesmas pamotan, Puskesmas Bulu, puskesmas kaliori dan Puskesmas Kragan I.

Sasaran 29 : Tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

Capaian kinerja sasaran Tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.34
Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

NO	I NDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	100 %	100 %	100
2	Cakupan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan rentan.	100 %	100 %	100
Rata - rata				**100,00**

Untuk melihat pencapaian sasaran tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat miskin dapat dilihat dari indikator cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan dan cakupan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan rentan, dimana capaiannya adalah 100 % (berhasil). Keberhasilan ini berhubungan dengan Program Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Program jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui Jaminan Kesehatan Rembang Sehat yang berlaku bagi Masyarakat miskin yang tidak masuk Jamkesmas (Non Kuota Jamkesmas). dan Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Kesehatan RI dengan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)..

Sasaran 30 : Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.35
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Produk TTG Lokal unggulan yang dipamerkan pada event tingkat nasional	1 paket	1 paket	100 %
Rata-rata			100 %

Sasaran meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat dapat tercapai 100 %. Indikator jumlah Produk TTG Lokal unggulan yang dipamerkan pada event tingkat nasional telah dilaksanakan pada tanggal 8 – 15 Oktober 2012 di Batam. Kaupaten Rembang dalam Gelar TTG Nasional di Batam tersebut menampilkan prototype mobil berbahan bakar alternatif karya siswa SMKN Sedan. Di samping itu juga mengenalkan alat penjernih air karya SMKN1 Rembang. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terbatasnya dana

untuk penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan pameran yang cukup lama dan jauh sehingga membutuhkan anggaran yang besar.

Sasaran 31 : Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama

Tugas pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di segala bidang salah satunya diwujudkan melalui fasilitasi peningkatan sarana peribadatan dan pendidikan agama dengan selalu tunduk pada aturan terkait yaitu permendagri nomor 32 Tahun 2011. Jenis sarana peribadatan dan pendidikan agama yang selama ini disupport oleh pemerintah meliputi Masjid, mushola, TPQ, Madin, Madrasah Ibtidaiyah, MTs, dan Pondok Pesantren. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama sebagaimana tertuang dalam Tabel di bawah ini.

Tabel III.36
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Sarana Peribadatan dan Pendidikan Agama

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah sarana peribadatan dan pendidikan agama yang dibantu	262 unit	400 unit	152,67%

Dari target bantuan kepada sarana peribadatan dan pendidikan agama sejumlah 262 unit terealisasi sebesar 400 unit atau mencapai 152,67% (kategori sangat berhasil). Jumlah anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebesar Rp. 5.464.000.000,- melalui belanja tidak langsung APBD Kab. Rembang TA 2012.

Sasaran 32 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.37
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah peserta diklat structural	47 org	43 org	91,49 %
Jumlah peserta diklat fungsional	150 org	51 org	34 %
Rata-rata			62,745 %

Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai hanya dapat tercapai 62,745 %. Penyelenggaraan diklat struktural dilaksanakan dengan dua cara yaitu mengirim peserta ke Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan pola kemitraan dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. Untuk Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Rembang mengirim 1 (satu) peserta untuk mengikuti diklatpim II dan 1 peserta untuk Diklatpim III serta menyelenggarakan diklatpim IV dengan peserta sebanyak 40 orang. Dibandingkan dengan pegawai yang harus memiliki pendidikan dan pelatihan, untuk setiap tahunnya jumlah peserta diklatpim masih sangat kurang. Masih banyak pejabat struktural yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Kemudian untuk diklat fungsional pada tahun 2012 hanya memberangkatkan 51 orang dari target 150 orang. Hal ini disebabkan anggaran yang tersedia di Badan Kepegawaian Daerah untuk kegiatan diklat fungsional sangat rendah. Kedepan perlu mengusulkan anggaran yang lebih besar dalam APBD serta mengirim peserta diklat fungsional yang dibiayai oleh pemerintah provinsi maupun pusat.

Sasaran 33 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.38
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah dokumen parahita yang tersusun	1 paket	1 paket	100 %
Jumlah posyandu unggulan yang terbentuk	6 kelompok	6 kelompok	100 %
Jumlah kader posyandu yang terlatih	112 kader	84 kader	
Jumlah data posyandu yang tersusun	1 buku	1 buku	100 %
Jumlah sarana posyandu yang tersedia	30 unit	30 unit	100 %
Jumlah rapat kordinasi pokjanal posyandu tingkat kecamatan	14 kec	14 kec	100 %
Jumlah orang tua yang mendapatkan pelatihan tentang metode pengajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus	100 orang	100 oran	100 %
Pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat (per tahun)	1	1	100 %
Pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar (per tahun/orang)	1 keg/75 o	1 keg/75 org	100 %
Pelatihan ketrampilan bagi eks penyakit sosial (per tahun)	1 keg	1 keg	100 %
Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	50	50	100 %
Pelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi keluarga fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi (kegiatan/tahun)	1	1	100 %
Lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi	50,30	20	39,76 %
lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah	92,50%	100 %	108,11 %
Rata-rata			**99,85 %**

Untuk melihat capaian sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja / ketrampilan bagi masyarakat dapat dilihat dari 14 (empat belas indikator) yang telah di tetapkan, dengan capaian

sebesar 99,85 % (berhasil). Keberhasilan ini sangat berkaitan dengan beberapa Program pemerintah diantaranya :

1. Program Pemerintah dalam Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak,.

   Kegiatan yang mendukung adalah : Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak., Penguatan Pokjanal Posyandu. Pelatihan Peningkatan anak berkebutuhan khusus kesetaraan gender.
2. Program penanggulangan kemiskinan dengan kegiatan :
   a. Pendampingan PNPM mandiri Pedesaan
   b. Pendampingan Program keluarga harapan.
   c. Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir ,miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan : Penyelenggaraan pelatihan kerja dan pengembangan usaha mandiri.

Sasaran 34 : Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan

Perwujudan Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan serta Terbangunnya jalan poros desa dan kecamatan dilaksanakan pada penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum yang meliputi antara lain pembangunan kebinamargaan atau jalan jembatan. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrasturktur pedesaan dan wilayah cepat tumbuh menjadi prasyarat utama dalam mendorong pengembangan wilayah sebagaimana telah menjadi titik berat pilar pertama prioritas pembangunan daerah yaitu melalui program penyediaan dan peningkatan infrastruktur ke-PU-an. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran melalui indikator persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebagaimana tertuang dalam table III.39.

Tabel III.39
Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	persentase panjang jalan dalam kondisi baik	85%	54.70%	**64.35%**

Secara akumulatif Prosentase infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik dimana dari target 85% terealisasi 54,70% atau mencapai sebesar 351,58 km dari seluruh jalan Kabupaten 642,75 km sehingga capaian Sasaran sebesar 64,35 %, termasuk dalam kategori cukup berhasil.

Adapun program yang mendukung kinerja sasaran ini adalah program pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan dalam memperlancar mobilitas aktifitas sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Hasil kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan antar kecamatan dan desa di kabupaten Rembang tahun 2010 – 2012 sebagai berikut :

Tabel III.40
Pemeliharaan Dan Peningkatan Jalan Dan Jembatan Antar Kecamatan Dan Desa Di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012

No	Kegiatan	2010	2011	2012
1	Jalan dan Jembatan Kabupaten			
	- Pemeliharaan Jalan Kabupaten (km)	154,53	257,10	6,11
	- Peningkatan Jalan Kabupaten (km)	30,01	385,65	15,87
	- Penggantian Jembatan (unit)	-	7	-
	- Pemeliharaan Jembatan (unit)	3	6	2
	- Jalan Hotmix (km)	240,26	252,57	257,69

Sumber : DPU Kabupaten Rembang, 2012

Kondisi jalan Kabupaten Rembang hingga akhir tahun 2012 secara umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.41
Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2010-2012

NO	URAIAN	TAHUN		
		2010	2011	2012
1	Panjang jalan kabupaten (km)	642.75	642.75	642.75
2	Kondisi jalan baik	346.61	321.75	351.58
3	Kondisi jalan sedang	90.31	161.38	149.81
4	Kondisi jalan rusak ringan	89.93	83.15	65.85
5	Kondisi jalan rusak berat	115.9	76.47	75.51

Sumber : DPU Kabupaten Rembang, 2012

Permasalahan dalam upaya mewujudkan jalan dan jembatan dalam kondisi baik di kabupaten meliputi :

1. pada ruas jalan tertentu terjadi kelebihan beban muatan kendaraan.
2. Keterbatasan personil dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan.
3. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun.

Untuk mengatasai permasalahan-permasalahan tersebut di atas, diupayakan beberapa alternatif pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan guna pemasangan rambu batas muatan.
2. Pemanfaatan seoptimal mungkin dan Penambahan jumlah personil serta sarana mobilitas penanganan program – program ke-PU-an.
3. Mengusahakan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun.

- Perbaikan Jalan Akses Menuju Objek Wisata Pantai Tasikharjo, Kec. Rembang

0 %

50 %

100 %

Sasaran 35 : Meningkatnya kualitas saluran irigasi

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas saluran irigasi melalui program optimalisasi sumber daya air, yang diarahkan untuk peningkatan ketersediaan air baku dan mengoperasikan prasarana dan sarana jaringan sumber daya air untuk keperluan irigasi pertanian dan untuk fungsi pengairan lainnya. Hasil optimalisasi sumber daya air di kabupaten Rembang tahun 2010 – 2012 sebagai berikut :

Tabel III.42
Optimalisasi Sumber Daya Air Di Kabupaten Rembang
Tahun 2010 – 2012

No	Kegiatan	2010	2011	2012
1	Rehabilitasi			
	- Bendung	5 buah	23 buah	8 buah
	- Embung	10 buah	29 buah	7 buah
	- Bangunan Air	17 buah	16 buah	9 buah
	- Saluran	12.614,36 m	6.389,72 m	10.572,2 m
2	Pembangunan / Pembuatan			
	- Bendung	-	-	-
	- Embung	1 buah	9 buah	-
	- Bangunan Air	-	-	2 buah
	- Saluran	2.610,514 m	1.256,142 m	1.411,96 m
3	Pemeliharaan Rutin			
	- Bendung	8 bh	6 buah	6 buah
	- Embung	2 bh	-	1 buah
	- Bangunan Air	-	1 buah	10 buah
	- Saluran	21.420,80 m	443,05 m	10.732,91 m
4	Normalisasi Sungai			
	- Normalisasi Sungai	-	-	17.995,98 m
	- Bangunan Air	-	-	1 buah

Sumber : DPU Kabupaten Rembang, 2012

Dari upaya yang telah dilakukan sebagaimana tersebut di atas, dicapai kinerja sasaran Meningkatnya kualitas saluran irigasi sebagai berikut :

Tabel III.43
Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas saluran irigasi

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Luas Irigasi kabupaten kondisi baik	50 %	47,61 %	95,22
1.	% peningkatan sawah dengan irigasi teknis	10 %	7.44%	74,40
Rata-rata				84,81%

Pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi didukung dengan saluran irigasi primer, sekunder dan tersier (saluran yang langsung menuju sawah/ lahan pertanian). Panjang saluran irigasi primer Kabupaten Rembang pada tahun 2012 adalah 130.953 km, sedangkan saluran irigasi sekunder 119.499 km dan saluran irigasi tersier sepanjang 36.588 km. capaian kinerja indikator saluran irigasi dalam kondisi baik mencapai 95,22% dari target 50% tercapai 47,61%. Sementara dari luas persawahan sebesar 29.058 ha, sawah yang terairi dengan sarana pengairan teknis sebanyak 7,44%, sedangkan yang menggunakan sarana irigasi setengah teknis sebanyak 12,1%, dan lainnya (80,46%) masih tergantung dengan air hujan (tadah hujan). Secara akumulatif capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas saluran irigasi terealisasi 84,81% termasuk dalam kategori berhasil.

Adapun Permasalahan utama untuk mewujudkan Meningkatnya kualitas saluran irigasi antara lain minimnya curah hujan yang mengakibatkan ketersediaan air baku untuk air irigasi yang tidak mencukupi dan masih kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun. Sedangkan upaya untuk mengatasi hal ini adalah melakukan penghematan penggunaan air dan melaksanakan layanan pemberian air

irigasi secara giliran serta mengusulkan anggaran untuk meningkatkan laju pembangunan melebihi laju kerusakan saluran.

Sasaran 36 : Meningkatnya kualitas saluran drainase

Salah satu upaya dalam Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrasturktur pedesaan dan wilayah cepat tumbuh adalah melalui perbaikan kualitas saluran drainase perkotaan. Program kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Gorong-Gorong yang ditempuh melalui kegiatan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong. Perbaikan kualitas saluran drainase yang dikelola oleh DPU meliputi proses pembangunan saluran drainase akibat perkembangan wilayah kota dan pemeliharaannya.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas saluran drainase melalui indikator-indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel III.44
Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas saluran Drainase

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	% wilayah yang memiliki drainase	50	80	160.00
2	% Drainase dalam kondisi baik	60	55.84	93.07
3	Penilaian adipura	piala	piala	100
4.	Prosentase RTH Kawasan Perkotaan	10	7.78	77.80
Rata-rata				**107,72%**

Indikator persentase wilayah yang memiliki drainase menunjukkan capaian kinerja sangat berhasil yaitu mencapai 160 %. Hampir seluruh wilayah perkotaan di Kabupaten Rembang telah terfasilitasi sarana drainase, beberapa wilayah yang belum pada umumnya dalah wilayah pemukiman baru/pengembangan.

Implementasi P2KH melalui peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Rembang sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana 30% wilayah kota/kawasan perkotaan berupa RTH. Meskipun capaian penataan RTH di Kawasan Perkotaan Rembang masih relatif kecil sebesar 77,80% yang termasuk dalam kategori cukup berhasil yaitu target 10% terealisasi 7,78% atau seluas 661,478 ha dari luas kawasan perkotaan di Kabupaten Rembang seluas 8.502,717 ha. Namun demikian perwujudan RTH pada tahun tahun berikutnya berusaha mewujudkan minimal 30% dari kawasan perkotaan di Kabupaten Rembang yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan keterpaduan program kegiatan sebagai pelaksanaan urusan bidang lingkungan hidup, urusan bidang pekerjaan umum, dan urusan bidang penataan ruang yang didukung stakeholders terkait kota hijau termasuk penguatan kapasitas dan pemberdayaan komunitas hijau di Kabupaten Rembang dan peran aktif seluruh masyarakat Kabupaten Rembang.Capaian kinerja sasaran secara akumulatif mencapai 107,72% atau sangat berhasil. Hal ini dikuatkan dengan diperolehnya penghargaan adipura untuk Kabupaten Rembang pada Tahun 2012 ini.

Sasaran 37 : Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya *sea front city*

Konsepsi *sea front city* dibangun melalui upaya Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut yang berbasis ekosistem dan kelestarian daya dukung lingkungan. Pada tahun 2012 upaya mewujudkan konsepsi ini dikonsentrasikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Melalui program Peningkatan & pengembangan Sarana dan prasarana perikanan tangkap dengan total anggaran mencapai Rp. 32.750.172.000,-, telah dilakukan kegiatan reklamasi, pembangunan Dermaga/Jetty, Pembangunan TPI dan cold storage di PPI Tasikagung.

Capaian kinerja Sasaran Terbangunya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya sea front city didekati dari pengukuran dua indikator yaitu Jumlah investor bidang kelautan dan perikanan dan Jumlah hasil raman TPI dengan hasil sebahai berikut :

Tabel III.45
Capaian Kinerja Sasaran Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya *sea front city*

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah investor bidang kelautan dan perikanan	4	4	100,00%
2	Jumlah raman TPI	300.000.000.000	336.198.863.000	112,07%
Rata-rata				**106,03%**

Bertambahnya sarana prasarana yang mendukung aktivitas produksi perikanan tangkap, diharapkan akan menarik minat para investor bidang perikanan untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Rembang. Target jumlah investor bidang kelautan dan perikanan sebanyak 4 investor dapat terpenuhi. Sementara aktivitas perikanan tangkap juga menunjukkan peningkatan dengan tercapainya target 112,07% dari target senilai Rp. 300.000.000.000,- tercapai Rp. 336.198.863.000. Data produksi penangkapan perikanan laut yang dihasilkan dari pelelangan di 10 TPI yang terdapat di Kabupaten Rembang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.46
Produksi dan Raman TPI di Kabupaten Rembang Tahun 2012

No	Nama TPI	Produksi (Kg)	Raman (Rp)
1	Tunggulsari	5.118	110.780.000
2	Tanjungsari	2.381.670	7.575.321.000
3	Tasikagung I	20.989.137	135.159.955.000
4	Tasikagung II	13.947.190	35.357.640.000
5	pasarbanggi	8.782	87.820.000
6	Pangkalan	8.138	81.380.000
7	pandangan	616.741	2.855.059.000
8	Karanglincak	20.246	119.307.000
9	Bakung	-	-
10	Karanganyar	8.041.265	80.376.020.000
11	Sarang	12.603.015	74.475.581.000
12	Binangun	-	
	Jumlah	**58.621.302**	**336.198.863.000**

Oleh karenanya capaian kinerja sasaran Terbangunya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya sea front city yang tercapai 106,03% termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Sasaran 38 : Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III.47
Capaian kinerja Sasaran Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah kelompok Pokwasmas	5	5	100 %

Terkait dengan sasaran terwujudnya pemberdayaan masyarakat pesisir dengan indikator kinerja jumlah kelompok Kelompok Masyarakat Pengawas mencapai 100 %. Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan dana dari APBD dan APBN dengan memberikan banyak kegiatan yang bersifat dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah pesisir sehingga dapat mencapai visi yaitu terwujudnya kelautan dan perikanan Rembang yang unggul dan maju untuk kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang dapat langsung dirasakan oleh masyakat salah satunya adalah ditunjuknya Kabupaten Rembang sebagai salah satu kawasan Minapolitan Nasional baik di bidang ekonomi kemasyarakatan yaitu PUGAR maupun Bantuan Langsung lainnya yaitu, PUMP bidang Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan dengan adanya kegiatan PNPM Mandiri di Kabupaten Rembang

Sasaran39 : Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan

Tingginya potensi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang tidak serta merta mengurangi perhatian pemerintah kabupaten Rembang terhadap pengembangan budidaya perikanan kelautan. Pemanfaatan sumberdaya melalui kosepsi ramah lingkungan dan sustainable/berkelanjutan diyakini mampu menjamin keberlangsungan kehidupan. Salah satunya adalah melalui perikanan budidaya dengan menggunakan bibit ikan unggul. Namun hal akan semakin lengkap jika dibarengi dengan kapasitas pengolahan hasil ikan tangkap maupun budidaya untuk meningkatkan nilai guna maupun ekonomi komoditas.

Hasil pengukuran kinerja sasaran Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan sebagaimana tertuang dalam Tabel III.48 di bawah ini.

Tabel III.48
Capaian Kinerja Sasaran Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Omset produksi hasil olahan perikanan	150.000 ton	167.840,5 ton	111,89
2	Jumlah bibit ikan unggul	5 juta ekor	3 juta ekor	60,00
Rata-rata				85,95

Sasaran Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan didekati dari dua indikator yaitu omset produksi hasil olahan perikanan dan jumlah bibit ikan unggul. Capaian kinerja sasaran ini mencapai 85,95% atau dalam kategori berhasil. Ada beberapa kegiatan yang mendukung langsung tercapainya kinerja sasaran ini yaitu Pengembangan Bibit Ikan Unggul, Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan, Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan. Adapun Jenis bibit ikan unggul yang dikembangkan di Kabupaten Rembang meliputi lele, nila, patin, udang, gurami, dan bandeng di 13 kecamatan kecuali di kecamatan sale.

Upaya sebagaimana tersebut di atas terlihat dai data Unit Pengolahan ikan di Kabupaten Rembang pada Tabel di bawah ini.

Tabel III.49
Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Rembang Tahun 2012

No	Jenis Pengolahan	Jumlah	
		Unit	orang
1	Teri Nasi	24	402
2	Pemindangan	517	4978
3	Pengeringan/Pengasinan	994	11125
4	Pedo	40	246
5	Jambal	24	108
6	Pengasapan	561	1137
7	Terasi	163	483
8	Kerupuk	179	499
9	Petis	109	281
10	Presto	35	106
11	Tepung ikan	29	148
12	Pengalengan	1	96
13	Pembekuan	22	950
14	lain-lain (aneka produk)	11	597
	Jumlah	2790	1156

Sumber : Dinlutkan Kab. Rembang (2012)

Sasaran 40 :Terwujudnya kawasan wisata bahari

Sejalan dengan konsepsi *sea front city*, wisata bahari juga mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Rembang. Sasaran Terwujudnya kawasan wisata bahari didekati dari tiga indikator yaitu Terpeliharanya RM Sea Food di Kawasan BBS, Jumlah wisatawan bahari dan Rata-rata Kunjungan wisatawan. Hasil pengukuran indikator-indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel III.50
Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya kawasan wisata bahari

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terpeliharanya RM Sea Food di Kawasan BBS	1 paket	1 paket	100%
2	Jumlah wisatawan bahari	380.656 org	1.281.733 org	415,26 %
3	Rata-rata Kunjungan wisatawan	1 hr	1 hr	100 %
Rata-rata				205,09%

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya kawasan wisata bahari mencapai 205,09% masuk kategori sangat berhasil. Tingginya capaian kinerja sasaran ini disumbang oleh indikator jumlah wisatawan bahari (Taman Kartini/Dampo Awang Beach)yang naik sangat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya 380.656 orang mencapai 1.281.733 orang. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah pengelolaan wisata Taman Kartini/Dampo Awang Beach yang semakin profesional. Hal ini ditandai semakin banyaknya event, promosi yang semakin menarik pengunjung, dan alternatif obyek wisata lainnya yang juga semakin banyak.

Hal lain yang juga mendukung meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten Rembang adalah semakin banyak pilihan tempat penginapan/perhotelan. Terkait pemeliharaan RM sea food di kawasan BBS merupakan upaya untuk menjaga aset yang sampai saat ini masih terus ditawarkan kepada para investor. Diharapkan dengan kondisi bangunan dan lingkungan yang terjaga akan segera dapat menarik investor untuk mengembangkan kawasan BBS.

Sasaran 41 : Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance*.

Capaian kinerja sasaran terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance* dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III.51
Capaian Kinerja Sasaran Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance*.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase penurunan jumlah temuan pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal	30%	33 %	90 %
Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	40%	22 %	55 %
Opini penilaian BPK	WTP	WDP	80 %
Rata-rata			**75 %**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance*. dari 3 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 3 indikator kinerja dicapai sesuai target yang telah ditetapkan kecuali untuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang baru mencapai separuh dari target yang ditetapkan.

Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa, temuan pemeriksaan mengalami penurunan sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 33%, dari target yang telah ditetapkan. Jumlah rekomendasi pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti memiliki realisasi sama dengan tahun 2011 yaitu mencapai 55%. Inspektorat menargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas opini BPK RI terhadap pemeriksaan LKPD 2011. Namun atas target tersebut, LKPD Tahun 2011 mendapat Opini WDP. Hal ini didasarkan atas masih banyak catatan-catatan pengelolaan keuangan daerah yang perlu dibenahi terutama masalah Aset Daerah.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -1, diantaranya adalah :

1) Terbatasnya sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas di bidang pengawasan internal;
2) Cakupan Obyek Pemeriksaan internal yang cukup banyak.
3) Adanya upaya menutup-nutupi penyimpangan yang terdapat disektor dan instansi yang diperiksa sehingga menyebabkan banyaknya temuan pemeriksaan.
4) Lemahnya koordinasi antara SKPD yang diawasi dengan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5) Ada kecenderungan dari beberapa obyek pemeriksaan yang enggan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan sehingga proses tindak lanjut menjadi tidak bisa maksimal.

6) Tindak lanjut rekomendasi BPK RI banyak yang bersifat kontinuitas terhadap laporan keuangan berikutnya sehingga secara statistik pencapaian target kinerja atas kesesuaian tindak lanjut pada tahun berjalan belum bisa tercapai.
7) Tindak lanjut terhadap temuan di desa-desa berkaitan dengan pajak-pajak yang wajib disetorkan ke Kas Negara/ Daerah masih banyak yang belum terselesaikan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan pemetaan keseluruhan obyek pemeriksaan di Kabupaten Rembang dan Sinkronisasi dengan Aparat Fungsional Intern lainnya dalam rangka menetapkan Rencana Pelaksanaan Pemeriksaan Tahunan serta mengurangi jumlah obyek pemeriksaan untuk tahun berikutnya
2) Mulai Tahun 2012 sudah menerapkan SOTK baru sehingga terjadi penambahan personel Aparat Pengawas Pemerintahan dan mengirim Aparat Pengawasan tersebut untuk mengikuti Diklat penunjang pengawasan pemerintahan.
3) Peningkatan frekuensi pelaksanaan tindak lanjut dan merencanakan penambahan tim tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal.
4) Pemantauan Pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi BPK RI secara terus menerus dan Desk pembinaan SKPD atas hasil pemeriksaan BPK RI.
5) Menetapkan *action plan* atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan melaksanakannya sebagai langkah perbaikan kualitas laporan keuangan daerah.
6) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif dalam mengatasi permasalahan di desa-desa melalui pemeriksaan reguler dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1) Meningkatkan komitmen dan integritas dalam proses pembinaan penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pengawasan

2) Meningkatkan komitmen dan integritas dalam proses tindak lanjut hasil pemeriksaan
3) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dengan cara fasilitasi tata cara penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran 42 : Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien.

Capaian kinerja sasaran Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

Tabel III.52
Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai IKM	82	77,42	94,41
Jumlah sertifikasi ISO	10 unit	10 unit	100 %
Cakupan penerbitan KTP/KK	100%	100 %	100 %
Cakupan penerbitan Akta Catatan Sipil	100%	100 %	100 %
Rata-rata			**98,61 %**

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien mencapai 98,61 %.
Indikator nilai Indeks Kepuasan Masarakat berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian di 9 (sembilan) unit pelayanan publik mendapat nilai 77,42 dari target 84. Sedangkan indikator UPP yang mempunyai sertifikat ISO tercapai 100 %. Adapun UPP tersebut adalah

1. Puskesmas Lasem
2. Puskesmas Rembang I
3. Puskesmas Pamotan
4. RSUD Dr Soetrasno
5. SMKN1 Rembang
6. SMKN 2 Rembang

7. SMKN Sedan
8. SMAN 1 Rembang
9. SMPN 1 Lasem
10. SMPN 2 Rembang

Sedangkan cakupan KTP dan KK, serta penerbitan Akta Catatan Sipil dapat tercapai 100 %. Hal ini disebabkan pada tahun 2012 dilaksanakan pembuatan E-KTP secara nasional.

Kedepan yang perlu ditingkatkan dalam perbaikan sistem dan kelembagaan layanan publik perlu menyusun adanya standar pelayanan publik di masing-masing UPP serta melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara kontinu.

Sasaran 43 : Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.

Capaian kinerja sasaran Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.53
Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah media massa baik cetak & elektronik yg mempublikasikan keg pemerintahan dan pembangunan daerah	5000 exp	5000 exp	100 %
Tingkat penyebaran informasi publik dan fasilitasi pers	70%	70 %	100 %
Jumlah website milik Pemda yang dapat diakses oleh masyarakat	17 domain	17 domain	100 %
Rata-rata			100 %

Dari pencapaian target sasaran tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan., semua indikator sudah mencapai target. Jumlah media massa baik cetak maupun elektronik yang mempublikasikan kegiatan pemerintah dan pembangunan

daerah dimaksudkan untuk menunjukkan tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien untuk mencapai pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan dan pro aktif dalam mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh tehnologi yang memadai. Pada tahun 2012 ini jumlah media massa cetak maupun elektronik sangat banyak, Jumlah media massa baik cetak & elektronik yg mempublikasikan keg pemerintahan dan pembangunan daerah sebesar 5000 eks dan terealisasi sebesar 5000 eks maka tercapai 100% yang termasuk kategori berhasil.

Sedangkan tingkat penyebaran informasi publik dan fasilitasi pers yang ditargetkan 70% tersealisai sebesar 70% maka tercapai 100% dan termasuk kategori berhasil.

Secara kuantitatif jumlah website milik pemda yang dapat diakses oleh masyarakat guna untuk mencapai tujuan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan dan pro aktif dalam mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh tehnologi yang memadai sebesar 17 domain dan terealisasi 17 domain sehingga tercapai 100% dan dikategorikan berhasil.

Sasaran 44 : Responsif terhadap perkembangan situasi.

Capaian kinerja sasaran responsif terhadap perkembangan situasi dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut :

Tabel III.54
Capaian Kinerja Sasaran Responsif terhadap perkembangan situasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah kejadian bencana yang tertangani	14 Kec	14 kec	100 %
Menurunnya angka kriminalitas di seluruh wilayah.	50 kasus	50	100 %
Tersusunnya RKPD	1 dokumen	1 dokumen	100 %
Jumlah Desa yang menyusun Rencana Kerja Pembangunan	294 desa/kel	294 desa/kel	100 %
Rata-rata			100 %

Dari semua indikator kinerja pada sasaran Responsif terhadap perkembangan situasi sudah tercapai sehingga rata-rata persentase pencapaian target adalah 100%. Ini dinilai dari jumlah kejadian bencana di 14 kecamatan sudah mencapai target, menurunnya angka kriminalitas di seluruh wilayah juga sudah mencapai target, dari target 50 kasus yang terelisasi juga 50 kasus sehingga dapat dinyatakan dalam kategori berhasil. Sedangkan jumlah desa yang menyusun rencana kerja pembangunan yang ditargetkan 294 desa/kel tersealisai sebesar 294 desa/kel maka tercapai 100% dan termasuk kategori berhasil.

Sasaran 45 : Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.

Capaian kinerja sasaran responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.55
Capaian Kinerja Sasaran Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah penyelenggaraan Dialog / Audensi	14 kec	14 kec	100 %
Rata-rata			100 %

Capaian kinerja sasaran responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional. Tingkat kepuasan layanan masyarakat atas pelayanan yang diberikan melalui indikator jumlah penyelenggaraan Dialog / Audensi dari target 14 kecamatan terealisasi 14 kecamatan adalah sebesar 100% (sangat berhasil).

Sasaran 46 : Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis

Capaian kinerja sasaran proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.46
Capaian Kinerja Sasaran Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jml dokumen RDTRK	5 dokumen	5 dokumen	100 %
Jm dokumen kajian penelitian dan pengembangan	7 dokumen	7 dokumen	100 %
Jumlah warnet	60	60	100 %
Jumlah radio	8	8	100 %
Jumlah BTS	125	125	100 %
Rata-rata			**100 %**

Untuk capaian sasaran 46 dari semua indikator kinerja sudah mencapai 100% yang termasuk kategori berhasil, yang ditandai dengan beberapa indikator yaitu jumlah dokumen RDTRK dari target 5 dokumen terealisasi 5 dokumen, jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan dari target 7 dokumen terealisasi 7 dokumen sehingga dinyatakan dalam kategori berhasil.

Dalam perkembangan sistem informasi dan teknologi pada tahun 2012 ini sangat sehingga persaingan sangat memungkinkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut ada beberapa cara yaitu kerjasama bidang informasi dan komunikasi, pengembangan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa.

Dari tiga indikator kinerja yaitu jumlah radio, jumlah warnet dan jumlah BTS yang memiliki ijin masing- masing ditargetkan 8, 60,125 sudah terealisasi 100% dan dapat dikategorikan berhasil.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kinerja Keuangan Daerah selama Tahun Anggaran 2012 dapat terlihat dari rancangan laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2012. Secara garis besar kinerja keuangan daerah akan dikaji melalui sisi pendapatan dan sisi belanja sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2012 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2012 dari anggaran Pendapatan sebesar Rp.1.017.768.984.800,00 tercapai realisasi sebesar Rp.1.017.711.677.635,86 atau menunjukkan capaian kinerja sebesar 99,99%. Diukur dari target atau anggarannya, pada Tahun Anggaran 2012 *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* memberikan kontribusi sebesar Rp.103.304.514.980,86 atau 108,69%, *Pendapatan Transfer* memberikan kontribusi sebesar Rp.832.503.969.811,00 atau sebesar 99,00% dan *Lain-lain Pendapatan yang Sah* memberikan kontribusi sebesar Rp.81.903.192.844,00 atau 100,07%.

Pendapatan Asli Daerah dari anggaran sebesar Rp.95.041.791.800,00 tercapai realisasi PAD sebesar Rp.103.304.514.980,86 dengan rincian Pendapatan Pajak Daerah menyumbang Rp.21.691.251.109,00 atau (21,00%), Pendapatan Retribusi Daerah menyumbangkan Rp.26.290.263.055,00 atau (25,45%), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menyumbangkan Rp.3.318.450.860,00 atau (3,21%), dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menyumbangkan Rp.52.004.549.956,86 atau (50,34%) dari total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2012.

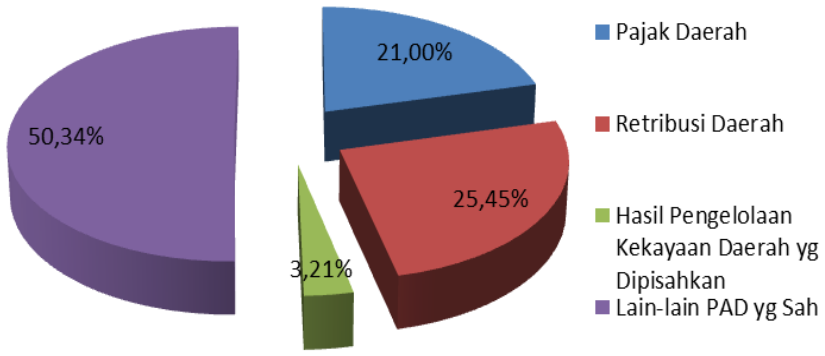

PROPORSI REALISASI PAD TA. 2012
Sumber : ***Rancangan Laporan Realisasi APBD TA. 2012***

Pendapatan Transfer dengan anggaran sebesar Rp.840.881.698.000,00 tercapai realisasinya sebesar Rp.832.503.969.811,00 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 99,00% dari anggaran yang ditetapkan. Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2012 terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp.692.398.154.559,00 atau (83,17%), Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp.96.417.785.000,00 atau (11,58%), dan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp.43.688.030.252,00 atau (5,25%), seperti dalam berikut:

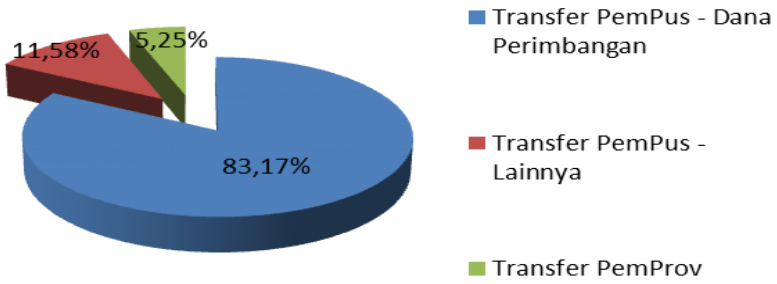

PROPORSI REALISASI PENDAPATAN TRANSFER TA. 2012
Sumber : ***Rancangan Laporan Realisasi APBD TA. 2012***

Sementara untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah dianggarkan sebesar Rp.81.845.495.000,00 realisasinya tercapai sebesar Rp.81.903.192.844,00 atau menunjukan pencapaian kinerja sebesar 100,07% dari anggaran yang ditetapkan. Kontribusi komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah di Tahun Anggaran 2012 terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp.680.367.844,00 dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp.81.222.825.000,00.

Pendapatan Transfer masih merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Daerah Tahun 2012 yaitu sebesar 81,80%, untuk Pendapatan Asli Daerah 10,15% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi 8,05%. Ditunjukan dalam grafik sebagai berikut :

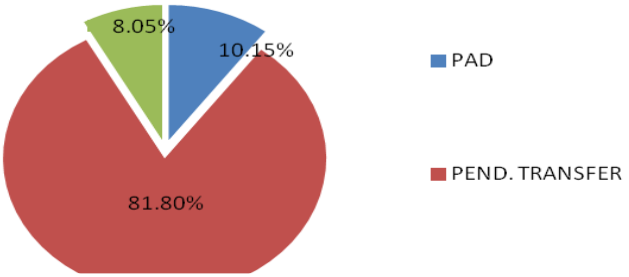

PROPORSI REALISASI PENDAPATAN DAERAH TA. 2012
Sumber : *Rancangan Laporan Realisasi APBD TA. 2012*

Meskipun kontribusi PAD masih dibawah Pendapatan Transfer, pada Tahun Anggaran 2012, capaian perolehan PAD sebesar Rp.103.304.514.980,86 meningkat sebesar Rp.29.372.569.050,24 atau 39,73% dibandingkan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.73.931.945.930,62.

Tabel Target Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi		Peningkatan Realisasi	
		Rp.	%	Rp.	%
2010	78.227.428.000,00	65.699.258.994,62	83,98%	0,00	0,00%
2011	83.354.852.000,00	73.931.945.930,62	88,70%	8.232.686.936,00	12,53%
2012	*95.041.791.800,00	103.304.514.980,00	108,69%	29.372.569.049,38	39,73%

)Sumber data LRA unaudit LKPD TA 2012

Pelampauan pendapatan dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar 108,69% atau peningkatan realisasi pendapatan

sebesar 39,73% lebih karena telah dilaksanakannya intensifikasi, efisiensi dan ekstensifikasi pengelolaan Pendapatan Daerah.

Intensifikasi Pendapatan Daerah dilakukan dengan kegiatan penekanan pada peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan, serta tunggakan tahun yang lalu. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi mematuhi kewajibannya membayar pajak, juga telah diadakan pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari Dinas teknis pengelola PAD pada saat melakukan pemungutan / penagihan pajak.

Efisiensi Pendapatan Daerah adalah optimalisasi sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun masyarakat dalam hal ini adalah Wajib Pajak dan Retribusi.

Bentuk dari efisisnesi tersebut dengan dilaksanakannya ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah.

Cerminan atas peningkatan/pelampauan capaian Pendapatan Asli Daerah di Tahun Anggaran 2012 dilihat dari capain perolehan PAD dari 3 (tiga) tahun terakhir mulai Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 tampak dalam grafik dibawah ini.

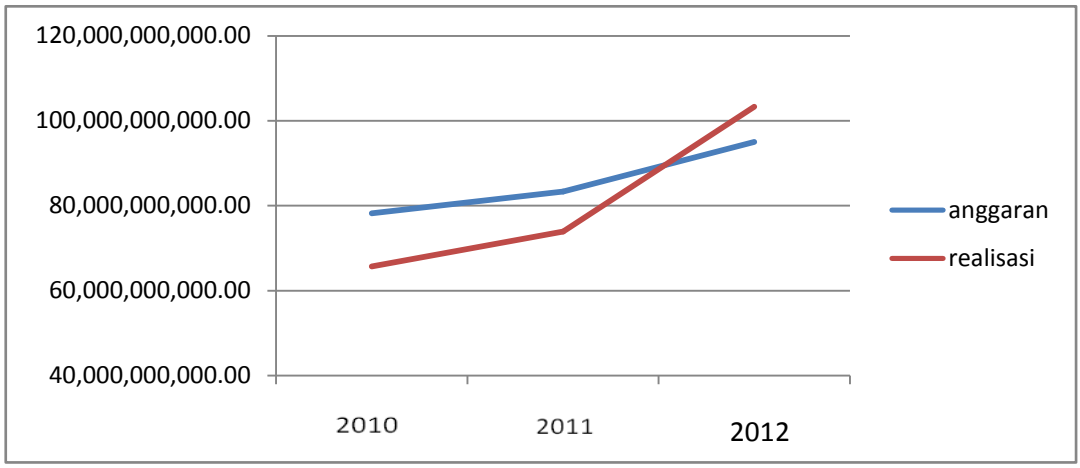

GRAFIK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TA. 2012

2. BELANJA

Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2012 menganggarkan belanja daerah sebesar Rp.1.034.429.349.043,00, dan direalisasikan sebesar Rp.969.132.236.253,00 atau 93,69%. Proporsi realisasi belanja Tahun Anggaran 2012 untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung masing-masing sebesar Rp.599.206.433.747,00 atau (61,83%) dan Rp.369.925.802.506,00 atau (38,17%) dari total realisasi belanja.

URAIAN	Realisasi	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**599.206.433.747,00**	**61,83%**
Belanja Pegawai	521.258.074.535,00	53,79%
Belanja Bunga	22.382.912,00	0,00%
Belanja Subsidi	700.000.000,00	0,07%
Belanja Hibah	30.221.506.900,00	3,12%
Belanja Bantuan Sosial	11.927.766.000,00	1,23%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik	34.088.248.000,00	3,52%
Belanja Tidak Terduga	988.455.400,00	0,10%
BELANJA LANGSUNG	**369.925.802.506,00**	**38,17%**
Belanja Pegawai	53.878.955.719,00	5,56%
Belanja Barang dan Jasa	115.843.189.592,00	11,95%
Belanja Modal	200.203.657.195,00	20,66%
TOTAL BELANJA	**969.132.236.253,00**	

Dari total realisasi belanja sebesar Rp.969.132.236.253,00 dapat lihat proporsi realisasi masing-masing kelompok belanja seperti dalam grafik berikut :

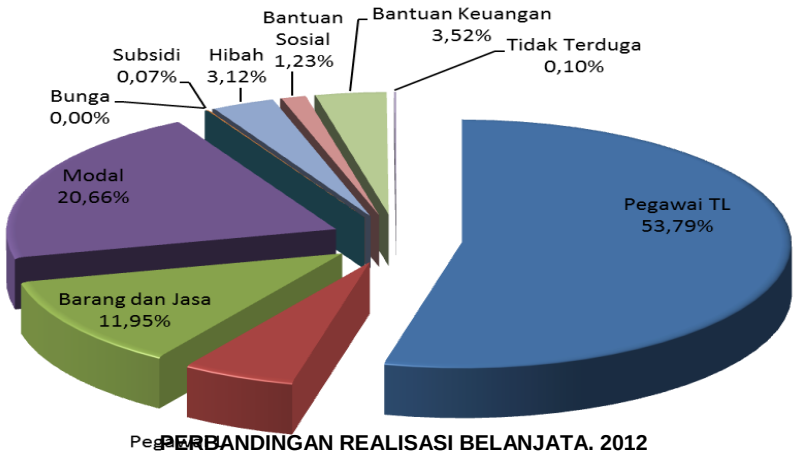

PERBANDINGAN REALISASI BELANJATA. 2012
Sumber : ***Rancangan Laporan Realisasi APBD TA. 2012***

Dari grafik diatas proporsi realisasi belanja pegawai Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.53.878.955.719,00 atau 5,56% dan realisasi Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.521.258.074.535,00.atau 53,79% Belanja Modal direalisasikan sebesar Rp.200.203.657.195,00 atau 20,66% dari keseluruhan belanja daerah, sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp.115.843.189.592,00 atau 11,95% dari keseluruhan belanja daerah.

Untuk realisasi belanja daerah yang lain berturut-turut adalah Belanja Bunga Rp.22.382.912,00 atau 0,002%, Belanja Subsidi Rp. 700.000.000,00 atau 0,07%, Belanja Bantuan Sosial Rp.11.927.766.000,00 atau 1,23%, Belanja Bantuan Keuangan Rp.34.088.248.000,00 atau 3,52% ,Belanja Hibah sebesar Rp.30.221.506.900,00 atau 3,12%, dan Belanja Tidak Terduga Rp.988.455.400,00 atau 0,10% dari keseluruhan total belanja.

Gambaran umum terhadap Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, sebelum dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 *(unaudit)*

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2012	REALISASI 2012	(%)	REALISASI 2011
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**PENDAPATAN**	1.017.768.984.800,00	1.017.711.677.635,86	99,99	873.464.930.507,62
1 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	95.041.791.800,00	103.304.514.980,86	108,69	73.931.945.930,62
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	17.063.722.000,00	21.691.251.109,00	127,12	14.568.408.017,00
1 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	23.136.304.700,00	26.290.263.055,00	113,63	21.051.282.763,00
1 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.739.706.000,00	3.318.450.860,00	57,82	2.678.745.388,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.102.059.100,00	52.004.549.956,86	105,91	35.633.509.762,62
1 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	840.881.698.000,00	832.503.969.811,00	99,00	718.862.694.237,00
1 . 2 . 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	690.572.047.000,00	692.398.154.559,00	100,26	572.039.837.614,00
1 . 2 . 1 . 1	Dana Bagi Hasil Pajak	39.946.965.000,00	41.438.403.299,00	103,73	39.090.266.356,00
1 . 2 . 1 . 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.819.474.000,00	2.154.143.260,00	118,39	1.877.432.258,00
1 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum	570.454.948.000,00	570.454.948.000,00	100,00	468.744.939.000,00
1 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus	78.350.660.000,00	78.350.660.000,00	100,00	62.327.200.000,00
1 . 2 . 2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	108.656.000.000,00	96.417.785.000,00	88,74	113.035.151.300,00
1 . 2 . 2 . 2	Dana Penyesuaian	108.656.000.000,00	96.417.785.000,00	88,74	113.035.151.300,00
1 . 2 . 3	Transfer Pemerintah Provinsi	41.653.651.000,00	43.688.030.252,00	104,88	33.787.705.323,00
1 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	41.653.651.000,00	43.688.030.252,00	104,88	33.787.705.323,00
1 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	81.845.495.000,00	81.903.192.844,00	100,07	80.670.290.340,00
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	622.670.000,00	680.367.844,00	109,27	831.235.340,00
1 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya	81.222.825.000,00	81.222.825.000,00	100,00	79.839.055.000,00
2	**BELANJA**	1.034.429.349.043,00	969.132.236.253,00	93,69	868.066.639.368,00
2 . 1	**BELANJA OPERASI**	814.397.971.441,00	767.940.123.658,00	94,30	679.390.274.826,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	613.950.592.825,00	575.137.030.254,00	93,68	513.159.175.138,00
2 . 1 . 2	Belanja Barang	121.460.612.616,00	115.843.189.592,00	95,38	94.367.463.645,00
2 . 1 . 3	Belanja Bunga	37.000.000,00	22.382.912,00	60,49	36.627.375,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2012	REALISASI 2012	(%)	REALISASI 2011
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2 . 1 . 4	Belanja Subsidi	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	0,00
2 . 1 . 5	Belanja Hibah	30.835.000.000,00	30.221.506.900,00	98,01	8.754.897.150,00
2 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	12.246.366.000,00	11.927.766.000,00	97,40	35.458.167.518,00
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan	35.168.400.000,00	34.088.248.000,00	96,93	27.613.944.000,00
2 . 2	**BELANJA MODAL**	219.031.377.602,00	200.203.657.195,00	91,40	187.993.269.792,00
2 . 2 . 1	Belanja Tanah	80.842.000,00	842.000,00	1,04	309.422.000,00
2 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	43.947.624.220,00	37.379.820.430,00	85,06	26.260.243.739,00
2 . 2 . 3	Belanja Bangunan dan Gedung	111.176.255.100,00	107.715.334.295,00	96,89	63.904.092.178,00
2 . 2 . 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.832.758.162,00	49.046.985.390,00	92,83	87.821.697.574,00
2 . 2 . 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.993.898.120,00	6.060.675.080,00	55,13	9.697.814.301,00
2 . 3	**BELANJA TAK TERDUGA**	1.000.000.000,00	988.455.400,00	98,85	683.094.750,00
2 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	988.455.400,00	98,85	683.094.750,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.660.364.243,00)	48.579.441.382,86	(291,59)	5.398.291.139,62
3	**PEMBIAYAAN**				
3 . 1	**PENERIMAAN DAERAH**	33.462.940.243,00	33.462.940.243,31	100,00	28.118.099.945,69
3 . 1 . 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	33.462.940.243,00	33.462.940.243,31	100,00	28.118.099.945,69
3 . 2	**PENGELUARAN DAERAH**	16.802.576.000,00	14.440.865.413,00	85,94	53.450.842,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.254.000.000,00	5.000.000.000,00	68,93	0,00
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	9.548.576.000,00	9.440.865.413,00	98,87	53.450.842,00
	PEMBIAYAAN NETTO	16.660.364.243,00	19.022.074.830,31	114,18	28.064.649.103,69
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	67.601.516.213,17	0,00	33.462.940.243,31

Prosentase capaian kinerja di bawah 100% tidak menunjukan penurunan kinerja Pemerintah Daerah, tapi lebih merupakan efisiensi belanja di seluruh SKPD. Dimana prinsip keuangan daerah adalah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan, asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Efisiensi penggunaan anggaran juga karena dalam pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan lebih berhati-hati agar sesuai dengan ketentuan perundangan, agar opini BPK selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Rembang tahun 2012 ini disusun seobyektif mungkin agar dapat menjadi cerminan kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang selama tahun 2012, sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk langkah evaluasi dan perbaikan kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang. Berdasarkan penilaian sendiri (*self assesment*) atas realisasi pelaksanaan rencana kinerja tahun 2012, dapat disimpulkan sejumlah keberhasilan, kegagalan dan permasalahan yang dihadapi, berikut alternatif pemecahan masalahnya.

LAKIP ini menyajikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang didukung indikator setingkat *outcome*, diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja

Simpulan tingkat capaian sasaran dari 46 (empat puluh enam) sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
1	Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi.	100
2	Promosi peluang investasi.	139
3	Terjaminnya keamanan berusaha.	100,7
4	Tersedianya infrastruktur yang memadai.	373

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
5	Tersedianya dukungan SDM yang memadai.	86,37
6	Penyebaran sarana pelayanan bank dan lembaga keuangan non bank ke pelosok daerah.	101,85
7	Ketersediaan skim kredit sesuai dengan perilaku jenis usaha.	100
8	Adanya kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik.	140,33
9	Dimilikinya legalitas asset pelaku usaha sebagai jaminan kredit.	232
10	Jaminan keamanan oleh Pemda.	106,2
11	Mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.	110,9
12	Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha.	91,15
13	Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha	88,65
14	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian.	120,42
15	Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.	114,85
16	Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah.	216,03
17	Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat	108,05
18	Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.	76,87
19	Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi.	99,44

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
20	Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan.	113,69
21	Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan.	101,82
22	Tersedianya beasiswa bagi penduduk miskin.	104,36
23	Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan.	95,03
24	Tersedianya tenaga medis yang memadai.	32,38
25	Tersedianya obat-obatan yang memadai.	98
26	Tersedianya peralatan medis yang memadai.	94,44
27	Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.	105,02
28	Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan.	218,42
29	Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	100
30	Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.	100
31	Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama.	152,67
32	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai.	62,75
33	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat.	99,85
34	Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan.	64,35
35	Meningkatnya kualitas saluran irigasi.	84,81

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
36	Meningkatnya kualitas saluran drainase.	107,72
37	Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya *sea front city.*	106,23
38	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.	100
39	Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan.	85,95
40	Terwujudnya kawasan wisata bahari	205,09
41	Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance*.	75
42	Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien.	98,61
43	Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.	100
44	Responsif terhadap perkembangan situasi.	100
45	Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.	100
46	Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis	100
	Rata-rata	107,37

Prosentase capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2012 secara keseluruhan 107,37 (kategori sangat baik). Dari 46 (empat puluh enam) sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD capaian kinerja sasaran dengan kategori sangat baik ada 30 sasaran, kategori baik 11 (sebelas) sasaran, kategori cukup 4 (empat) sasaran dan kategori kurang 1(satu) sasaran.

Selain keberhasilan yang ditunjukkan dengan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja, ada keberhasilan lain yang dapat menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2012 dengan diperolehnya piala dan piagam penghargaan tingkat nasional dan provinsi, antara lain Piala Adipura, dan lain-lain.

2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2012, antara lain :

a. Permasalahan administrasi perencanaan
   1) Kurang akuratnya data awal perencanaan yang dapat menyebabkan pemasangan target yang terlalu tinggi, sehingga sulit tercapai;
   2) Adanya beberapa indikator kinerja pengukurannya dilakukan oleh pihak lain yang dapat menyebabkan kinerja SKPD yang bersangkutan tidak terukur tepat waktu, sehingga kinerja dimaksud seakan-akan tidak tercapai, padahal hanya belum terukur;
   3) Adanya SKPD yang tidak mengalokasikan anggaran untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.
b. Permasalahan teknis pelaksanaan
   1) Adanya faktor ekternal musim, hama, dan bencana, yang dapat mempengaruhi kinerja Pemerintah Kabupaten antara lain produktivitas dan pola tanam pada tanaman, pelaksanaan kegiatan konstruksi, kunjungan wisata, dan lain-lain;
   2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang kurang tepat dan waktu penyelesaian program/ kegiatan yang terlalu pendek sehingga hasil kegiatan tidak bisa mencapai target kinerja;
   3) Kurangnya sumber daya (manusia dan dana) untuk mencapai target yang telah ditetapkan;

3. Upaya Pemecahan

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan pun bersifat administrasi dan teknis, sebagai berikut :

a. Pemecahan administrasi perencanaan

1) Menyesuaikan target kinerja dengan kondisi nyata dan kemampuan sumber daya yang dimiliki;
2) Mendorong pencapaian target kinerja dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi meskipun tidak ada anggaran yang secara khusus untuk memenuhi pencapaian tersebut;
3) Mendorong adanya sinkronisasi indikator kinerja dokumen RPJMD dan dokumen kinerja dengan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA);
4) Mendorong SKPD untuk melakukan pengukuran kinerja secara langsung;

b. Pemecahan teknis pelaksanaan

1) Mendorong petani menggunakan benih unggul dan tahan hama guna meminimalisir dampak dari musim;
2) Mengupayakan proses pelelangan pada awal tahun anggaran, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan cukup;
3) Meningkatkan fungsi monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan sehingga permasalahan pencapaian target kinerja dapat diketahui sejak awal dan dapat segera diupayakan penyelesaiannya;
4) Mengupayakan perubahan APBD guna memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Untuk meningkatkan capaian dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang secara keseluruhan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan keselarasan dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja secara bertahap sesuai dengan siklus perencanaan, yaitu mengupayakan semua (100%) indikator kinerja utama dapat menjadi indikator kinerja tiap tahun;
2. Melakukan pengukuran secara periodik terhadap hasil capaian kinerja sebagai bahan pengendali pencapaian kinerja pada akhir tahun anggaran dan tahun perencanaan agar upaya pencapaian target kinerja dapat optimal;
3. Menajamkan kembali program/kegiatan yang mengarah pada pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten dan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta menyediakan pendanaan yang cukup untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka memenuhi target capaian sasaran, terutama untuk target yang belum dipenuhi tahun sebelumnya;
4. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan rencana dan laporan kinerja.

Rembang, Maret 2013

BUPATI REMBANG

H. MOCH SALIM,M.Hum

PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2012

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi.	Tingkat Penyelesaian perijinan terhadap waktu yang ditentukan	100%	100%	100
		Jumlah pengaduan masyarakat terhadap penerbitan perijinan dan non perijinan	12 kasus	12 kasus	100
2	Promosi peluang investasi.	Jumlah promosi investasi .	3 kali	3 kali	100
		Jumlah kepeminatan	3 investor	2 investor	67
		Nilai Realisasi Investasi	Rp 299.909.737.518	Rp516,371,924,708	250
3	Terjaminnya keamanan berusaha.	Jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di sektor perdagangan	200 buah	177 buah	89
		Jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di sektor perindustrian	54 buah	55 buah	102
		Jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di luar sektor perdagangan dan perindustrian	179 buah	199 buah	111
4	Tersedianya infrastruktur yang memadai.	Jumlah industri skala besar	6 buah	6 buah	100
		Jumlah klaster industri	8 buah	8 buah	100
		Rekomendasi BKPRD terhadap perizinan pemanfaatan ruang	5	46 buah	920
5	Tersedianya dukungan SDM yang memadai.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70	68	97.14
		Pencari kerja yang ditempatkan (5%th)	5%	5%	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Pengangguran terbuka (menurun 3%/tahun)	-3%	-3%	100
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,5	4.5	100
		Penempatan tenaga kerja (orang)			
		a. AKL	265	99	37.36
		b. AKAD	282	175	62.05
		c. AKAN	146	7	4.79
6	Penyebaran sarana pelayanan bank dan lembaga keuangan non bank ke pelosok daerah.	Jumlah BUMDes yang terbentuk	5 BUMDes	5 BUMDes	100
		Jumlah lembaga perbankan	27	28	103.7
7	Ketersediaan skim kredit sesuai dengan perilaku jenis usaha.	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah	11 kelompok	11 kelompok	100
		Jumlah kelompok UEP yang yang dikelola oleh perempuan	2 klp	2 klp	100
		Jumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilatih pengelolaan administrasi kelompok	13 kelompok	13 kelompok	100
8	Adanya kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik.	Jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mengikuti pembinaan atau pelatihan usaha	95 UMKM	95 UKM	100
		Jumlah koperasi	529 buah	548 buah	104
		Prosentase pertumbuhan jumlah koperasi	0.94%	3.59%	382
		Prosentase pertumbuhan jumlah anggota koperasi	18.7 %	41.50%	222

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		Prosentase jumlah koperasi aktif dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi	76 %	79%	104
		Prosentase jumlah koperasi sehat dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi	78%	78%	100
		Jumlah usaha mikro kecil dan menengah	20.843 UMKM	26.163 UMKM	125
		Prosentase peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah	9.76%	21.75%	223
		Prosentase usaha mikro kecil dan menengah dibandingkan seluruh unit usaha	32.56%	99.78%	306
		Prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor usaha mikro kecil dan menengah dibanding jumlah penduduk	7,40 %	10,50 %	142
		Jumlah omzet usaha mikro kecil dan menengah	Rp 11.831.650.000.000	Rp 19.866.457 jt	168
		Jumlah ekspor Kabupaten Rembang	16.163.000 USD	25,8 jt USD	160
9	Dimilikinya legalitas asset pelaku usaha sebagai jaminan kredit.	Pembinaan dan penguatan manajemen	43 UMKM	100 UMKM	232
10	Jaminan keamanan oleh Pemda.	Jumlah Perda yang disusun	10	7	70
		Jumlah Perbub yang disusun	60	54	90
		Jumlah Keputusan Bupati yang disusun	600	1088	181.33
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja dibanding jumlah penduduk	1 per 10.000 pddk	1 per 10.000 pddk	
		Jumlah Anggota Linmas terlatih	75 org	70 org	95.89

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		Tingkat penyelesaian pelanggaran trantibum di Kab. Rembang	100%	100%	100
11	Mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.	% peningkatan ketersediaan alsintan dan pemanfaatannya untuk kegiatan budidaya, panen, dan pengolahan hasil pertanian/ perkebunan	5	4.86	97.2
		Produksi tanaman pangan (Ton) :			
		a. Padi	243,063	225,476	92.76
		b. Jagung	161,939	121,477	75.01
		Produksi hortikultura (Ton)			
		a. Cabe	57,733	67,520	116.95
		b. Mangga	6,594	7,934	120.32
		Produksi tanaman perkebunan (Ton)			
		a. Tebu (cane)	32,745	37,621	114.89
		b. Kelapa (kopra)	4,319	4,290	99.33
		Produksi Peternakan (Kg)			
		a. Daging sapi	901,667	1,189,020	131.87
		b. Daging kambing	105,296	133,035	126.34
		c. Daging ayam	733,400	772,713	105.36
		d. Telur ayam	564,992	632,635	111.97
		e. Telur itik	671,925	893,802	133.02
		Produksi hasil tangkapan ikan (Ton)	50,264.17	58.621.30	116.63

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
12	Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha.	Peningkatan pelaku usaha sektor tanaman pangan dan hortikultura	5%	4.98%	99.6
		Peningkatan pelaku usaha sektor perkebunan	5%	4.41%	88.2
		Peningkatan Pelaku usaha sektor peternakan	5%	4.73%	94.6
		Peningkatan kelompok usaha sektor Kehutanan	5%	4.11%	82.2
13	Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani Pangan dan Hortikultura	5%	5.01%	100.2
		Peningkatan stimulan untuk kelompok tani perkebunan	5%	4.98%	99.6
		Peningkatan stimulan untuk kelompok tani peternakan	5%	4.23%	84.6
		Peningkatan stimulan untuk kelompok tani Kehutanan	5%	3.51%	70.2
14	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian.	Bertambahnya luas lahan pertanian dan perkebunan yang teraliri jaringan irigasi (ha)	800	1500	187.5
		Pembangunan embung	15	8	53.33
15	Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.	Jumlah PAD	Rp 89.947.696.000	103,304,514,980.86	114,85
16	Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah.	Berkurangnya piutang pajak/retibusi	40%	86.41%	216.03
17	Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 3.071.211.000	3,318,450,860.00	108.05
18	Meningkatnya kualitas	Angka Kelulusan SD/MI	99,15 %	99.99%	100.84

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
	proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.	Angka kelulusan Ujian nasional SMP/MTs	93,77%	99.03%	105.6
		Kelulusan UN SMA/MA/SMK	88,75%	99.97%	112.64
		TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah	54%	56%	103.7
		TK/RA/SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	99,78%	100%	100.22
		SMP/MTs/SMA/SMK/MA melaksanakan Program MBS dengan Baik.	100%	100%	100
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000.	38,5%	6.59%	17.12
19	Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi.	Guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	37,54%	45.58%	121.41
		Guru SD yang sertifikasi	51,54%	46.07%	89.38
		Guru SD/MI layak mengajar	52,18%	71.60%	137.21
		Guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	86,49%	92.06%	106.44
		Guru SMP/MTs yang sertifikasi	61,38%	48.15%	78.44
		Guru SMA/SMK/MA yang sertifikasi	46,46%	28.21%	60.71
		Guru SMA/SMK/MA layak mengajar	93,33%	94.32%	101.06

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		Meningkatnya tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yag dipersyaratkan	81,25%	82.05	100.98
20	Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan.	TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	36%	86.48%	240.22
		Ruang kelas SD/MI sesuai standar	69,84%	80.06%	114.63
		SD/MI memilki perpustakaan sesuai standar	42,13%	54.32%	129.03
		SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan Komputer	10,51%	4.09%	38.91
		SMP/MTs memilki perpustakaan sesuai standar	81,93%	78.72%	96.08
		SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan Komputer	60,84%	46.49%	76.41
		Lembaga kursus/pelatihan /kelompok belajar usaha/ magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan	61,08%	61.48	100.65
21	Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua	Meningkatnya jumlah lembaga PAUD dan TK	460	432	93.91
		APK PAUD	84.50%	77.07%	91.21
		APK SD/MI	101,92%	99.50%	97.62
		APK SMP/MTs	71.34%	96.98%	135.94
		APK SMA/SMK/MA	60,40%	65.86%	109.03
		APM SMP/MTs	71,34%	67.06%	94.05
		APM SMA/SMK/MA	45,11%	44.44%	98.51

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C	95,65%	87.72%	91.71
		Angka melek huruf	99,70%	99.72%	100
		Angka Melanjutkan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan	78%	82.84%	106.2
22	Tersedianya beasiswa bagi penduduk miskin.	Angka Putus sekolah SD	0,04%	0.03%	133
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,22%	0.16%	137.5
		Angka putus sekolah SMA/MA/SMK	0,31%	0.38%	81.5
		Penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan /kelompok belajarusaha/magang (%)	31,33%	20.50%	65.43
23	Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan.	lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya	40%	40%	100
		lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja	32,13%	27.80%	85.5
		Lulusan program paket C dapat memasuki dunia kerja	35,82%	35.66	99.6
24	Tersedianya tenaga medis yang memadai.	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	6 per 100 rb pendk	3,1 per 100 rb pendk	51.67
		Rasio Dokter per 100.000 penduduk	40 per 100 rb pendk	11,64 per 100 rb pendk	29.1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk	11 per 100 rb pendk	1,8 per 100 rb pendk	16.36
25	Tersedianya obat-obatan yang memadai.	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100%	98%	98
26	Tersedianya peralatan medis yang memadai.	Ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	90%	85%	94.44
27	Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan	Angka Kematian Bayi (AKB)	145 kasus	150	96.55
		Angka Kematian Ibu (AKI)	8 kasus	13	37.5
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100	100
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	85%	97.96	115.25
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100%	100	100
		Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	87%	86.98	99.98
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	65%	100	153.85
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85%	99.85	117.47
		Cakupan pelayanan nifas	85%	97.44	114.64
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	65%	100	153.85
		Cakupan peserta KB aktif	80%	84.06	105.08
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
28	Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100%	100	100
		Cakupan rawat jalan	15%	63.29	421.93
		Cakupan rawat inap	1,5%	2	133.33
		Perluasan Puskesmas	6 unit	6	100
		Cakupan Desa Siaga Aktif	69.39%	100	144.11
29	Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	100%	100%	100
		Cakupan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan rentan.	100%	100%	100
30	Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.	Jumlah Produk TTG Lokal unggulan yang dipamerkan pada event tingkat nasional	1 paket	1 paket	100
31	Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama.	Jumlah sarana peribadatan dan pendidikan agama yang dibantu	262 Unit	400 unit	152,67
32	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Jumlah peserta diklat struktural	47 org	43 org	91,49
		Jumlah peserta diklat fungsional	150 org	51 org	34
33	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat.	Jumlah dokumen parahita yang tersusun	1 paket	1 paket	100
		Jumlah posyandu unggulan yang terbentuk	6 kelompok	6 kelompok	100
		Jumlah kader posyandu yang terlatih	112 kader	84 kader	75
		Jumlah data posyandu yang tersusun	1 buku	1 buku	100
		Jumlah sarana posyandu yang tersedia	30 unit	30 unit	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		Jumlah rapat kordinasi pokjanal posyandu tingkat kecamatan	14 kecamatan	14 kec	100
		Jumlah orang tua yang mendapatkan pelatihan tentang metode pengajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus	100 orang	100 oran	100
		Pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat (per tahun)	1	1	100
		Pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar (per tahun/orang)	1 keg/75 org	1 keg/75 org	100
		Pelatihan ketrampilan bagi eks penyakit sosial (per tahun)	1 keg	1 keg	100
		Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	50	50	100
		Pelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi keluarga fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi (kegiatan/tahun)	1	1	100
		Lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi	50,30	20	39.76
		lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah	92,50%	100%	108.11
34	Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan.	persentase panjang jalan dalam kondisi baik	85%	54.70%	**64.35**
35	Meningkatnya kualitas saluran irigasi.	Luas Irigasi kabupaten kondisi baik	50%	47.61%	95.22
		% peningkatan sawah dengan irigasi teknis	10%	7.44%	74.4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
36	Meningkatnya kualitas saluran drainase.	% wilayah yang memiliki drainase	50%	80	160.00
		% Drainase dalam kondisi baik	60%	55.84	93.07
		Penilaian adipura	piala	piala	100
		Prosentase RTH Kawasan Perkotaan	10%	7.78	77.80
37	Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung	Jumlah investor bidang kelautan	4	4	100
		Jumlah raman TPI	300,000,000,000	336,198,863,000	112,07
38	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.	Jumlah kelompok Pokwasmas	5	5	100
39	Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan.	omset produksi hasil olahan perikanan	478.800 ton	167.840,5 ton	111.89
		Jumlah bibit ikan unggul	5 juta	3 juta ekor	60
40	Terwujudnya kawasan wisata bahari	Terpeliharanya RM Sea Food di Kawasan BBS	1 paket	1 paket	100
		Jumlah wisatawan bahari	380.656 orang	1.281.733 org	415,26
		Rata-rata Kunjungan wisatawan	1 hari	1 hr	100
41	Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance* .	Persentase penurunan jumlah temuan pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal	30%	33%	90
		Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	40%	22%	55
		Opini penilaian BPK	WTP	WDP	80
42	Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan	Nilai IKM	82	77.42	94.41

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
	kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien.	Jumlah sertifikasi ISO	10 unit	10 unit	100
		Cakupan penerbitan KTP/KK	100%	100%	100
		Cakupan penerbitan Akta Catatan Sipil	100%	100%	100
43	Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.	Jumlah media massa baik cetak & elektronik yg mempublikasikan keg pemerintahan dan pembangunan daerah	5000 exp	5000 exp	100
		Tingkat penyebaran informasi publik dan fasilitasi pers	70%	70%	100
		Jumlah website milik Pemda yang dapat diakses oleh masyarakat	17 domain	17 domain	100
44	Responsif terhadap perkembangan situasi.	Jumlah kejadian bencana yang tertangani	14 Kec	14 Kec	100
		Menurunnya angka kriminalitas di seluruh wilayah.	50 kasus	50 kasus	100
		Tersusunnya RKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jml dokumen rekomendasi kebijakan perencanaan	8 dokumen	8 dokumen	100
		Jumlah Desa yang menyusun Rencana Kerja Pembangunan	240 desa/kel	240 desa/kel	100
45	Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.	Jumlah penyelenggaraan Dialog / Audensi	14 kec	14 kec	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
46	Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis	Jml dokumen RDTRK	5 dokumen	5 dokumen	100
		Jm dokumen kajian penilitian dan pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
		Jumlah warnet	60	60	100
		Jumlah radio	8	8	100
		Jumlah BTS	125	125	100

Jumlah Anggaran : Rp996,746,518,462
Realisasi Anggaran : Rp969,132,236,253

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM, M.Hum